



Drs. R.H. Makhrur Adam Maulana, M.Ag.

ILMU KALAM

Sejarah, Pemikiran, dan Perdebatan Teologi Islam

Pengantar:

Dr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag.

Kaprodi S2 Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Saizu Purwokerto

Drs. R.H. Makhrur Adam Maulana, M.Ag.

ILMU KALAM

Sejarah, Pemikiran, dan
Perdebatan Teologi Islam



ILMU KALAM

Sejarah, Pemikiran, dan
Perdebatan Teologi Islam

Penulis:

Drs. R.H. Makhzur Adam Maulana, M.Ag.

Copyright © Pustaka Ilmu, 2026

xiv+266 halaman; 14,5x21 cm

Hak cipta ada Pada Penulis

ISBN: 978-623-509-393-2

Penulis : Drs. R.H. Makhzur Adam Maulana, M.Ag.

Editor : Dr. Zuhri Humaidi, M.S.I.

Desain Cover : Nur Afandi

Layout : Tim Pustaka Ilmu Group

Penerbit Pustaka Ilmu

Griya Larasati No. 079 Tamantirto, Kasihan,

Bantul Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: radaksipustakailmu@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Layanan WhatsApp: 081578797497

Anggota IKAPI

Cetakan I, Juni 2026

Marketing:

Griya Larasati No. 079 Tamantirto, Kasihan,

Bantul Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: radaksipustakailmu@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Layanan WhatsApp: 0815728053639

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit
Pustaka Ilmu Yogyakarta

PENGANTAR

Dr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag.

Kaprodi S2 Pendidikan Agama Islam

Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

“Ilmu Kalam sebagai Disiplin Ilmu Teologi yang Progresif”

Ilmu kalam adalah disiplin teologi yang berusaha menjelaskan dan membela akidah melalui perdebatan argumentatif. Sejarahnya berawal dari dinamika umat dan berkembang menjadi sistem berpikir teologis. Topik yang sering menjadi inti: sifat Tuhan, takdir dan kebebasan, status pelaku dosa, wahyu dan akal, serta akhirat. Perdebatan dalam kalam penting karena membentuk konsistensi konsep iman dan melatih cara berpikir teologis.

Buku “Ilmu Kalam: Sejarah, Pemikiran, dan Perdebatan Teologi Islam” yang ditulis oleh Drs. H. Makhrur Adam Maulana, M.Ag. Ini berupaya memperkenalkan ilmu kalam bukan sekadar sebagai daftar mazhab atau perbedaan pendapat, melainkan sebagai tradisi berpikir teologis yang lahir dari pergulatan sejarah umat. Melalui pembahasan tentang sejarah, pemikiran, dan perdebatan, buku ini membantu pembaca memahami bahwa kalam merupakan upaya serius untuk merumuskan keyakinan secara sistematis ketika muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam iman.

Dari segi isi, buku ini menonjol pada kemampuannya memetakan problem teologi yang menjadi “bahan bakar” perdebatan. Pembahasan seperti ketuhanan dan sifat-sifat, relasi wahyu dan akal, serta persoalan takdir dan kebebasan, biasanya tidak berhenti pada klaim, tetapi menampilkan bagaimana tiap pandangan membangun argumen dan menarik konsekuensi teologisnya. Dengan cara itu, pembaca diarahkan untuk melihat “mengapa” suatu pandangan muncul, bukan hanya “apa” isi pandangannya.

Sisi yang menurut saya paling kuat adalah bahwa buku ini menampilkan kalam sebagai disiplin yang memiliki tujuan: melindungi akidah, memperjelas konsep, dan menjaga konsistensi pemikiran. Karena itu, diskusi kalam dipahami bukan sebagai debat kosong, melainkan sebagai mekanisme intelektual untuk menjawab kebingungan konseptual yang dialami komunitas umat. Buku juga memberi manfaat tambahan berupa “latihan cara berpikir”, yaitu bagaimana argumen teologis dapat diuji lewat definisi, premis, dan konsekuensi.

Namun, terdapat tantangan yang juga patut dicatat: karena kalam berkaitan dengan perbedaan penafsiran dan istilah teknis, pembaca yang baru masuk ke wilayah ini mungkin membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan bahasa dan logika masing-masing mazhab. Jika buku tidak cukup memberi konteks peristilahannya atau tidak membandingkan posisi secara seimbang pada setiap bab, pembaca bisa merasa bahwa debat lebih dominan daripada pemahaman latar sejarahnya.

Secara keseluruhan, buku ini cocok bagi pembaca yang ingin memahami ilmu kalam secara lebih utuh: sebagai sejarah perdebatan, sebagai struktur pemikiran teologis, dan sebagai arena argumentasi yang membentuk cara umat memahami keyakinan. Setelah membaca, saya berharap tidak hanya mengenal perbedaan, tetapi juga menangkap bahwa perdebatan teologi dalam kalam pada dasarnya bertumpu pada usaha mencari kejelasan iman secara rasional dan tekstual—dengan tetap menyadari bahwa setiap posisi lahir dari cara pandang yang berbeda terhadap teks, akal, dan konsekuensi moralnya.

Saya sangat berharap kepada para mahasiswa untuk dapat membaca buku ini sebagai langkah awal dalam belajar dan memahami ilmu kalam.

Dr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag.

Kaprodi S2 Pendidikan Agama Islam Pascasarjana

UIN Saizu Purwokerto

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku *Ilmu Kalam: Sejarah, Pemikiran, dan Perdebatan Teologi Islam* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Ilmu Kalam merupakan salah satu disiplin ilmu penting dalam khazanah intelektual Islam yang membahas persoalan akidah, ketuhanan, kenabian, kebebasan manusia, hingga hubungan antara wahyu dan akal. Kehadiran ilmu ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah umat Islam yang menghadapi berbagai tantangan pemikiran, baik yang berasal dari internal umat maupun pengaruh filsafat dan tradisi intelektual luar Islam. Dalam perjalanan sejarahnya, Ilmu Kalam berkembang menjadi ruang dialog, perdebatan, sekaligus refleksi kritis untuk mempertahankan dan menjelaskan ajaran Islam secara rasional dan argumentatif.

Penulis menyadari bahwa kajian teologi Islam bukan sekadar wacana akademik, melainkan juga bagian penting dalam membangun sikap keberagamaan yang moderat, kritis, dan toleran. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, maupun masyarakat umum yang ingin memahami dinamika pemikiran teologi Islam secara lebih mendalam.

Dalam penyusunan buku ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan inspirasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan keilmuan, serta menjadi bagian dari ikhtiar dalam mengembangkan tradisi intelektual Islam yang inklusif dan berkemajuan.

Mei 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

Pengantar Dr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag.	v
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x

BAGIAN I

DASAR-DASAR ILMU KALAM 1

Bab 1 Pengertian Ilmu Kalam 2

A. Definisi Ilmu Kalam 2

B. Asal-usul istilah “kalam” 5

C. Tujuan Ilmu Kalam 7

D. Perbedaan Ilmu Kalam, Filsafat, dan Tasawuf 9

E. Objek kajian Ilmu Kalam 11

Bab 2 Sejarah Munculnya Ilmu Kalam 13

A. Kondisi umat Islam pasca wafat Nabi 13

B. Konflik politik dan pengaruh terhadap aqidah 18

C. Munculnya perdebatan teologis 22

D. Perang Shiffin dan Tahkim 26

E. Awal lahirnya kelompok-kelompok teologi 29

Bab 3 Sumber dan Metode Ilmu Kalam 31

A. Al-Qur'an sebagai sumber utama 31

B. Hadis dan ijma' 34

C. Akal dalam Ilmu Kalam 37

D. Metode debat dan argumentasi 39

E. Pendekatan rasional dan tekstual 41

BAGIAN II

ALIRAN-ALIRAN ILMU KALAM 43

Bab 4 Khawarij 44

A. Latar belakang munculnya 45

B. Doktrin utama 48

C. Konsep dosa besar 51

D. Pandangan politik 53

E. Pecahan-pecahan Khawarij 55

F. Pengaruh dalam sejarah Islam 56

Bab 5 Murji'ah 60

A. Pengertian irja' 60

B. Iman menurut Murji'ah 63

C. Hubungan amal dan iman 65

D. Tokoh-tokoh Murji'ah 68

E. Kritik terhadap Murji'ah 71

Bab 6 Mu'tazilah 75

A. Sejarah berdiri 75

B. Wasil bin Atha 78

C. Lima prinsip dasar Mu'tazilah 80

D. Konsep keadilan Tuhan 81

E. Kebebasan manusia 85

F. Al-Qur'an makhluk atau qadim 88

G. Masa kejayaan Mu'tazilah 90

Bab 7 Asy'ariyah 92

A. Biografi Abu Hasan al-Asy'ari 92

B. Reaksi terhadap Mu'tazilah 96

C. Konsep sifat-sifat Allah 99

D. Teori kasb 101

E. Iman dan amal	103
F. Pengaruh Asy'ariyah di dunia Islam	104

Bab 8 Maturidiyah	108
A. Abu Mansur al-Maturidi	108
B. Persamaan dan perbedaan dengan Asy'ariyah	111
C. Peran akal	114
D. Konsep takdir	116
E. Penyebaran Maturidiyah	118

Bab 9 Syiah	122
A. Sejarah lahirnya Syiah	122
B. Konsep imamah	125
C. Pembagian Syiah	127
D. Syiah Itsna Asyariyah	131
E. Syiah Zaidiyah	134
F. Pandangan teologi Syiah	138

BAGIAN III

POKOK-POKOK PEMBAHASAN ILMU KALAM

Bab 10 Ketuhanan dalam Ilmu Kalam	142
A. Tauhid rububiyah	143
B. Tauhid uluhiyah	148
C. Tauhid asma wa sifat	150
D. Dalil keberadaan Allah	152
E. Sifat wajib dan mustahil bagi Allah	154

Bab 11 Takdir dan Kebebasan Manusia	158
A. Qada dan qadar	158
B. Jabariyah dan Qadariyah	162

C. Kebebasan kehendak manusia	166
D. Hubungan usaha dan takdir	169
 Bab 12 Konsep Iman dan Kufur	 174
A. Pengertian iman	174
B. Apakah iman bertambah dan berkurang	177
C. Dosa besar dalam Islam	179
D. Batas kekufuran	180
E. Takfir dalam sejarah Islam	185
 Bab 13 Kenabian dan Wahyu	 190
A. Pengertian nabi dan rasul	192
B. Mukjizat	195
C. Wahyu menurut ulama kalam	298
D. Sifat-sifat rasul	201
E. Penutup kenabian	203
 Bab 14 Hari Akhir dan Alam Gaib	 207
A. Kiamat	209
B. Surga dan neraka	212
C. Hisab dan mizan	214
D. Syafaat	217
E. Alam barzakh	219
 BAGIAN IV ILMU KALAM KONTEMPORER	 223
Bab 15 Ilmu Kalam Modern	224
A. Tantangan modernitas	224
B. Sekularisme	227
C. Atheisme modern	229
D. Sains dan agama	230
E. Dialog antaragama	231

Bab 16 Relevansi Ilmu Kalam Masa Kini	233
A. Ilmu Kalam di perguruan tinggi	233
B. Aqidah di era digital	236
C. Media sosial dan pemikiran Islam	238
D. Moderasi beragama	241
E. Masa depan Ilmu Kalam	243
BAGIAN PENUTUP	248
Kesimpulan	248
A. Ringkasan isi buku	248
B. Pentingnya memahami perbedaan pemikiran	251
C. Persatuan umat dalam perbedaan aqidah	255
DAFTAR PUSTAKA	260



BAGIAN I

DASAR-DASAR ILMU KALAM



BAB I

PENGERTIAN ILMU KALAM

A. Definisi Ilmu Kalam

Istilah *Ilmu Kalam* merupakan salah satu terminologi paling penting dalam khazanah intelektual Islam klasik karena disiplin ini tidak hanya berbicara mengenai persoalan keyakinan keagamaan secara normatif, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen rasional untuk mempertahankan, menjelaskan, dan mengembangkan bangunan teologi Islam dalam menghadapi dinamika sosial, politik, filsafat, serta perubahan peradaban manusia dari masa ke masa. Dalam tradisi keilmuan Islam, Ilmu Kalam berkembang sebagai cabang ilmu yang menempatkan akal dan wahyu dalam hubungan dialogis, sehingga ajaran-ajaran pokok agama tidak hanya diterima secara dogmatis, tetapi juga dapat dipahami melalui argumentasi rasional yang sistematis, kritis, dan metodologis. Oleh karena itu, Ilmu Kalam tidak dapat dipahami sekadar sebagai ilmu tentang ketuhanan, melainkan sebagai disiplin intelektual yang berusaha menjawab berbagai problem metafisis, epistemologis, dan teologis yang muncul dalam kehidupan umat Islam.

Secara etimologis, kata *kalam* berasal dari bahasa Arab *kalama–yaklimu–kalāman* yang berarti “berbicara”, “perkataan”,

atau “diskursus”. Akan tetapi, dalam perkembangan terminologinya, istilah tersebut mengalami perluasan makna sehingga menunjuk pada suatu bentuk pembahasan ilmiah mengenai persoalan akidah dengan menggunakan argumentasi logis dan debat intelektual. Para ulama klasik memberikan definisi yang beragam sesuai dengan pendekatan metodologis dan orientasi pemikiran masing-masing. Ibnu Khaldun misalnya mendefinisikan Ilmu Kalam sebagai ilmu yang berisi argumentasi rasional untuk mempertahankan akidah Islam serta menolak berbagai bentuk penyimpangan keyakinan. Definisi ini menunjukkan bahwa Ilmu Kalam memiliki dimensi apologetik yang kuat, yakni menjaga kemurnian aqidah dari serangan pemikiran luar maupun dari perpecahan internal umat Islam sendiri.

Sementara itu, Al-Ghazali memandang Ilmu Kalam sebagai disiplin yang bertugas melindungi akidah Ahlussunnah melalui dalil-dalil rasional dan argumentasi logis yang mampu menjawab keraguan serta serangan pemikiran filsafat ekstrem. Perspektif ini memperlihatkan bahwa Ilmu Kalam lahir bukan dalam ruang kosong, melainkan sebagai respons terhadap berkembangnya perdebatan ideologis di tengah masyarakat Islam yang mulai bersentuhan dengan filsafat Yunani, tradisi pemikiran Persia, serta warisan intelektual agama-agama lain.

Dalam konteks akademik modern, Ilmu Kalam dapat dipahami sebagai disiplin teologi Islam yang mengkaji eksistensi Tuhan, sifat-sifat ketuhanan, hubungan antara kehendak Tuhan dan kebebasan manusia, konsep wahyu, kenabian, hari akhir, serta

berbagai persoalan metafisis lainnya melalui pendekatan rasional dan tekstual secara terpadu. Definisi modern ini memperluas cakupan Ilmu Kalam sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat defensif terhadap penyimpangan aqidah, tetapi juga sebagai sarana refleksi kritis terhadap tantangan zaman modern seperti sekularisme, ateisme, pluralisme agama, materialisme, hingga perkembangan sains kontemporer.

ilmu Kalam pada hakikatnya merupakan disiplin ilmu yang menempati posisi strategis dalam peradaban Islam karena berperan menjaga keseimbangan antara iman dan rasio. Keberadaan ilmu ini memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya mendorong kepatuhan spiritual, tetapi juga mengembangkan tradisi intelektual yang menghargai argumentasi logis dan dialog pemikiran. Dalam konteks tersebut, Ilmu Kalam menjadi bukti bahwa tradisi Islam memiliki fondasi epistemologis yang memungkinkan ajaran agama dipahami secara mendalam tanpa harus melepaskan dimensi rasionalitas manusia.

Perkembangan kajian teologi kontemporer juga menunjukkan bahwa Ilmu Kalam mengalami transformasi metodologis yang cukup signifikan. Jika pada masa klasik pembahasannya lebih banyak difokuskan pada polemik internal antarkelompok teologi Islam, maka pada era modern orientasinya mulai bergeser menuju dialog antara agama dan modernitas. Hal ini dapat dilihat dari munculnya gagasan *new kalam* atau teologi Islam kontemporer yang mencoba menjawab isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, bioetika, dan perkembangan kecerdasan buatan dalam perspektif aqidah Islam. Menurut kajian terbaru dalam

jurnal *Islamic Theology and Philosophy* tahun 2024, transformasi tersebut menunjukkan bahwa Ilmu Kalam tetap relevan sebagai instrumen intelektual dalam menghadapi perubahan sosial global yang semakin kompleks.

B. Asal-Usul Istilah “Kalam”

Asal-usul penggunaan istilah “kalam” dalam tradisi intelektual Islam merupakan salah satu tema yang banyak diperdebatkan oleh para sejarawan pemikiran Islam karena istilah tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui proses sejarah panjang yang berkaitan erat dengan dinamika politik, sosial, dan intelektual umat Islam pada masa awal. Sebagian ulama berpendapat bahwa istilah “kalam” digunakan karena metode utama dalam disiplin ini adalah dialog, argumentasi, dan perdebatan yang dilakukan melalui pertukaran kata-kata atau *kalam*. Dengan kata lain, nama tersebut merujuk pada karakter metodologisnya yang sangat menekankan kemampuan argumentatif dalam membela keyakinan agama.

Pendapat lain menyatakan bahwa istilah “kalam” berkaitan dengan perdebatan besar mengenai status Al-Qur’an sebagai *kalam Allah*. Persoalan apakah Al-Qur’an bersifat qadim atau makhluk menjadi salah satu isu teologis paling kontroversial dalam sejarah Islam klasik, terutama pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah ketika Mu’tazilah memperoleh dukungan politik negara. Perdebatan tersebut tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki implikasi politik yang sangat besar karena menyangkut

legitimasi kekuasaan dan otoritas keagamaan. Dari sinilah istilah “Ilmu Kalam” kemudian semakin populer untuk menunjuk disiplin yang membahas persoalan-persoalan teologi secara rasional.

Dalam perspektif historis, kemunculan istilah “kalam” juga tidak dapat dilepaskan dari tradisi dialektika Yunani yang mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa Abbasiyah. Interaksi umat Islam dengan filsafat Yunani menyebabkan berkembangnya metode argumentasi logis dalam pembahasan teologi. Oleh sebab itu, sebagian orientalis seperti Harry Austryn Wolfson berpendapat bahwa Ilmu Kalam memiliki kemiripan dengan tradisi *dialectical theology* dalam filsafat Yunani. Namun demikian, banyak sarjana Muslim modern menolak pandangan tersebut secara mutlak karena Ilmu Kalam tetap berakar kuat pada Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam.

Istilah “kalam” juga menunjukkan adanya transformasi tradisi intelektual Islam dari pola transmisi tekstual menuju pola argumentatif. Pada masa awal Islam, persoalan aqidah lebih banyak diterima secara sederhana berdasarkan keimanan langsung kepada wahyu. Akan tetapi, ketika masyarakat Islam berkembang menjadi peradaban besar yang berinteraksi dengan berbagai tradisi pemikiran dunia, muncul kebutuhan untuk menjelaskan keyakinan agama melalui pendekatan rasional agar dapat dipahami oleh masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan filsafat berbeda. Dalam konteks inilah Ilmu Kalam lahir sebagai kebutuhan historis sekaligus intelektual.

Menarik untuk dicermati bahwa istilah “kalam” dalam tradisi Islam tidak selalu dipahami secara positif. Sebagian ulama hadis klasik memandang perdebatan kalam sebagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan spekulasi berlebihan terhadap persoalan agama. Ahmad bin Hanbal misalnya dikenal cukup kritis terhadap praktik debat teologis yang dianggap dapat menjauhkan umat dari kesederhanaan iman generasi awal Islam. Akan tetapi, perkembangan sejarah menunjukkan bahwa Ilmu Kalam tetap bertahan dan bahkan menjadi salah satu disiplin utama dalam tradisi intelektual Islam karena kemampuannya menjawab tantangan pemikiran secara argumentatif.

Pada era modern, istilah “kalam” mengalami revitalisasi makna. Para pemikir Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Muhammad Arkoun mencoba mengembangkan pendekatan teologi baru yang lebih kontekstual dengan realitas modern. Mereka menilai bahwa Ilmu Kalam tidak boleh berhenti pada polemik klasik semata, tetapi harus mampu menjawab persoalan kemanusiaan universal yang terus berkembang. Dengan demikian, istilah “kalam” tidak hanya menunjuk pada tradisi debat teologis masa lalu, tetapi juga menjadi simbol dinamika intelektual Islam yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman.

C. Tujuan Ilmu Kalam

Tujuan utama Ilmu Kalam pada dasarnya adalah membangun pemahaman aqidah yang kokoh melalui perpaduan antara keyakinan normatif dan argumentasi rasional sehingga keimanan seseorang tidak berhenti pada aspek doktrinal semata, tetapi juga

memiliki dasar intelektual yang mampu menghadapi keraguan, kritik, serta perubahan pemikiran manusia sepanjang sejarah. Dalam kerangka tersebut, Ilmu Kalam berfungsi bukan hanya sebagai sarana pembelaan terhadap keyakinan agama, tetapi juga sebagai media refleksi filosofis mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, alam semesta, dan eksistensi kehidupan secara keseluruhan.

Salah satu tujuan paling mendasar dari Ilmu Kalam adalah menjaga kemurnian aqidah Islam dari berbagai bentuk penyimpangan pemikiran. Sejarah Islam menunjukkan bahwa sejak masa awal telah muncul berbagai kelompok yang memiliki pandangan teologis berbeda mengenai persoalan dosa besar, takdir, sifat Tuhan, dan kepemimpinan politik umat Islam. Perbedaan tersebut sering kali berkembang menjadi konflik ideologis yang dapat mengancam persatuan umat. Oleh sebab itu, Ilmu Kalam hadir untuk memberikan penjelasan sistematis mengenai ajaran aqidah yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Selain fungsi defensif, Ilmu Kalam juga memiliki tujuan edukatif dan konstruktif. Disiplin ini berusaha membantu umat Islam memahami ajaran agama secara rasional sehingga keyakinan tidak dibangun di atas sikap taklid buta. Dalam konteks ini, Ilmu Kalam mendorong penggunaan akal sebagai instrumen untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Tuhan di alam semesta. Pendekatan tersebut sejalan dengan banyak ayat Al-Qur'an yang mengajak manusia berpikir, merenung, dan menggunakan nalar dalam memahami realitas kehidupan.

Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah membangun dialog antara agama dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah peradaban Islam, Ilmu Kalam memainkan peran penting dalam membentuk tradisi intelektual yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan sekaligus kritis terhadap dampak filosofisnya. Pada era modern, fungsi ini menjadi semakin relevan karena perkembangan sains dan teknologi sering kali memunculkan pertanyaan baru mengenai eksistensi Tuhan, hakikat manusia, serta masa depan peradaban.

Menurut penelitian terbaru dalam *Journal of Islamic Thought and Civilization* tahun 2025, revitalisasi Ilmu Kalam kontemporer diarahkan pada pengembangan teologi yang responsif terhadap krisis global seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan krisis moral masyarakat modern. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan Ilmu Kalam tidak lagi terbatas pada pembahasan metafisis klasik, tetapi juga mencakup upaya membangun etika sosial berbasis aqidah Islam.

D. Perbedaan Ilmu Kalam, Filsafat, dan Tasawuf

Ilmu Kalam, filsafat, dan tasawuf merupakan tiga tradisi intelektual besar dalam Islam yang sama-sama membahas persoalan ketuhanan dan eksistensi manusia, tetapi memiliki pendekatan metodologis, orientasi epistemologis, dan tujuan spiritual yang berbeda secara mendasar. Ketiga disiplin tersebut sering kali saling berinteraksi, bahkan terkadang mengalami ketegangan intelektual, namun secara historis semuanya berkontribusi besar dalam membentuk peradaban Islam.

Ilmu Kalam berfokus pada pembelaan aqidah berdasarkan dalil wahyu dan argumentasi rasional. Disiplin ini menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai fondasi utama, sedangkan akal digunakan untuk menjelaskan dan memperkuat ajaran agama. Dengan demikian, fungsi utama Ilmu Kalam bersifat teologis dan apologetik.

Berbeda dengan Ilmu Kalam, filsafat Islam lebih menekankan penggunaan rasio secara independen dalam mencari kebenaran. Para filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd mengembangkan sistem pemikiran yang banyak dipengaruhi filsafat Yunani, khususnya pemikiran Aristoteles dan Plato. Dalam filsafat, kebenaran dicapai melalui proses spekulasi rasional yang sistematis, sementara wahyu sering kali dipahami dalam kerangka simbolik atau metaforis.

Adapun tasawuf lebih menekankan dimensi spiritual dan pengalaman batin dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika Ilmu Kalam bertumpu pada argumentasi rasional dan filsafat pada spekulasi intelektual, maka tasawuf menempatkan pengalaman mistik sebagai jalan utama memperoleh pengetahuan spiritual. Tokoh-tokoh seperti Jalaluddin Rumi dan Ibnu Arabi menekankan pentingnya penyucian jiwa sebagai sarana mencapai makrifat kepada Allah.

Meskipun memiliki perbedaan, ketiga disiplin tersebut sebenarnya saling melengkapi. Ilmu Kalam menjaga fondasi aqidah, filsafat memperluas horizon intelektual, sedangkan tasawuf memperdalam dimensi spiritual manusia. Dalam perkembangan pemikiran Islam modern, muncul upaya integratif untuk

mempertemukan ketiganya agar terbentuk paradigma keilmuan Islam yang holistik dan seimbang.

E. Objek Kajian Ilmu Kalam

Objek utama kajian Ilmu Kalam adalah seluruh persoalan yang berkaitan dengan aqidah dan keyakinan dasar dalam Islam, terutama menyangkut hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarahnya, cakupan pembahasan Ilmu Kalam menjadi semakin luas sehingga mencakup persoalan metafisika, epistemologi, etika, hingga problem sosial kontemporer yang berkaitan dengan dimensi teologis kehidupan manusia.

Kajian mengenai eksistensi dan sifat-sifat Tuhan merupakan tema sentral dalam Ilmu Kalam. Para mutakallimun membahas berbagai persoalan seperti keesaan Tuhan, kekuasaan ilahi, keadilan Tuhan, kehendak bebas manusia, serta hubungan antara sifat Tuhan dan zat-Nya. Pembahasan ini berkembang menjadi diskursus yang sangat kompleks karena melibatkan perdebatan rasional dan interpretasi tekstual yang mendalam.

Selain persoalan ketuhanan, Ilmu Kalam juga mengkaji konsep kenabian dan wahyu. Tema ini meliputi hakikat wahyu, fungsi para nabi, mukjizat, serta hubungan antara akal dan wahyu dalam kehidupan manusia. Pembahasan tersebut menjadi penting karena berkaitan langsung dengan legitimasi otoritas agama dalam Islam.

Objek kajian lain yang sangat penting adalah persoalan eskatologi atau kehidupan setelah mati. Dalam konteks ini, Ilmu

Kalam membahas konsep kiamat, surga, neraka, hisab, serta keadilan Tuhan di akhirat. Pembahasan eskatologis tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga berfungsi membangun kesadaran moral dan etika sosial dalam kehidupan manusia.

Pada era kontemporer, objek kajian Ilmu Kalam mengalami perluasan yang signifikan. Para teolog Muslim modern mulai membahas isu-isu seperti pluralisme agama, hak asasi manusia, lingkungan hidup, bioetika, dan perkembangan teknologi digital dalam perspektif aqidah Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Ilmu Kalam bukan disiplin yang statis, melainkan ilmu yang terus berkembang mengikuti perubahan realitas sosial dan intelektual umat manusia.



BAB II

SEJARAH MUNCULNYA ILMU KALAM

A. Kondisi Umat Islam Pasca Wafat Nabi

Wafatnya Nabi Muhammad saw. pada tahun 11 H/632 M merupakan peristiwa historis yang tidak hanya menimbulkan kesedihan mendalam bagi umat Islam, melainkan juga menghadirkan sebuah fase transisional yang sangat menentukan dalam pembentukan struktur sosial, politik, dan intelektual peradaban Islam. Selama masa kerasulan, seluruh persoalan umat, baik yang berkaitan dengan aspek hukum, moral, sosial, maupun keyakinan, selalu memperoleh legitimasi langsung dari Nabi sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam komunitas Muslim. Dengan demikian, keberadaan Nabi tidak hanya dipahami sebagai pembawa wahyu, tetapi juga sebagai simbol kesatuan politik, sumber interpretasi agama, sekaligus mediator konflik sosial. Ketika figur sentral tersebut wafat, umat Islam menghadapi kenyataan baru berupa kekosongan kepemimpinan yang memunculkan beragam ketegangan di tengah masyarakat Muslim yang sedang berkembang secara cepat.

Dalam konteks sosial-politik, masyarakat Islam pasca wafat Nabi berada pada situasi yang kompleks. Di satu sisi, Islam telah

berhasil membangun solidaritas baru yang melampaui ikatan kesukuan Arab yang sebelumnya sangat dominan. Akan tetapi, di sisi lain, sisa-sisa fanatisme kesukuan ('ashabiyyah) masih tetap hidup di tengah masyarakat Arab. Fenomena ini terlihat jelas ketika kelompok Anshar dan Muhajirin terlibat dalam perdebatan mengenai siapa yang paling berhak memimpin umat setelah Nabi. Peristiwa Saqifah Bani Sa'idah menjadi momentum awal yang memperlihatkan bahwa persoalan kepemimpinan bukan sekadar masalah administratif, melainkan persoalan yang menyentuh dimensi legitimasi religius dan sosial. Dalam forum tersebut, kelompok Anshar mengusulkan kepemimpinan dari kalangan mereka karena jasa besar yang telah diberikan kepada Islam, sedangkan kaum Muhajirin berpendapat bahwa suku Quraisy lebih layak memegang kekuasaan karena kedudukan sosial dan kedekatan mereka dengan Nabi.

Pemilihan Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama pada akhirnya berhasil meredam potensi konflik yang lebih besar. Namun demikian, proses tersebut sekaligus menjadi titik awal munculnya perdebatan politik dalam Islam. Menurut Harun Nasution, persoalan politik pada masa awal Islam lambat laun berkembang menjadi persoalan teologis karena setiap kelompok berusaha memberikan legitimasi keagamaan terhadap sikap politiknya. Dengan kata lain, pertentangan politik tidak lagi berdiri sebagai konflik kekuasaan semata, tetapi telah berubah menjadi perdebatan mengenai siapa yang dianggap paling benar menurut agama.

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam adalah munculnya gerakan riddah atau kemurtadan. Sebagian kabilah Arab menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi karena menganggap kewajiban tersebut hanya berlaku selama Nabi masih hidup. Selain itu, muncul pula tokoh-tokoh yang mengaku sebagai nabi, seperti Musailamah al-Kadzdzab, Tulaihah al-Asadi, dan Sajah. Abu Bakar mengambil langkah tegas dengan memerangi kelompok-kelompok tersebut demi menjaga integritas politik dan keagamaan umat Islam. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sejak awal, stabilitas aqidah dan stabilitas politik dipahami sebagai dua aspek yang saling berkaitan.

Pada masa Umar ibn al-Khattab, ekspansi wilayah Islam berlangsung secara sangat cepat. Wilayah kekuasaan Islam meluas hingga Persia, Syam, Mesir, dan sebagian kawasan Bizantium. Perluasan wilayah ini membawa dampak besar terhadap perkembangan intelektual Islam karena umat Islam mulai berinteraksi dengan berbagai tradisi budaya dan pemikiran asing. Masyarakat Muslim tidak lagi terdiri atas komunitas Arab homogen, tetapi berubah menjadi masyarakat multikultural yang melibatkan bangsa Persia, Romawi, Mesir, dan berbagai kelompok etnis lainnya. Dalam situasi seperti ini, persoalan-persoalan baru yang sebelumnya tidak pernah muncul pada masa Nabi mulai diperdebatkan.

Masuknya masyarakat non-Arab ke dalam Islam juga memengaruhi dinamika pemikiran keagamaan. Sebagian dari mereka membawa warisan filsafat, tradisi keagamaan, dan pola berpikir rasional yang kemudian berinteraksi dengan ajaran Islam.

Menurut Montgomery Watt, perkembangan awal teologi Islam tidak dapat dilepaskan dari proses pertemuan antara tradisi Islam dengan budaya intelektual di luar Arab. Pertemuan tersebut menciptakan kebutuhan baru untuk merumuskan konsep-konsep aqidah secara lebih sistematis dan argumentatif.

Kondisi umat Islam semakin kompleks pada masa Utsman ibn Affan. Kebijakan administratif yang diterapkan Utsman sering kali dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan kepada keluarga Bani Umayyah. Pengangkatan kerabat dekat dalam posisi strategis memunculkan kritik dari sebagian sahabat dan masyarakat. Ketidakpuasan tersebut berkembang menjadi gerakan oposisi politik yang akhirnya berujung pada terbunuhnya Utsman pada tahun 35 H/656 M. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam karena untuk pertama kalinya seorang khalifah dibunuh oleh kelompok Muslim sendiri.

Pembunuhan Utsman tidak hanya melahirkan krisis politik, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai status keimanan seorang Muslim yang melakukan dosa besar. Persoalan ini nantinya berkembang menjadi salah satu tema utama dalam ilmu kalam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kemunculan ilmu kalam tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari dinamika sosial-politik dan intelektual yang berkembang secara bertahap sejak wafatnya Nabi Muhammad saw.

Selain faktor politik, kondisi psikologis umat Islam pasca wafat Nabi juga turut memengaruhi perkembangan pemikiran teologis. Kehilangan figur Nabi menyebabkan umat Islam harus mulai menggunakan ijtihad secara lebih luas dalam menyelesaikan

persoalan-persoalan baru. Jika sebelumnya wahyu menjadi sumber jawaban langsung terhadap berbagai persoalan, maka setelah wafat Nabi, umat Islam harus mengembangkan metode penalaran untuk memahami teks-teks agama. Situasi ini menjadi fondasi awal lahirnya tradisi intelektual dalam Islam, termasuk ilmu kalam.

Dalam perspektif sejarah pemikiran Islam, periode pasca wafat Nabi dapat dipahami sebagai fase transformasi dari komunitas religius sederhana menuju masyarakat politik dan intelektual yang kompleks. Kompleksitas tersebut melahirkan kebutuhan akan formulasi aqidah yang lebih sistematis untuk menjaga stabilitas keyakinan umat di tengah konflik sosial dan perubahan budaya yang sangat cepat.

B. Konflik Politik dan Pengaruh terhadap Aqidah

Konflik politik dalam sejarah awal Islam memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan doktrin aqidah dan perkembangan ilmu kalam. Pada mulanya, pertikaian yang terjadi di tengah umat Islam lebih banyak berkaitan dengan persoalan kepemimpinan dan distribusi kekuasaan. Akan tetapi, seiring berkembangnya konflik tersebut, masing-masing kelompok mulai menggunakan argumentasi teologis untuk membenarkan posisi politik mereka. Akibatnya, batas antara persoalan politik dan persoalan aqidah menjadi semakin kabur.

Perpecahan politik pertama dalam Islam muncul setelah wafat Nabi Muhammad saw. ketika umat Islam berbeda pendapat mengenai mekanisme pemilihan pemimpin. Sebagian kelompok meyakini bahwa kepemimpinan harus dipilih melalui

musyawarah, sedangkan kelompok lain beranggapan bahwa kepemimpinan seharusnya diberikan kepada keluarga Nabi. Perbedaan pandangan ini menjadi cikal bakal munculnya kelompok Sunni dan Syiah.

Kelompok Syiah berpendapat bahwa Ali ibn Abi Thalib merupakan sosok yang paling berhak menjadi khalifah karena memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Nabi sekaligus memiliki kualitas keilmuan dan spiritual yang tinggi. Dalam perkembangan selanjutnya, keyakinan politik tersebut berubah menjadi doktrin teologis mengenai imamah. Dalam pandangan Syiah, imam bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga pemegang otoritas spiritual yang memperoleh legitimasi ilahiah. Oleh karena itu, kepemimpinan imam dianggap sebagai bagian integral dari aqidah.

Sebaliknya, mayoritas umat Islam yang kemudian dikenal sebagai Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah menekankan pentingnya konsensus umat (ijma') dan musyawarah dalam menentukan pemimpin. Bagi kelompok ini, kepemimpinan merupakan persoalan politik yang tidak termasuk dalam rukun iman. Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa konflik politik secara langsung memengaruhi konstruksi teologis masing-masing kelompok.

Konflik politik semakin memanas setelah terbunuhnya Khalifah Utsman ibn Affan. Ketika Ali ibn Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, sebagian pihak menuntut agar pembunuh Utsman segera dihukum. Tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi oleh Ali karena kondisi politik yang belum stabil. Situasi ini

memicu munculnya oposisi yang dipimpin oleh Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman.

Ketegangan politik tersebut akhirnya berkembang menjadi perang saudara yang dikenal sebagai Perang Shiffin. Dalam konflik ini, masing-masing pihak tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan legitimasi agama untuk memperkuat posisi mereka. Ali dianggap mewakili kelompok yang sah karena dipilih sebagai khalifah, sedangkan Mu'awiyah mengklaim dirinya memperjuangkan keadilan atas kematian Utsman.

Dampak paling signifikan dari konflik politik tersebut adalah lahirnya kelompok Khawarij. Kelompok ini awalnya merupakan pendukung Ali, tetapi kemudian memisahkan diri setelah peristiwa tahkim. Mereka berpendapat bahwa menerima arbitrase manusia dalam persoalan yang menurut mereka telah diputuskan oleh Allah merupakan bentuk kekafiran. Dari sinilah muncul doktrin teologis bahwa pelaku dosa besar dianggap keluar dari Islam.

Pandangan Khawarij memiliki konsekuensi teologis yang sangat radikal. Mereka tidak hanya mengkafirkan lawan politik, tetapi juga meyakini bahwa iman harus diwujudkan secara total dalam tindakan. Seseorang yang melakukan dosa besar dipandang telah kehilangan imannya dan halal diperangi. Doktrin ini menunjukkan bagaimana konflik politik mampu melahirkan konsepsi aqidah yang keras dan eksklusif.

Sebagai respons terhadap ekstremisme Khawarij, muncul kelompok Murji'ah yang mengambil posisi moderat. Kelompok ini berpendapat bahwa penilaian terhadap pelaku dosa besar harus

diserahkan kepada Allah pada hari kiamat. Menurut Murji'ah, iman cukup berada dalam hati dan pengakuan lisan, sedangkan amal tidak menentukan status keimanan seseorang. Pandangan ini muncul sebagai upaya untuk meredakan konflik politik dan menghindari praktik saling mengkafirkan.

Konflik politik juga melahirkan perdebatan mengenai konsep takdir dan kebebasan manusia. Sebagian kelompok menggunakan doktrin takdir untuk membenarkan kekuasaan politik yang sedang berlangsung. Dinasti Umayyah, misalnya, sering dikaitkan dengan pandangan Jabariyah yang menekankan bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, termasuk kekuasaan politik. Dengan demikian, penentangan terhadap penguasa dianggap sebagai penentangan terhadap kehendak Tuhan.

Sebaliknya, kelompok Qadariyah menolak fatalisme tersebut dan menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan tindakannya. Menurut mereka, manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri sehingga penguasa yang zalim tetap dapat dikritik. Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu politik tidak hanya memengaruhi persoalan kepemimpinan, tetapi juga melahirkan diskursus filosofis mengenai hubungan antara kehendak Tuhan dan kebebasan manusia.

Dalam kajian sejarah intelektual Islam, konflik politik awal tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan identitas teologis umat Islam. Setiap kelompok berusaha membangun sistem keyakinan yang mampu mendukung posisi politiknya. Oleh sebab itu, ilmu kalam pada fase awal berkembang bukan sekadar sebagai

disiplin akademik, tetapi juga sebagai instrumen ideologis dalam mempertahankan legitimasi sosial dan politik.

C. Munculnya Perdebatan Teologis

Munculnya perdebatan teologis dalam Islam merupakan konsekuensi logis dari perubahan sosial, politik, dan intelektual yang terjadi dalam masyarakat Muslim sejak abad pertama Hijriah. Ketika Islam berkembang dari komunitas kecil di Jazirah Arab menjadi peradaban besar yang meliputi berbagai bangsa dan budaya, umat Islam menghadapi tantangan baru yang menuntut penjelasan aqidah secara lebih rasional dan sistematis. Dalam konteks inilah ilmu kalam mulai berkembang sebagai disiplin yang membahas persoalan-persoalan ketuhanan, kenabian, manusia, dan hubungan antara wahyu dengan akal.

Pada tahap awal, perdebatan teologis berpusat pada persoalan status pelaku dosa besar. Persoalan ini muncul sebagai dampak dari konflik politik yang melibatkan sesama Muslim. Kelompok Khawarij berpendapat bahwa seorang Muslim yang melakukan dosa besar telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman literal terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengancam pelaku dosa dengan hukuman berat.

Sebaliknya, Murji'ah menolak pandangan ekstrem tersebut. Mereka berpendapat bahwa iman tidak hilang hanya karena seseorang melakukan dosa besar. Penilaian akhir terhadap seorang Muslim diserahkan kepada Allah pada hari kiamat. Dengan demikian, Murji'ah mencoba memisahkan persoalan iman dari konflik politik yang sedang berlangsung.

Perdebatan mengenai dosa besar kemudian berkembang menjadi diskusi yang lebih luas tentang hakikat iman. Sebagian kelompok memahami iman sebagai keyakinan yang harus dibuktikan dengan amal, sedangkan kelompok lain menekankan dimensi batiniah iman. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa persoalan aqidah tidak lagi dipahami secara sederhana, tetapi telah menjadi medan interpretasi yang sangat kompleks.

Selain persoalan iman, perdebatan teologis juga muncul dalam isu kebebasan manusia dan takdir Tuhan. Kelompok Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan sejati karena seluruh tindakan manusia telah ditentukan oleh Allah. Menurut mereka, manusia hanyalah pelaksana dari kehendak Tuhan. Pandangan ini cenderung melahirkan sikap fatalistik.

Sebaliknya, Qadariyah menekankan kebebasan manusia dalam bertindak. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih perbuatannya sendiri dan karena itu harus bertanggung jawab atas segala tindakannya. Pandangan ini muncul sebagai reaksi terhadap penggunaan doktrin takdir untuk melegitimasi kekuasaan politik yang otoriter.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul kelompok Mu'tazilah yang membawa pendekatan rasional dalam memahami aqidah Islam. Kelompok ini menempatkan akal sebagai instrumen penting dalam memahami wahyu. Menurut Mu'tazilah, keadilan Tuhan menuntut adanya kebebasan manusia, sebab tidak mungkin Allah menghukum manusia atas perbuatan yang dipaksakan kepada mereka.

Mu'tazilah juga mengembangkan konsep al-manzilah bayna al-manzilatayn, yaitu posisi di antara dua posisi. Menurut mereka, pelaku dosa besar tidak dapat disebut mukmin secara sempurna, tetapi juga tidak dapat disebut kafir. Konsep ini merupakan upaya kompromi antara pandangan Khawarij dan Murji'ah.

Pendekatan rasional Mu'tazilah mendorong perkembangan ilmu kalam secara lebih sistematis. Mereka menggunakan logika dan filsafat dalam menjelaskan persoalan aqidah. Dalam konteks ini, ilmu kalam mulai berkembang sebagai disiplin intelektual yang memiliki metode argumentasi tersendiri.

Sebagai respons terhadap dominasi Mu'tazilah, muncul tokoh-tokoh Ahl al-Sunnah seperti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kedua tokoh ini berusaha mempertahankan aqidah Sunni dengan tetap menggunakan pendekatan rasional secara terbatas. Mereka menolak ekstremitas rasionalisme Mu'tazilah, tetapi juga tidak menerima pendekatan literal yang terlalu kaku.

Al-Asy'ari menegaskan bahwa akal memiliki fungsi penting dalam memahami agama, tetapi tetap harus tunduk pada wahyu. Sementara itu, al-Maturidi memberikan ruang yang lebih luas bagi penggunaan akal dalam persoalan teologis. Kedua pendekatan ini kemudian menjadi fondasi utama teologi Sunni.

Perdebatan teologis dalam Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik intelektual, melainkan juga sebagai refleksi dari dinamika sosial dan politik umat Islam. Setiap aliran teologi lahir dalam konteks sejarah tertentu dan membawa respons terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat pada zamannya.

Dalam perspektif akademik modern, ilmu kalam dipandang sebagai bentuk dialektika intelektual umat Islam dalam mempertahankan keyakinan mereka di tengah perubahan zaman. Ilmu ini tidak hanya berfungsi sebagai pembela aqidah, tetapi juga sebagai medium dialog antara wahyu, akal, dan realitas sosial.

D. Perang Shiffin dan Tahkim

Perang Shiffin merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam awal karena dampaknya yang sangat besar terhadap perkembangan politik dan teologi Islam. Konflik ini terjadi pada tahun 37 H/657 M antara pasukan Khalifah Ali ibn Abi Thalib dan pasukan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan di wilayah Shiffin, dekat Sungai Eufrat.

Latar belakang utama perang ini adalah tuntutan Mu'awiyah agar pembunuh Khalifah Utsman segera dihukum. Sebagai gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman, Mu'awiyah menilai bahwa Ali tidak serius dalam menyelesaikan kasus tersebut. Di sisi lain, Ali menghadapi situasi politik yang sangat rumit karena para pemberontak yang terlibat dalam pembunuhan Utsman masih berada dalam kekuatan militernya.

Perang Shiffin berlangsung sengit dan menimbulkan banyak korban. Ketika pasukan Mu'awiyah berada dalam posisi terdesak, pihak Mu'awiyah mengangkat mushaf Al-Qur'an di ujung tombak sebagai simbol ajakan untuk kembali kepada hukum Allah. Sebagian pasukan Ali mendesak agar ajakan tersebut diterima demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar.

Ali pada awalnya menolak usulan arbitrase karena menganggap tindakan tersebut hanya strategi politik Mu'awiyah. Namun, tekanan dari sebagian pendukungnya membuat Ali akhirnya menerima tahkim atau arbitrase. Dalam proses tahkim, masing-masing pihak menunjuk wakil untuk melakukan perundingan. Ali menunjuk Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Mu'awiyah menunjuk Amr ibn al-'Ash.

Tahkim menjadi titik balik yang sangat menentukan dalam sejarah Islam. Sebagian pendukung Ali menilai bahwa menerima arbitrase manusia dalam persoalan yang menurut mereka telah diputuskan oleh Allah merupakan kesalahan besar. Mereka kemudian keluar dari barisan Ali dan dikenal sebagai Khawarij.

Kelompok Khawarij mengusung slogan “la hukma illa lillah” yang berarti “tidak ada hukum selain hukum Allah.” Mereka menolak tahkim karena menganggap keputusan hanya milik Allah, bukan manusia. Dalam pandangan mereka, Ali, Mu'awiyah, dan semua pihak yang menerima tahkim telah melakukan dosa besar bahkan dianggap kafir.

Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana konflik politik dapat berubah menjadi konflik teologis. Persoalan tahkim tidak lagi dipahami sebagai strategi penyelesaian konflik, tetapi telah berkembang menjadi perdebatan mengenai hakikat iman, dosa, dan legitimasi kekuasaan.

Dampak lain dari Perang Shiffin adalah melemahnya kekuasaan Ali secara politik. Perpecahan internal dalam pasukannya membuat posisinya semakin sulit. Pada akhirnya, Ali

terbunuh oleh seorang anggota Khawarij bernama Abdurrahman ibn Muljam pada tahun 40 H/661 M.

Kematian Ali menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan menjadi awal berdirinya Dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Mu'awiyah. Perubahan sistem pemerintahan dari model khilafah yang relatif egaliter menuju monarki dinasti turut memengaruhi perkembangan pemikiran politik dan teologi dalam Islam.

Dalam sejarah ilmu kalam, Perang Shiffin dan tahkim dianggap sebagai faktor utama lahirnya berbagai aliran teologi Islam. Dari peristiwa ini lahir Khawarij dengan doktrin takfir-nya, Murji'ah dengan sikap moderatnya, serta diskusi yang lebih luas mengenai legitimasi politik dan status keimanan.

Para sarjana modern seperti W. Montgomery Watt dan Majid Fakhry menilai bahwa konflik-konflik politik awal Islam telah menciptakan ruang bagi berkembangnya tradisi argumentasi teologis dalam Islam. Perdebatan mengenai tahkim menunjukkan bahwa umat Islam mulai berusaha memahami hubungan antara kehendak Tuhan, otoritas manusia, dan realitas politik.

Perang Shiffin bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga titik transformasi intelektual yang mendorong lahirnya pemikiran teologi Islam secara lebih sistematis.

E. Awal Lahirnya Kelompok-Kelompok Teologi

Lahirnya kelompok-kelompok teologi dalam Islam merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan konflik politik, perkembangan intelektual, dan interaksi budaya. Setelah

Perang Shiffin dan tahkim, umat Islam tidak lagi berada dalam satu kesatuan pemikiran yang homogen. Perbedaan pandangan mengenai kepemimpinan, iman, dosa, dan kebebasan manusia melahirkan berbagai aliran teologi yang memiliki karakteristik masing-masing.

Kelompok pertama yang muncul secara jelas adalah Khawarij. Kelompok ini dikenal karena sikapnya yang keras dan literal dalam memahami ajaran agama. Mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar adalah kafir dan halal diperangi. Khawarij menekankan pentingnya kesalehan moral dan menolak kompromi politik.

Dalam perkembangan sejarah, Khawarij terpecah menjadi beberapa subkelompok seperti Azariqah, Najdat, dan Ibadiyah. Di antara kelompok tersebut, Ibadiyah merupakan cabang yang paling moderat dan masih bertahan hingga saat ini di beberapa wilayah seperti Oman dan Afrika Utara.

Sebagai reaksi terhadap Khawarij, muncul kelompok Murji'ah yang mengambil pendekatan lebih toleran. Murji'ah berpendapat bahwa penilaian terhadap iman seseorang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Menurut mereka, pelaku dosa besar tetap dianggap Muslim selama masih memiliki iman.

Kelompok Murji'ah memberikan kontribusi penting dalam meredakan konflik sosial di tengah umat Islam. Mereka menolak praktik pengkafiran yang berkembang pada masa itu dan berusaha menjaga persatuan umat.

Di samping Khawarij dan Murji'ah, muncul pula Qadariyah dan Jabariyah yang memperdebatkan persoalan kebebasan manusia dan takdir Tuhan. Qadariyah menegaskan bahwa

manusia memiliki kehendak bebas, sedangkan Jabariyah berpendapat bahwa seluruh tindakan manusia telah ditentukan oleh Allah.

Perdebatan antara Qadariyah dan Jabariyah menjadi dasar berkembangnya diskusi filsafat dalam ilmu kalam. Persoalan hubungan antara kehendak Tuhan dan kebebasan manusia kemudian menjadi salah satu tema sentral dalam teologi Islam.

Pada abad kedua Hijriah, lahir kelompok Mu'tazilah yang dianggap sebagai aliran rasionalis dalam Islam. Tokoh utama kelompok ini adalah Wasil ibn 'Atha'. Mu'tazilah menekankan penggunaan akal dalam memahami ajaran agama dan mengembangkan lima prinsip utama, yaitu tauhid, keadilan Tuhan, janji dan ancaman, posisi di antara dua posisi, serta amar ma'ruf nahi munkar.

Mu'tazilah memainkan peran besar dalam perkembangan intelektual Islam, terutama pada masa Dinasti Abbasiyah. Pada masa Khalifah al-Ma'mun, ajaran Mu'tazilah bahkan dijadikan sebagai mazhab resmi negara. Namun, dominasi tersebut memunculkan reaksi dari kalangan ulama tradisional.

Sebagai respons terhadap Mu'tazilah, lahirlah teologi Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah yang dipelopori oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kedua tokoh ini berusaha menggabungkan antara penggunaan akal dan kesetiaan terhadap teks wahyu.

Al-Asy'ari pada awalnya merupakan pengikut Mu'tazilah sebelum akhirnya keluar dan membangun sistem teologi baru. Ia menggunakan metode rasional untuk membela aqidah Sunni.

Sementara itu, al-Maturidi mengembangkan pendekatan yang lebih moderat dalam penggunaan akal.

Lahirnya berbagai kelompok teologi tersebut menunjukkan bahwa ilmu kalam berkembang melalui proses dialog, perdebatan, dan kritik yang sangat dinamis. Setiap kelompok muncul sebagai respons terhadap persoalan sosial, politik, dan intelektual pada zamannya.

Dalam perspektif sejarah peradaban, keberagaman aliran teologi Islam mencerminkan tingginya dinamika intelektual umat Islam pada masa klasik. Perdebatan-perdebatan tersebut tidak hanya menghasilkan konflik, tetapi juga melahirkan tradisi argumentasi dan pemikiran kritis yang memperkaya khazanah keilmuan Islam.

Perkembangan kelompok-kelompok teologi juga memperlihatkan bahwa Islam memiliki tradisi intelektual yang terbuka terhadap diskusi rasional. Meskipun terjadi perbedaan pandangan yang tajam, seluruh kelompok tersebut pada dasarnya berupaya memahami ajaran Islam sesuai dengan kapasitas intelektual dan konteks sejarah mereka masing-masing.

Awal lahirnya kelompok-kelompok teologi dapat dipahami sebagai fase penting dalam pembentukan tradisi ilmu kalam. Dari proses tersebut lahir berbagai konsep dasar mengenai iman, takdir, kebebasan manusia, sifat Tuhan, dan hubungan antara akal dan wahyu yang terus menjadi bahan diskusi dalam pemikiran Islam hingga masa kontemporer.

Sejarah munculnya ilmu kalam tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, politik, dan intelektual yang berkembang dalam

masyarakat Islam pasca wafat Nabi Muhammad saw. Konflik politik mengenai kepemimpinan umat berkembang menjadi perdebatan teologis yang melahirkan berbagai aliran pemikiran dalam Islam. Peristiwa-peristiwa besar seperti pembunuhan Utsman ibn Affan, Perang Shiffin, dan tahkim menjadi faktor penting yang mendorong lahirnya diskusi mengenai iman, dosa besar, takdir, dan legitimasi kekuasaan.

Ilmu kalam pada awalnya muncul sebagai upaya untuk mempertahankan aqidah Islam dari berbagai tantangan internal dan eksternal. Dalam perkembangannya, ilmu ini menjadi disiplin intelektual yang menggunakan argumentasi rasional untuk menjelaskan persoalan-persoalan keagamaan.



BAB III

SUMBER DAN METODE ILMU KALAM

A. Al-Qur'an sebagai Sumber Utama

Dalam keseluruhan bangunan epistemologi Islam, Al-Qur'an menempati posisi paling fundamental sebagai sumber utama yang menjadi fondasi seluruh disiplin keilmuan keislaman, termasuk Ilmu Kalam. Keberadaan Al-Qur'an sebagai sumber primer Ilmu Kalam tidak hanya dipahami dalam arti normatif bahwa kitab suci tersebut merupakan wahyu Tuhan yang wajib diimani, melainkan juga dalam arti metodologis bahwa seluruh argumentasi teologis yang dibangun dalam tradisi kalam pada akhirnya harus memiliki legitimasi tekstual yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, meskipun Ilmu Kalam dikenal sebagai disiplin yang banyak menggunakan pendekatan rasional dan logika argumentatif, orientasi dasarnya tetap berpijak pada otoritas wahyu sebagai pusat kebenaran tertinggi.

Posisi sentral Al-Qur'an dalam Ilmu Kalam dapat dipahami dari karakter Al-Qur'an sendiri yang secara eksplisit mengandung banyak pembahasan mengenai persoalan ketuhanan, penciptaan alam, hakikat manusia, kenabian, kebebasan kehendak, hari kebangkitan, hingga persoalan etika dan tanggung jawab moral

manusia di hadapan Tuhan. Tema-tema tersebut bukan hanya disampaikan dalam bentuk perintah normatif, tetapi juga sering kali dikemukakan melalui pola argumentasi yang mengajak manusia berpikir secara rasional. Al-Qur'an berkali-kali menggunakan ungkapan seperti *afalā ta'qilūn* (apakah kalian tidak berpikir), *afalā tatafakkarūn* (apakah kalian tidak merenungkan), dan *li qawmin yatafakkarūn* (bagi kaum yang berpikir), yang menunjukkan bahwa penggunaan akal merupakan bagian integral dari proses memahami ajaran agama.

Dalam konteks tersebut, para mutakallimun memandang Al-Qur'an bukan sekadar kitab dogma, melainkan sumber argumentasi intelektual yang sangat kaya. Ayat-ayat mengenai penciptaan langit dan bumi misalnya, dipahami sebagai dasar teologis bagi pembuktian eksistensi Tuhan melalui pendekatan kosmologis. Ketika Al-Qur'an mengajak manusia memperhatikan keteraturan alam semesta, pergantian malam dan siang, atau penciptaan manusia dari setetes air, sesungguhnya Al-Qur'an sedang membangun kesadaran rasional bahwa realitas kosmos tidak mungkin hadir tanpa sebab pertama yang absolut. Oleh karena itu, banyak argumentasi klasik dalam Ilmu Kalam mengenai keberadaan Tuhan pada dasarnya merupakan elaborasi rasional terhadap isyarat-isyarat epistemologis yang telah terdapat dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an juga menjadi sumber utama dalam pembentukan konsep-konsep teologis dasar seperti tauhid, sifat-sifat Tuhan, konsep keadilan ilahi, dan hubungan antara kehendak Tuhan dengan kebebasan manusia. Dalam pembahasan mengenai tauhid

misalnya, para ulama kalam merujuk pada ayat-ayat yang menegaskan keesaan Tuhan sebagai landasan utama pembentukan teologi Islam. Akan tetapi, proses interpretasi terhadap ayat-ayat tersebut kemudian melahirkan berbagai pendekatan teologis yang berbeda. Mu'tazilah menafsirkan ayat-ayat ketuhanan dengan pendekatan yang sangat rasional demi menjaga prinsip transendensi Tuhan, sedangkan Asy'ariyah berusaha mempertahankan keseimbangan antara teks dan akal dalam memahami sifat-sifat ilahi.

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber utama Ilmu Kalam juga berkaitan dengan sifat universalitasnya yang memungkinkan teks wahyu terus ditafsirkan sesuai perkembangan zaman. Dalam konteks modern, para pemikir teologi Islam kontemporer memandang bahwa Al-Qur'an tidak hanya berbicara kepada masyarakat Arab abad ketujuh, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip universal yang relevan untuk menjawab problem modernitas seperti sekularisme, materialisme, krisis lingkungan, hingga perkembangan teknologi digital. Oleh sebab itu, revitalisasi Ilmu Kalam modern pada dasarnya merupakan upaya membaca kembali pesan-pesan teologis Al-Qur'an dalam konteks perubahan sosial global yang semakin kompleks.

Dalam kajian akademik mutakhir, pendekatan hermeneutika Al-Qur'an juga mulai digunakan dalam studi Ilmu Kalam kontemporer. Beberapa sarjana Muslim modern seperti Nasr Hamid Abu Zayd menekankan pentingnya memahami konteks historis dan linguistik Al-Qur'an agar pesan-pesan teologisnya dapat dipahami secara lebih dinamis. Pendekatan ini menunjukkan

bahwa hubungan antara Al-Qur'an dan Ilmu Kalam bersifat dialogis, bukan statis, sehingga pemikiran teologi Islam selalu terbuka terhadap proses reinterpretasi sepanjang tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar wahyu.

Penelitian terbaru dalam *Journal of Qur'anic Studies* tahun 2025 menunjukkan bahwa perkembangan studi teologi Islam modern semakin menekankan pendekatan interdisipliner dalam memahami Al-Qur'an, terutama melalui integrasi antara linguistik, filsafat, dan ilmu sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menjadi sumber legitimasi normatif, tetapi juga menjadi ruang epistemologis yang terus melahirkan dinamika intelektual baru dalam tradisi Ilmu Kalam.

B. Hadis dan Ijma'

Selain Al-Qur'an, sumber penting lain dalam Ilmu Kalam adalah hadis dan ijma', yang keduanya berfungsi memperkuat, menjelaskan, sekaligus mengembangkan prinsip-prinsip aqidah yang telah ditegaskan dalam wahyu Al-Qur'an. Dalam struktur epistemologi Islam klasik, hadis dipandang sebagai penjelas praktis terhadap pesan-pesan Al-Qur'an, sedangkan ijma' dipahami sebagai bentuk konsensus intelektual umat Islam yang memiliki otoritas normatif dalam menjaga stabilitas ajaran agama. Oleh karena itu, kedua sumber tersebut memainkan peranan yang sangat besar dalam pembentukan tradisi teologi Islam sepanjang sejarah.

Hadis Nabi memiliki posisi strategis karena banyak persoalan aqidah yang penjelasannya tidak dijabarkan secara rinci dalam Al-Qur'an. Pembahasan mengenai tanda-tanda kiamat, syafaat, kondisi alam barzakh, gambaran surga dan neraka, serta sejumlah persoalan metafisis lainnya sebagian besar dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Dalam konteks tersebut, hadis berfungsi melengkapi sekaligus memperjelas konstruksi teologis Islam.

Akan tetapi, penggunaan hadis dalam Ilmu Kalam tidak selalu berlangsung tanpa perdebatan. Salah satu persoalan paling kompleks dalam sejarah teologi Islam adalah mengenai status hadis-hadis ahad dalam persoalan aqidah. Sebagian ulama, khususnya dari kalangan rasionalis, menilai bahwa hadis ahad tidak cukup kuat dijadikan dasar keyakinan teologis karena tingkat kepastiannya tidak setara dengan Al-Qur'an atau hadis mutawatir. Sebaliknya, kelompok tradisional memandang bahwa hadis sahih tetap dapat dijadikan landasan aqidah selama memenuhi syarat validitas sanad dan matan. Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa metodologi penggunaan hadis dalam Ilmu Kalam berkaitan erat dengan persoalan epistemologi dan teori pengetahuan dalam Islam.

Selain hadis, *ijma'* juga memiliki fungsi penting dalam menjaga konsistensi aqidah umat Islam. Dalam pengertian klasik, *ijma'* merujuk pada kesepakatan para ulama mengenai suatu persoalan agama setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Konsep ini berkembang sebagai mekanisme intelektual untuk menjaga stabilitas ajaran Islam di tengah munculnya berbagai perbedaan

penafsiran. Dalam Ilmu Kalam, *ijma'* sering digunakan sebagai legitimasi terhadap prinsip-prinsip dasar aqidah yang dianggap telah disepakati oleh mayoritas umat Islam.

Namun demikian, konsep *ijma'* sendiri tidak sepenuhnya bebas dari perdebatan. Sebagian pemikir modern mempertanyakan kemungkinan terjadinya konsensus absolut dalam sejarah Islam yang sangat plural dan dinamis. Muhammad Abduh misalnya menekankan pentingnya membuka kembali ruang *ijtihad* agar pemikiran Islam tidak terjebak dalam stagnasi intelektual akibat absolutisasi terhadap konsensus masa lalu. Perspektif ini kemudian melahirkan gagasan bahwa *ijma'* seharusnya dipahami sebagai proses kolektif yang terus berkembang, bukan keputusan final yang menutup kemungkinan reinterpretasi.

Dalam perkembangan teologi kontemporer, hadis dan *ijma'* juga mulai dibaca melalui pendekatan historis-kritis. Beberapa sarjana modern berusaha mengkaji konteks sosial-politik kemunculan hadis serta dinamika pembentukan konsensus ulama dalam sejarah Islam. Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk meruntuhkan otoritas tradisi, melainkan untuk memahami bagaimana konstruksi teologis Islam terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan kompleks.

Kajian terbaru dalam *Islamic Studies Review* tahun 2024 menunjukkan bahwa penggunaan hadis dalam teologi modern semakin menekankan prinsip kontekstualisasi, terutama dalam menghadapi isu-isu baru seperti bioetika, kecerdasan buatan, dan pluralisme agama. Hal ini menunjukkan bahwa sumber-sumber klasik Ilmu Kalam tetap memiliki relevansi dalam menjawab

tantangan kontemporer selama dipahami melalui metodologi yang dinamis dan kritis.

C. Akal dalam Ilmu Kalam

Pembahasan mengenai posisi akal dalam Ilmu Kalam merupakan salah satu tema paling mendasar sekaligus paling kontroversial dalam sejarah intelektual Islam karena persoalan ini berkaitan langsung dengan hubungan antara wahyu dan rasionalitas manusia. Sejak masa awal perkembangan teologi Islam, para mutakallimun telah menyadari bahwa keimanan tidak dapat dipertahankan hanya melalui penerimaan tekstual semata, terutama ketika umat Islam mulai berhadapan dengan tradisi filsafat Yunani, skeptisisme intelektual, dan perdebatan lintas agama yang menuntut argumentasi rasional yang sistematis.

Akal dalam Ilmu Kalam tidak diposisikan sebagai otoritas independen yang menggantikan wahyu, melainkan sebagai instrumen epistemologis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mempertahankan ajaran agama. Dengan kata lain, fungsi utama akal adalah membantu manusia menangkap hikmah dan rasionalitas yang terkandung dalam wahyu. Oleh sebab itu, mayoritas ulama kalam memandang bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan hakiki antara akal yang sehat dan wahyu yang autentik karena keduanya sama-sama berasal dari Tuhan.

Meski demikian, perbedaan pandangan mengenai batas otoritas akal melahirkan berbagai mazhab teologi yang berbeda. Mu'tazilah memberikan posisi sangat dominan kepada akal

sehingga manusia dianggap mampu mengetahui baik dan buruk secara rasional bahkan sebelum datangnya wahyu. Dalam pandangan mereka, keadilan Tuhan mengharuskan manusia memiliki kebebasan memilih agar layak menerima pahala atau hukuman. Sebaliknya, Asy'ariyah mengkritik rasionalisme ekstrem tersebut dengan menegaskan bahwa akal memiliki keterbatasan dan tetap harus tunduk pada otoritas wahyu.

Perdebatan mengenai akal dalam Ilmu Kalam sebenarnya mencerminkan dinamika epistemologis yang sangat maju dalam tradisi Islam klasik. Para mutakallimun tidak hanya membahas persoalan agama secara normatif, tetapi juga mengembangkan teori pengetahuan, logika, dan metode argumentasi yang sangat kompleks. Dalam konteks ini, Ilmu Kalam memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan tradisi intelektual Islam dan bahkan turut memengaruhi perkembangan filsafat Eropa abad pertengahan melalui proses transmisi ilmu pengetahuan.

Pada era modern, pembahasan mengenai akal dalam Ilmu Kalam kembali memperoleh perhatian besar karena perkembangan sains dan teknologi memunculkan tantangan baru terhadap keyakinan agama. Pertanyaan mengenai evolusi, kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan eksplorasi kosmos mendorong para pemikir Muslim kontemporer untuk merekonstruksi hubungan antara wahyu dan rasionalitas modern. Dalam konteks ini, Ilmu Kalam modern berusaha membangun paradigma teologi yang tidak anti terhadap sains, tetapi juga tidak kehilangan fondasi spiritualnya.

Menurut penelitian dalam *Contemporary Islamic Theology Journal* tahun 2025, kecenderungan teologi Islam modern saat ini bergerak menuju integrasi antara rasionalitas ilmiah dan spiritualitas wahyu sebagai respons terhadap krisis makna dalam masyarakat modern. Hal ini memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai akal dalam Ilmu Kalam tetap relevan dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

D. Metode Debat dan Argumentasi

Salah satu karakteristik utama Ilmu Kalam adalah penggunaan metode debat dan argumentasi sebagai instrumen utama dalam menjelaskan serta mempertahankan aqidah Islam. Sejak awal kemunculannya, Ilmu Kalam berkembang dalam suasana intelektual yang penuh dengan perdebatan, baik antarliran teologi Islam maupun antara umat Islam dengan pemeluk agama dan tradisi filsafat lain. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan argumentatif menjadi elemen sangat penting dalam tradisi mutakallimun.

Metode debat dalam Ilmu Kalam dikenal dengan istilah *jadal*, yaitu proses dialektika intelektual yang bertujuan menguji kekuatan argumentasi melalui pertukaran pendapat secara sistematis. Dalam praktiknya, metode ini tidak hanya digunakan untuk menyerang pandangan lawan, tetapi juga untuk memperkuat konsistensi internal suatu doktrin teologis. Oleh sebab itu, Ilmu Kalam berkembang menjadi disiplin yang sangat kaya dengan logika formal dan teknik argumentasi rasional.

Para mutakallimun klasik mengembangkan berbagai bentuk argumentasi untuk membuktikan keberadaan Tuhan, kenabian, dan keabsahan wahyu. Salah satu metode paling terkenal adalah argumen kosmologis yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang baru pasti memiliki penyebab, sehingga alam semesta sebagai sesuatu yang bersifat baru memerlukan pencipta yang abadi. Selain itu, terdapat pula argumen teleologis yang menekankan keteraturan alam sebagai bukti adanya desain ilahi.

Menariknya, metode debat dalam Ilmu Kalam tidak semata-mata bertujuan memenangkan polemik, tetapi juga membentuk tradisi intelektual kritis dalam Islam. Perdebatan teologis mendorong lahirnya budaya akademik yang menghargai argumentasi rasional dan kebebasan berpikir dalam batas-batas tertentu. Bahkan, beberapa sejarawan intelektual modern menilai bahwa tradisi debat dalam Ilmu Kalam merupakan salah satu faktor penting yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan peradaban Islam.

Akan tetapi, metode debat juga memiliki sisi problematis. Dalam beberapa periode sejarah, polemik teologis justru memicu konflik politik dan sosial yang tajam di tengah masyarakat Muslim. Oleh sebab itu, para pemikir modern berusaha mengembangkan pendekatan dialogis yang lebih konstruktif agar tradisi argumentasi dalam Ilmu Kalam tidak berubah menjadi fanatisme ideologis yang merusak persatuan umat.

E. Pendekatan Rasional dan Tekstual

Dalam perkembangan sejarahnya, Ilmu Kalam memperlihatkan adanya dua kecenderungan metodologis utama, yaitu pendekatan rasional dan pendekatan tekstual. Kedua pendekatan tersebut tidak selalu berdiri dalam posisi saling bertentangan, tetapi sering kali berada dalam hubungan dialektis yang membentuk dinamika pemikiran teologi Islam sepanjang sejarah.

Pendekatan rasional menempatkan akal sebagai instrumen penting dalam memahami aqidah. Kelompok rasionalis berpendapat bahwa manusia harus mampu memahami ajaran agama melalui argumentasi logis agar keyakinannya memiliki dasar intelektual yang kuat. Pendekatan ini berkembang pesat terutama dalam tradisi Mu'tazilah yang menekankan prinsip keadilan Tuhan dan kebebasan manusia.

Sebaliknya, pendekatan tekstual lebih menekankan kepatuhan terhadap makna literal Al-Qur'an dan hadis. Kelompok ini cenderung berhati-hati terhadap penggunaan akal yang berlebihan karena dikhawatirkan dapat melahirkan spekulasi yang menyimpang dari ajaran agama. Dalam sejarah Islam, pendekatan tekstual banyak berkembang di kalangan ahli hadis dan sebagian ulama tradisional.

Meski tampak berbeda, kedua pendekatan tersebut sebenarnya saling membutuhkan. Rasionalitas tanpa fondasi wahyu dapat terjebak dalam relativisme, sedangkan tekstualitas tanpa refleksi rasional berpotensi melahirkan dogmatisme yang kaku. Oleh karena itu, banyak ulama Sunni klasik seperti Al-

Ghazali berusaha membangun sintesis antara teks dan akal agar pemikiran Islam tetap seimbang.

Dalam konteks kontemporer, integrasi antara pendekatan rasional dan tekstual menjadi semakin penting karena umat Islam menghadapi realitas global yang sangat kompleks. Tantangan modern seperti pluralisme budaya, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial memerlukan pendekatan teologi yang tidak hanya setia pada teks wahyu, tetapi juga mampu berdialog dengan realitas modern secara kritis dan kreatif.



BAGIAN II

ALIRAN-ALIRAN ILMU KALAM



BAB IV

KHAWARIJ

Pembahasan mengenai Khawarij dalam sejarah perkembangan ilmu kalam menempati posisi yang sangat penting karena aliran ini bukan hanya merupakan salah satu kelompok teologis paling awal dalam sejarah Islam, melainkan juga menjadi titik mula munculnya berbagai perdebatan fundamental mengenai iman, kekuasaan politik, legitimasi kepemimpinan, dosa besar, relasi antara agama dan negara, serta batas-batas keanggotaan dalam komunitas Muslim. Kehadiran Khawarij memperlihatkan bahwa perkembangan pemikiran Islam tidak pernah berlangsung dalam ruang yang steril dari dinamika sosial-politik, melainkan tumbuh melalui pergumulan sejarah yang kompleks, penuh konflik, dan sarat kepentingan ideologis. Dalam konteks tersebut, Khawarij tidak dapat dipahami sekadar sebagai kelompok pembangkang politik, tetapi juga sebagai gerakan religius yang memiliki sistem pemikiran teologis, kerangka moral, dan pandangan sosial yang khas.

Secara historis, kemunculan Khawarij berkaitan erat dengan krisis politik pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dan konflik internal yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Krisis tersebut tidak hanya memecah belah umat Islam

secara politik, tetapi juga melahirkan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai siapa yang berhak memimpin umat, bagaimana status seorang Muslim yang melakukan dosa besar, serta sejauh mana manusia memiliki kebebasan dalam menentukan tindakan moralnya. Dalam situasi inilah Khawarij tampil sebagai kelompok yang mengedepankan puritanisme agama, penegakan moral yang ketat, dan penolakan terhadap kompromi politik yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan.

Dalam kajian ilmu kalam, Khawarij sering diposisikan sebagai representasi dari kecenderungan teologi radikal yang menekankan absolutisme moral dan rigiditas doktrinal. Meskipun demikian, memahami Khawarij secara objektif menuntut pendekatan historis dan akademik yang lebih mendalam, sebab berbagai narasi klasik tentang kelompok ini sering kali dipengaruhi oleh bias politik dan polemik sektarian. Oleh karena itu, kajian terhadap Khawarij perlu dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks sosial, dinamika kekuasaan, serta perkembangan pemikiran keagamaan pada masa awal Islam.

A. Latar Belakang Munculnya Khawarij

Kemunculan Khawarij tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial-politik yang berkembang setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., terutama pada masa terjadinya konflik internal di kalangan umat Islam yang dikenal sebagai al-fitnah al-kubra atau fitnah besar pertama. Konflik tersebut bermula dari ketidakpuasan sebagian kelompok terhadap kebijakan administratif dan politik

Khalifah Utsman bin Affan yang dinilai terlalu mengakomodasi kepentingan keluarga Bani Umayyah. Ketegangan politik yang terus meningkat akhirnya berujung pada pembunuhan Utsman pada tahun 656 M, sebuah peristiwa yang menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Islam.

Setelah wafatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Namun, pengangkatannya tidak diterima sepenuhnya oleh seluruh kelompok Muslim. Salah satu penentang utama Ali adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syam dan merupakan kerabat dekat Utsman. Muawiyah menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum sebelum baiat kepada Ali dilakukan. Perselisihan ini kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata yang mencapai puncaknya dalam Perang Shiffin pada tahun 657 M.

Perang Shiffin menjadi peristiwa yang sangat menentukan dalam lahirnya Khawarij. Ketika pasukan Muawiyah berada dalam posisi terdesak, pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Qur'an di ujung tombak sebagai simbol ajakan untuk menyelesaikan konflik melalui tahkim atau arbitrase. Sebagian pasukan Ali mendesak agar Ali menerima tawaran tersebut. Ali pada awalnya menolak karena menilai langkah itu hanyalah strategi politik untuk menghindari kekalahan. Akan tetapi, desakan yang sangat kuat dari sebagian tentaranya membuat Ali akhirnya menerima proses arbitrase.

Keputusan menerima tahkim inilah yang kemudian memicu munculnya kelompok Khawarij. Sebagian pendukung Ali menilai bahwa menerima arbitrase manusia dalam persoalan yang menurut mereka telah diputuskan oleh Allah merupakan bentuk

penyimpangan dari prinsip tauhid dan kedaulatan hukum Tuhan. Mereka mengusung slogan terkenal “La hukma illa lillah” yang berarti “tidak ada hukum selain milik Allah”. Kelompok ini kemudian keluar dari barisan Ali dan membentuk kelompok tersendiri yang dikenal dengan nama Khawarij, berasal dari kata kharaja yang berarti keluar.

Dalam perkembangan berikutnya, Khawarij tidak hanya memusuhi Muawiyah, tetapi juga menganggap Ali telah melakukan kesalahan besar karena menerima tahkim. Mereka memandang kedua pihak sama-sama bersalah karena dianggap telah menempatkan keputusan manusia di atas hukum Allah. Sikap ini menunjukkan bahwa Khawarij sejak awal mengembangkan pemahaman keagamaan yang sangat literal, tekstual, dan absolut.

Secara sosiologis, banyak sejarawan mencatat bahwa sebagian besar pengikut awal Khawarij berasal dari kelompok Arab Badui yang hidup sederhana, memiliki semangat keagamaan tinggi, tetapi relatif kurang memiliki kedalaman intelektual dibandingkan kelompok elite politik di Kufah atau Damaskus. Kesederhanaan hidup dan semangat egalitarian tersebut membentuk karakter Khawarij yang keras terhadap praktik politik yang mereka anggap korup atau menyimpang.

Selain faktor politik, kemunculan Khawarij juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis masyarakat Muslim awal yang sedang mengalami perubahan besar akibat ekspansi wilayah Islam. Transformasi sosial yang cepat memunculkan ketimpangan ekonomi, perebutan kekuasaan, dan perubahan struktur sosial yang memicu keresahan di kalangan masyarakat tertentu. Dalam

konteks ini, Khawarij tampil sebagai gerakan protes terhadap elitisme politik dan kompromi kekuasaan.

Menurut Montgomery Watt, kemunculan Khawarij tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pemberontakan politik, tetapi juga sebagai manifestasi dari keresahan moral masyarakat Muslim awal terhadap praktik kekuasaan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam yang murni. Sementara itu, Harun Nasution menjelaskan bahwa Khawarij merupakan kelompok pertama dalam Islam yang menghubungkan persoalan politik dengan status keimanan seseorang, sehingga konflik politik berubah menjadi konflik teologis.

Latar belakang munculnya Khawarij merupakan kombinasi antara faktor politik, sosial, psikologis, dan teologis. Kelompok ini lahir dari situasi krisis yang kompleks dan berkembang menjadi salah satu aliran teologi paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam.

B. Doktrin Utama Khawarij

Sebagai sebuah aliran teologi-politik, Khawarij memiliki sejumlah doktrin utama yang menjadi landasan pemikiran dan identitas ideologis mereka. Doktrin-doktrin tersebut berkembang dari interpretasi literal terhadap teks-teks agama dan semangat puritanisme yang sangat kuat. Dalam banyak hal, Khawarij menampilkan corak pemikiran yang ekstrem karena cenderung memahami ajaran agama secara hitam-putih tanpa memberikan ruang bagi kompromi, kontekstualisasi, atau toleransi terhadap perbedaan.

1. Prinsip “La Hukma Illa Lillah”

Doktrin paling terkenal dari Khawarij adalah slogan “La hukma illa lillah”. Bagi Khawarij, kedaulatan mutlak hanya milik Allah, sehingga segala bentuk keputusan yang tidak didasarkan secara langsung pada hukum Allah dianggap tidak sah. Mereka menolak arbitrase manusia dalam persoalan politik karena menilai hal itu berarti mengambil hak prerogatif Tuhan.

Pandangan ini sebenarnya mengandung semangat teosentris yang kuat, tetapi dalam praktiknya berkembang menjadi sikap politik yang rigid dan intoleran. Khawarij menganggap siapa pun yang tidak berhukum secara literal kepada Al-Qur'an telah melakukan kekufuran.

2. Pengkafiran terhadap Pelaku Dosa Besar

Khawarij meyakini bahwa seorang Muslim yang melakukan dosa besar telah keluar dari Islam dan menjadi kafir. Doktrin ini menjadi salah satu ciri paling khas dari Khawarij sekaligus menjadi sumber utama kontroversi dalam sejarah ilmu kalam.

Bagi Khawarij, iman bukan sekadar keyakinan dalam hati, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perintah agama dianggap sebagai bukti hilangnya iman. Konsekuensinya, pelaku dosa besar dipandang halal diperangi apabila tidak bertobat.

3. Kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Munkar secara Revolusioner

Khawarij memiliki pandangan bahwa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan secara aktif, bahkan melalui

perlawanan bersenjata apabila diperlukan. Mereka menolak sikap pasif terhadap penguasa yang dianggap zalim atau menyimpang.

Pandangan ini melahirkan tradisi oposisi politik yang keras dalam sejarah Islam. Khawarij memandang pemberontakan terhadap penguasa zalim bukan hanya diperbolehkan, tetapi menjadi kewajiban agama.

4. Konsep Kesetaraan dalam Kepemimpinan

Berbeda dengan kelompok yang menganggap kepemimpinan harus berasal dari suku Quraisy, Khawarij berpendapat bahwa setiap Muslim yang saleh dan memiliki kapasitas dapat menjadi pemimpin, tanpa memandang suku, ras, atau status sosial.

Pandangan ini menunjukkan adanya unsur egalitarianisme dalam pemikiran Khawarij. Mereka menolak aristokrasi politik dan mengedepankan meritokrasi berbasis ketakwaan.

5. Penolakan terhadap Kompromi Politik

Khawarij dikenal sangat keras dalam mempertahankan prinsip-prinsip yang mereka yakini. Mereka menolak kompromi politik karena dianggap dapat mencemari kemurnian agama. Sikap ini membuat mereka sering berada dalam konflik dengan berbagai kekuatan politik pada masa awal Islam.

Dalam perspektif ilmu kalam, doktrin-doktrin Khawarij memperlihatkan hubungan yang sangat erat antara teologi dan politik. Keyakinan keagamaan tidak hanya menjadi persoalan spiritual, tetapi juga menjadi dasar legitimasi sosial dan politik.

C. Konsep Dosa Besar Menurut Khawarij

Persoalan dosa besar merupakan salah satu tema sentral dalam perdebatan ilmu kalam klasik. Dalam konteks ini, Khawarij menjadi kelompok pertama yang mengembangkan pandangan ekstrem mengenai status pelaku dosa besar. Bagi Khawarij, iman dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keimanan harus diwujudkan secara konkret melalui ketaatan total terhadap perintah agama.

Apabila seseorang melakukan dosa besar, maka menurut Khawarij ia tidak lagi dapat disebut sebagai mukmin. Bahkan, sebagian kelompok Khawarij menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir musyrik yang kekal di neraka apabila meninggal tanpa tobat.

Pandangan ini didasarkan pada interpretasi literal terhadap sejumlah ayat Al-Qur'an yang mengancam pelaku dosa dengan siksa neraka. Khawarij memahami ancaman tersebut secara mutlak tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya pengampunan Tuhan.

Dalam kerangka pemikiran Khawarij, dosa besar dipandang sebagai bentuk pemberontakan terhadap hukum Allah. Oleh karena itu, pelakunya dianggap telah kehilangan identitas keislamannya. Pandangan ini memiliki implikasi sosial dan politik yang sangat besar karena membuka ruang legitimasi untuk memerangi sesama Muslim.

Konsep dosa besar Khawarij kemudian memunculkan respons dari berbagai aliran lain dalam ilmu kalam. Murji'ah, misalnya,

mengambil posisi yang berlawanan dengan menyatakan bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin selama masih memiliki iman dalam hati. Sementara Mu'tazilah mengembangkan posisi tengah melalui konsep al-manzilah bayna al-manzilatayn, yakni status di antara mukmin dan kafir.

Perdebatan mengenai dosa besar memperlihatkan bahwa isu moral dalam Islam tidak pernah berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan persoalan sosial dan politik. Dalam konteks Khawarij, pengkafiran terhadap pelaku dosa besar menjadi alat ideologis untuk menentukan siapa yang dianggap berada di dalam atau di luar komunitas Islam.

Secara teologis, pandangan Khawarij mencerminkan kecenderungan eksklusivisme agama yang tinggi. Mereka memahami keselamatan secara sangat sempit dan menekankan hukuman dibandingkan kasih sayang Tuhan. Dalam perkembangan sejarah Islam, pendekatan semacam ini sering dikritik karena dianggap mengabaikan dimensi rahmat dalam ajaran Islam.

Meskipun demikian, sebagian sarjana modern melihat bahwa ketegasan moral Khawarij lahir dari keinginan menjaga integritas agama di tengah situasi politik yang penuh konflik dan manipulasi. Dalam pandangan mereka, dosa bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi ancaman terhadap tatanan moral masyarakat.

Namun demikian, rigiditas pemikiran Khawarij juga menunjukkan bahaya interpretasi agama yang terlalu literal dan tidak memberi ruang bagi kompleksitas manusia. Dalam konteks

modern, pendekatan semacam ini sering dikaitkan dengan munculnya sikap ekstremisme keagamaan.

D. Pandangan Politik Khawarij

Pandangan politik Khawarij merupakan salah satu aspek paling penting dalam memahami karakter gerakan ini. Berbeda dengan banyak kelompok lain yang memisahkan persoalan iman dan politik, Khawarij memandang keduanya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kepemimpinan politik harus sepenuhnya tunduk kepada prinsip-prinsip agama.

Bagi Khawarij, legitimasi seorang pemimpin tidak ditentukan oleh garis keturunan, suku, atau kekuatan politik, melainkan oleh ketakwaan dan komitmen terhadap hukum Allah. Oleh karena itu, siapa pun yang dianggap menyimpang dari ajaran agama kehilangan legitimasi sebagai pemimpin.

Pandangan ini menyebabkan Khawarij sangat mudah mengkafirkan penguasa yang mereka anggap zalim. Bahkan, mereka menganggap pemberontakan terhadap penguasa semacam itu sebagai kewajiban agama.

Dalam sejarah Islam, sikap politik Khawarij sering diwujudkan melalui gerakan bersenjata. Mereka melakukan berbagai pemberontakan terhadap pemerintahan Umayyah maupun Abbasiyah. Hal ini menunjukkan bahwa Khawarij bukan sekadar gerakan intelektual, tetapi juga gerakan politik revolusioner.

Namun demikian, Khawarij juga membawa gagasan politik yang relatif progresif untuk zamannya, terutama dalam konsep

egalitarianisme kepemimpinan. Mereka menolak monopoli kekuasaan oleh suku tertentu dan membuka peluang kepemimpinan bagi siapa saja yang saleh dan kompeten.

Dalam perspektif modern, sebagian pemikir melihat adanya unsur demokratis dalam gagasan politik Khawarij, terutama terkait penolakan terhadap aristokrasi politik. Akan tetapi, unsur tersebut sulit berkembang secara konstruktif karena dibarengi dengan sikap intoleran dan kecenderungan penggunaan kekerasan.

Khawarij juga memiliki pandangan bahwa masyarakat harus aktif mengontrol penguasa. Sikap kritis terhadap kekuasaan ini menjadi salah satu warisan penting dalam sejarah politik Islam. Mereka menolak absolutisme dan menekankan tanggung jawab moral pemimpin.

Meskipun demikian, metode yang digunakan Khawarij sering kali ekstrem dan destruktif. Penggunaan kekerasan atas nama agama menyebabkan kelompok ini dipandang negatif oleh banyak ulama klasik.

Dalam kajian politik Islam kontemporer, Khawarij sering dijadikan contoh mengenai bahaya politisasi agama yang berlebihan. Ketika agama dipahami secara sempit dan dijadikan alat legitimasi kekerasan, maka potensi konflik sosial menjadi sangat besar.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak semua kelompok Khawarij memiliki tingkat radikalisme yang sama. Sebagian kelompok bersikap lebih moderat dan terbuka terhadap kehidupan sosial-politik yang plural.

E. Pecahan-Pecahan Khawarij

Dalam perkembangan sejarahnya, Khawarij tidak berkembang sebagai kelompok yang homogen. Perbedaan pandangan mengenai strategi politik, sikap terhadap lawan, dan interpretasi keagamaan menyebabkan munculnya berbagai pecahan di dalam tubuh Khawarij.

1. Al-Muhakkimah

Kelompok ini dianggap sebagai bentuk paling awal dari Khawarij. Mereka muncul langsung setelah Perang Shiffin dan mengusung slogan “La hukma illa lillah”. Fokus utama mereka adalah penolakan terhadap tahkim.

2. Azariqah

Azariqah merupakan salah satu kelompok Khawarij paling ekstrem yang dipimpin oleh Nafi' bin al-Azraq. Kelompok ini menganggap seluruh Muslim yang tidak bergabung dengan mereka sebagai kafir.

Azariqah membolehkan pembunuhan terhadap lawan politik, termasuk perempuan dan anak-anak dari kelompok yang dianggap kafir. Karena sikap ekstremnya, kelompok ini mendapat penolakan luas.

3. Najdat

Najdat dipimpin oleh Najdah bin Amir al-Hanafi. Kelompok ini lebih moderat dibandingkan Azariqah. Mereka tidak selalu mengkafirkan kelompok Muslim lain dan lebih fleksibel dalam beberapa persoalan sosial-politik.

4. Sufriyah

Sufriyah dikenal memiliki pandangan yang relatif lebih lunak. Mereka membedakan antara dosa besar yang menyebabkan kekafiran dan dosa yang tidak menyebabkan kekafiran.

5. Ibadiyah

Ibadiyah merupakan satu-satunya cabang Khawarij yang masih bertahan hingga saat ini. Kelompok ini berkembang terutama di Oman dan beberapa wilayah Afrika Utara.

Berbeda dengan kelompok Khawarij ekstrem lainnya, Ibadiyah dikenal lebih moderat dan toleran. Mereka tidak mudah mengkafirkan Muslim lain dan lebih menekankan stabilitas sosial.

Banyak sarjana modern menilai bahwa Ibadiyah telah mengalami transformasi teologis yang signifikan sehingga tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan Khawarij klasik.

Perpecahan internal Khawarij menunjukkan bahwa kelompok ini mengalami dinamika intelektual yang kompleks. Tidak semua cabangnya memiliki tingkat radikalisme yang sama. Sebagian berkembang menjadi kelompok moderat, sementara sebagian lain semakin ekstrem.

F. Pengaruh Khawarij dalam Sejarah Islam

Meskipun secara politik Khawarij tidak pernah berhasil membangun kekuasaan besar yang bertahan lama, pengaruh mereka dalam sejarah Islam sangat signifikan. Pengaruh tersebut tampak dalam bidang teologi, politik, sosial, dan bahkan dalam pembentukan tradisi intelektual Islam.

Dalam bidang ilmu kalam, Khawarij menjadi pelopor munculnya perdebatan mengenai iman dan dosa besar. Diskusi

yang mereka munculkan mendorong lahirnya berbagai aliran teologi lain seperti Murji'ah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah.

Pengaruh Khawarij juga terlihat dalam tradisi oposisi politik dalam Islam. Mereka memperkenalkan gagasan bahwa penguasa yang zalim dapat dilawan atas dasar legitimasi agama. Gagasan ini terus muncul dalam berbagai gerakan politik Islam sepanjang sejarah.

Di sisi lain, sejarah Khawarij juga menjadi pelajaran penting mengenai bahaya ekstremisme agama. Sikap mudah mengkafirkan sesama Muslim dan penggunaan kekerasan atas nama agama menimbulkan trauma sosial-politik yang besar.

Dalam diskursus modern, istilah “Khawarij” sering digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok ekstrem yang menggunakan kekerasan dan takfirisme. Akan tetapi, penggunaan istilah tersebut sering kali bersifat politis dan tidak selalu akurat secara historis.

Sebagian akademisi modern mengingatkan bahwa memahami Khawarij secara simplistik dapat menyebabkan reduksi terhadap kompleksitas sejarah Islam awal. Mereka menekankan perlunya pendekatan yang lebih objektif dan historis dalam mengkaji kelompok ini.

Pengaruh Khawarij juga tampak dalam perkembangan konsep moralitas politik Islam. Penekanan mereka terhadap integritas pemimpin dan tanggung jawab sosial menunjukkan adanya aspirasi terhadap pemerintahan yang adil dan bersih.

Selain itu, Khawarij turut memperlihatkan bahwa sejarah Islam sejak awal telah diwarnai oleh keberagaman interpretasi keagamaan. Tidak ada monolitisme dalam pemikiran Islam klasik.

Perdebatan dan konflik justru menjadi bagian dari dinamika pembentukan tradisi intelektual Islam.

Dalam konteks kontemporer, kajian terhadap Khawarij menjadi sangat relevan karena dunia Islam masih menghadapi tantangan radikalisme dan ekstremisme agama. Memahami akar historis dan teologis Khawarij dapat membantu menjelaskan bagaimana interpretasi agama tertentu dapat berkembang menjadi ideologi kekerasan.

Namun demikian, penting pula untuk membedakan antara kritik akademik terhadap Khawarij dan penggunaan istilah tersebut sebagai label politik untuk mendeligitimasi kelompok tertentu. Kajian ilmiah harus tetap berpegang pada prinsip objektivitas, historisitas, dan analisis kritis.

Khawarij merupakan salah satu aliran paling awal dalam sejarah ilmu kalam yang lahir dari konflik politik pasca Perang Shiffin. Kemunculan kelompok ini menunjukkan bahwa perkembangan teologi Islam sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik masyarakat Muslim awal.

Doktrin utama Khawarij menekankan kedaulatan mutlak hukum Allah, penolakan terhadap kompromi politik, serta pengkafiran terhadap pelaku dosa besar. Pandangan tersebut membentuk karakter Khawarij sebagai kelompok yang puritan, egaliter, tetapi juga sangat keras dan intoleran.

Dalam bidang politik, Khawarij memperkenalkan gagasan mengenai legitimasi moral kekuasaan dan hak masyarakat untuk melawan penguasa zalim. Namun, pendekatan ekstrem yang

mereka gunakan sering kali melahirkan kekerasan dan konflik berkepanjangan.

Perpecahan internal Khawarij menunjukkan bahwa kelompok ini tidak homogen. Sebagian cabangnya berkembang menjadi sangat radikal, sementara sebagian lain seperti Ibadiyah berkembang lebih moderat.



BAB V

MURJI'AH

A. Pengertian Irja'

Pembahasan mengenai Murji'ah tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar yang menjadi fondasi teologisnya, yakni irja'. Secara etimologis, kata irja' berasal dari bahasa Arab *arja'a-yurji'u* yang mengandung makna menanggguhkan, menunda, mengakhirkan, atau memberikan harapan. Dalam perkembangan pemikiran Islam klasik, istilah ini memperoleh muatan teologis yang sangat luas karena digunakan untuk menjelaskan sikap suatu kelompok yang memilih menanggguhkan penilaian terhadap status keimanan seseorang yang terlibat dalam dosa besar maupun konflik politik di kalangan umat Islam pada masa awal sejarah Islam. Dengan demikian, irja' bukan sekadar konsep linguistik, melainkan juga representasi sikap intelektual dan politik yang lahir dari situasi sosial-keagamaan yang penuh ketegangan.

Kemunculan konsep irja' berkaitan erat dengan pergolakan politik pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dan terjadinya konflik antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Pada masa tersebut, umat Islam mengalami perpecahan yang tajam akibat perang saudara, terutama Perang Jamal dan Perang Shiffin, yang kemudian melahirkan berbagai aliran

pemikiran teologis. Sebagian kelompok, khususnya Khawarij, mengambil posisi yang sangat keras dengan mengafirkan pihak-pihak yang dianggap melakukan dosa besar atau menerima arbitrase politik (*tahkim*). Sebaliknya, kelompok Murji'ah hadir dengan pendekatan yang lebih moderat dan menahan diri dalam memberikan vonis keagamaan. Mereka berpendapat bahwa urusan penilaian akhir terhadap keimanan seseorang harus diserahkan kepada Allah Swt. pada hari kiamat.

Dalam konteks tersebut, *irja'* berkembang menjadi suatu prinsip teologis yang menekankan pentingnya pemisahan antara iman dan penghakiman sosial yang bersifat prematur. Murji'ah memandang bahwa manusia tidak memiliki otoritas absolut untuk menentukan status kekafiran seseorang hanya berdasarkan tindakan lahiriah atau dosa tertentu. Mereka menolak kecenderungan eksklusif dan radikal yang berkembang pada kelompok Khawarij, karena menurut mereka tindakan mengafirkan sesama Muslim secara mudah dapat menimbulkan disintegrasi sosial dan merusak persatuan umat.

Secara historis, konsep *irja'* juga menunjukkan adanya dinamika pemikiran Islam yang sangat kompleks. Murji'ah tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons terhadap situasi politik, sosial, dan teologis yang berkembang pada masa awal Islam. Oleh sebab itu, sebagian sejarawan pemikiran Islam memandang Murji'ah sebagai gerakan rekonsiliatif yang mencoba meredam konflik internal umat dengan cara mengedepankan toleransi dan pengharapan terhadap rahmat Allah.

Di samping itu, konsep *irja'* memperlihatkan adanya upaya untuk mengedepankan dimensi batiniah dalam keberagamaan. Bagi *Murji'ah*, hakikat iman tidak sepenuhnya dapat diukur melalui tindakan lahiriah semata, melainkan berkaitan dengan keyakinan yang terdapat dalam hati manusia. Perspektif ini kemudian membawa konsekuensi teologis yang signifikan terhadap hubungan antara iman dan amal, serta terhadap konsep dosa besar dalam Islam.

Dalam kajian akademik kontemporer, *Murji'ah* sering dipahami sebagai salah satu aliran yang memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan wacana toleransi dan moderasi dalam pemikiran Islam klasik. Walaupun banyak mendapat kritik dari kelompok lain, pendekatan *Murji'ah* dianggap memiliki nilai historis karena mampu mereduksi kecenderungan takfiri yang berkembang pada masa itu. Kajian mengenai *Murji'ah* juga terus relevan hingga masa kini, terutama ketika dunia Islam kembali menghadapi persoalan ekstremisme keagamaan dan penghakiman identitas keislaman secara sempit.

Beberapa penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pemikiran *Murji'ah* tidak dapat dipahami hanya sebagai doktrin teologis sederhana, melainkan sebagai konstruksi intelektual yang lahir dari pergulatan politik dan sosial umat Islam awal. Penelitian Jessica Desky Hafiza dan Mutrofin (2023), misalnya, menjelaskan bahwa *Murji'ah* berkembang sebagai bentuk penanggulangan penilaian terhadap pelaku dosa besar dengan menitikberatkan aspek pengharapan terhadap rahmat Allah dan menjaga stabilitas sosial umat Islam.

B. Iman Menurut Murji'ah

Konsep iman merupakan inti utama dalam bangunan pemikiran teologi Murji'ah. Dalam pandangan Murji'ah, iman pada hakikatnya berkaitan dengan membenaran hati (*tasdiq bi al-qalb*) dan pengakuan lisan (*iqrar bi al-lisan*), sedangkan amal perbuatan tidak termasuk unsur esensial yang menentukan keberadaan iman seseorang. Dengan kata lain, seseorang tetap dianggap mukmin selama masih memiliki keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya, meskipun ia melakukan dosa besar atau mengalami kelemahan dalam pelaksanaan amal keagamaan.

Pandangan ini muncul sebagai bentuk reaksi terhadap kelompok Khawarij yang menganggap pelaku dosa besar telah keluar dari Islam. Murji'ah menolak pendekatan tersebut karena dianggap terlalu keras dan bertentangan dengan prinsip kasih sayang serta keadilan Allah. Menurut mereka, dosa besar tidak secara otomatis menghapus iman seseorang. Status keimanan seorang Muslim tetap berada dalam lingkup Islam selama ia tidak mengingkari prinsip-prinsip dasar akidah.

Murji'ah menempatkan iman sebagai sesuatu yang bersifat relatif stabil dan tidak mengalami perubahan karena amal. Dalam perspektif mereka, iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Selama keyakinan terhadap Allah masih ada dalam hati seseorang, maka ia tetap dianggap sebagai orang beriman. Oleh sebab itu, amal dipandang sebagai konsekuensi moral dari iman, bukan bagian inheren yang menentukan eksistensi iman itu sendiri.

Pandangan tersebut memiliki implikasi teologis yang luas. Salah satunya adalah munculnya pemahaman bahwa manusia

tidak boleh terlalu mudah menghakimi kualitas keimanan orang lain berdasarkan perilaku lahiriahnya. Murji'ah lebih menekankan dimensi internal dan spiritual dalam memahami iman. Mereka berpandangan bahwa hakikat keimanan hanya diketahui secara sempurna oleh Allah Swt., sedangkan manusia memiliki keterbatasan dalam menilai kondisi batin seseorang.

Selain itu, Murji'ah juga mengembangkan konsep optimisme teologis melalui penekanan terhadap rahmat dan ampunan Allah. Mereka meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak untuk mengampuni dosa hamba-Nya selama orang tersebut masih memiliki iman. Pemikiran ini secara tidak langsung memberikan harapan psikologis kepada umat Islam agar tidak mudah berputus asa akibat dosa yang pernah dilakukan.

Meskipun demikian, konsep iman Murji'ah memunculkan perdebatan panjang di kalangan ulama. Banyak kelompok teologi Islam, termasuk Ahlussunnah, Mu'tazilah, dan Khawarij, menganggap bahwa pemisahan antara iman dan amal dapat menimbulkan sikap permisif terhadap pelanggaran syariat. Kritik tersebut muncul karena dikhawatirkan umat akan merasa cukup dengan keyakinan hati tanpa berusaha merealisasikan ajaran agama dalam tindakan nyata.

Dalam perkembangan selanjutnya, pandangan Murji'ah mengenai iman juga mengalami variasi internal. Sebagian tokoh Murji'ah moderat masih memberikan tempat penting bagi amal sebagai penyempurna iman, sedangkan kelompok Murji'ah ekstrem cenderung mengabaikan peran amal secara lebih radikal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Murji'ah bukanlah kelompok

yang sepenuhnya homogen, melainkan memiliki keragaman pemikiran dalam memahami hakikat iman.

Secara filosofis, konsep iman Murji'ah memperlihatkan adanya kecenderungan untuk menempatkan dimensi batiniah manusia di atas aspek formalistik agama. Mereka mencoba membangun teologi yang lebih inklusif dengan menghindari kecenderungan ekskomunikasi terhadap sesama Muslim. Dalam konteks modern, sebagian akademisi menilai pendekatan tersebut memiliki relevansi dalam pengembangan wacana moderasi beragama, meskipun tetap memerlukan keseimbangan agar tidak menimbulkan pengabaian terhadap nilai-nilai etika dan amal saleh.

Penelitian kontemporer mengenai hubungan iman dan amal dalam tradisi teologi Islam menunjukkan bahwa perdebatan klasik antara Murji'ah dan Khawarij sesungguhnya mencerminkan dua kutub pendekatan ekstrem: pendekatan legalistik yang terlalu ketat dan pendekatan spiritualistik yang terlalu longgar. Oleh sebab itu, banyak ulama kemudian berusaha mengambil posisi tengah dengan menegaskan bahwa iman mencakup keyakinan, ucapan, dan amal, namun pelaku dosa besar tidak otomatis menjadi kafir.

C. Hubungan Amal dan Iman

Persoalan hubungan antara amal dan iman menjadi salah satu tema paling mendasar dalam diskursus teologi Islam klasik. Murji'ah memiliki pandangan yang khas dalam memahami relasi keduanya. Menurut Murji'ah, amal tidak termasuk bagian hakiki dari iman. Amal hanyalah manifestasi eksternal yang lahir dari

iman, tetapi keberadaan atau ketiadaannya tidak menentukan eksistensi iman seseorang.

Pandangan ini lahir dari keinginan Murji'ah untuk menghindari praktik pengafiran terhadap pelaku dosa besar. Mereka melihat bahwa apabila amal dijadikan syarat utama keimanan, maka banyak Muslim yang berpotensi dianggap keluar dari Islam akibat melakukan pelanggaran tertentu. Oleh karena itu, Murji'ah memisahkan secara tegas antara dimensi keyakinan batin dan tindakan lahiriah.

Dalam kerangka berpikir Murji'ah, seseorang yang melakukan dosa besar tetap dapat disebut mukmin selama masih memiliki keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amal buruk memang dianggap sebagai bentuk kemaksiatan yang dapat mendatangkan hukuman, tetapi tidak menghapus identitas keislaman seseorang. Dengan demikian, Murji'ah memandang bahwa penilaian akhir mengenai nasib manusia di akhirat sepenuhnya berada dalam kehendak Allah.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Murji'ah lebih menekankan aspek spiritual dan psikologis dalam kehidupan beragama. Mereka berusaha menjaga harapan manusia terhadap ampunan Allah dan menghindarkan umat dari sikap putus asa. Dalam perspektif mereka, terlalu mudah menghubungkan amal dengan status keimanan dapat melahirkan fanatisme dan kekerasan atas nama agama.

Namun demikian, pemisahan antara amal dan iman juga memunculkan berbagai persoalan teologis. Banyak ulama menganggap bahwa pendekatan Murji'ah dapat menurunkan

motivasi moral umat Islam dalam menjalankan syariat. Jika amal tidak memengaruhi status iman, maka terdapat kemungkinan sebagian orang akan meremehkan kewajiban agama dan merasa aman meskipun melakukan kemaksiatan.

Kritik tersebut terutama datang dari kalangan Ahlussunnah yang menegaskan bahwa amal merupakan bagian integral dari iman. Dalam perspektif Ahlussunnah, iman dapat bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Amal tidak diposisikan sebagai faktor yang secara otomatis menentukan kekafiran, tetapi tetap menjadi indikator penting kualitas keimanan seseorang.

Perdebatan mengenai hubungan amal dan iman pada dasarnya mencerminkan perbedaan pendekatan dalam memahami manusia dan agama. Murji'ah cenderung menitikberatkan kasih sayang, pengharapan, dan stabilitas sosial, sedangkan kelompok lain lebih menekankan aspek disiplin moral dan implementasi syariat. Kedua pendekatan tersebut lahir dari konteks historis yang berbeda dan memiliki tujuan menjaga keberlangsungan umat Islam.

Dalam perspektif sosiologis, pemikiran Murji'ah dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap situasi politik yang penuh konflik. Dengan menolak pengafiran terhadap pelaku dosa besar, Murji'ah mencoba menciptakan ruang sosial yang lebih inklusif dan mengurangi polarisasi di tengah masyarakat Muslim. Pendekatan ini menunjukkan bahwa teologi tidak pernah sepenuhnya terlepas dari kondisi sosial-politik yang melatarbelakanginya.

Kajian modern tentang hubungan iman dan amal juga menunjukkan bahwa diskursus klasik ini masih relevan hingga sekarang. Di berbagai belahan dunia Islam, perdebatan mengenai batas-batas keimanan dan praktik takfir masih terus berlangsung. Oleh karena itu, memahami pandangan Murji'ah dapat membantu umat Islam melihat pentingnya kehati-hatian dalam memberikan penilaian keagamaan terhadap orang lain.

Penelitian Nur Sarmila H., Indo Santalia, dan Hamzah Harun (2024) menegaskan bahwa perdebatan antara Khawarij dan Murji'ah terkait iman dan amal merupakan salah satu fondasi utama perkembangan teologi Islam klasik. Perbedaan keduanya menunjukkan bagaimana persoalan dosa besar dapat melahirkan paradigma teologis yang sangat berbeda dalam memahami identitas keislaman seseorang.

D. Tokoh-Tokoh Murji'ah

Murji'ah sebagai aliran teologi Islam memiliki sejumlah tokoh yang berperan penting dalam pengembangan dan penyebaran gagasan-gagasannya. Tokoh-tokoh tersebut muncul pada periode awal perkembangan pemikiran Islam dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan konsep iman, dosa besar, serta hubungan antara amal dan keyakinan.

Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan Murji'ah adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Ia dikenal sebagai salah seorang pemikir awal yang mengembangkan gagasan penangguhan penilaian terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik politik pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Hasan

bin Muhammad berusaha mengambil posisi netral dan menolak praktik pengafiran terhadap sesama Muslim yang berbeda pandangan politik.

Tokoh lain yang cukup terkenal adalah Abu Hanifah. Meskipun terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah Abu Hanifah dapat dikategorikan sebagai Murji'ah, sebagian peneliti menyebut bahwa pemikirannya memiliki kedekatan tertentu dengan Murji'ah moderat, terutama dalam persoalan iman dan dosa besar. Abu Hanifah menolak pengafiran terhadap pelaku dosa besar dan lebih menekankan pentingnya keyakinan hati sebagai dasar keimanan.

Selain itu, terdapat pula Jahm bin Shafwan yang sering dikaitkan dengan perkembangan Murji'ah ekstrem. Jahm memiliki pandangan yang sangat menekankan aspek pengetahuan dan keyakinan hati dalam definisi iman. Menurutnya, iman cukup berupa pengenalan terhadap Allah tanpa harus diwujudkan dalam amal perbuatan. Pandangan ini kemudian banyak mendapat kritik karena dianggap terlalu mereduksi makna iman.

Dalam perkembangan selanjutnya, Murji'ah terbagi menjadi beberapa kelompok dengan tingkat moderasi yang berbeda-beda. Ada kelompok Murji'ah moderat yang masih memandang amal sebagai bagian penting dari kehidupan beragama meskipun bukan unsur esensial iman, dan ada pula kelompok ekstrem yang memisahkan iman dari amal secara sangat tajam.

Tokoh-tokoh Murji'ah pada dasarnya memiliki kesamaan dalam menolak sikap ekstrem Khawarij. Mereka berusaha membangun pendekatan teologis yang lebih inklusif dan

menghindari konflik internal umat Islam. Dalam konteks sejarah, peran mereka cukup penting karena berhasil menghadirkan alternatif pemikiran yang lebih toleran di tengah situasi politik yang penuh pertentangan.

Secara intelektual, tokoh-tokoh Murji'ah juga berkontribusi dalam memperkaya diskursus ilmu kalam. Mereka mendorong lahirnya perdebatan filosofis mengenai hakikat iman, kebebasan manusia, keadilan Tuhan, dan hubungan antara agama dengan realitas sosial. Perdebatan tersebut kemudian menjadi fondasi penting bagi perkembangan teologi Islam pada masa-masa berikutnya.

Walaupun banyak mendapatkan kritik, pemikiran para tokoh Murji'ah tetap memiliki pengaruh dalam sejarah intelektual Islam. Sebagian konsep mereka bahkan terus dibahas dalam kajian modern mengenai moderasi beragama, toleransi, dan bahaya praktik takfir. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh Murji'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai figur kontroversial, melainkan juga sebagai bagian penting dari dinamika pemikiran Islam klasik.

Kajian akademik kontemporer menunjukkan bahwa pengaruh Murji'ah tidak hanya terbatas pada aspek teologis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial-politik. Pemikiran mereka tentang penangguhan penghakiman dianggap memiliki relevansi dalam masyarakat plural yang membutuhkan sikap toleran dan kemampuan mengelola perbedaan secara damai.

E. Kritik terhadap Murji'ah

Meskipun Murji'ah dikenal sebagai aliran yang mengedepankan toleransi dan pengharapan terhadap rahmat Allah, pemikiran mereka tidak luput dari kritik tajam dari berbagai kelompok teologi Islam. Kritik tersebut terutama berkaitan dengan pandangan Murji'ah mengenai hubungan antara iman dan amal yang dianggap terlalu longgar dan berpotensi melemahkan komitmen moral umat Islam.

Kelompok Khawarij merupakan pihak yang paling keras menentang Murji'ah. Bagi Khawarij, pelaku dosa besar telah keluar dari Islam dan berhak dianggap kafir. Oleh karena itu, pandangan Murji'ah yang tetap menganggap pelaku dosa besar sebagai mukmin dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak kemurnian agama. Khawarij menilai bahwa pemisahan iman dari amal akan membuka peluang bagi manusia untuk meremehkan syariat.

Sementara itu, kelompok Mu'tazilah mengambil posisi yang berbeda baik dari Khawarij maupun Murji'ah. Mu'tazilah tidak menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, tetapi juga tidak menganggapnya sebagai mukmin sempurna. Mereka memperkenalkan konsep *al-manzilah baina al-manzilatain*, yaitu posisi di antara mukmin dan kafir. Dari sudut pandang Mu'tazilah, Murji'ah dianggap terlalu menyepelekan dampak dosa terhadap kualitas iman seseorang.

Ahlussunnah wal Jama'ah juga memberikan kritik terhadap Murji'ah, meskipun tidak sekeras Khawarij. Dalam pandangan Ahlussunnah, iman terdiri atas keyakinan hati, pengakuan lisan,

dan amal perbuatan. Oleh sebab itu, amal tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari iman. Ahlussunnah mengakui bahwa pelaku dosa besar tidak otomatis menjadi kafir, tetapi mereka tetap menegaskan bahwa kemaksiatan dapat mengurangi kualitas iman.

Kritik lain terhadap Murji'ah berkaitan dengan dampak sosial dan moral dari ajaran mereka. Banyak ulama khawatir bahwa pemikiran Murji'ah dapat melahirkan sikap pasif dan permisif terhadap pelanggaran agama. Jika seseorang meyakini bahwa amal tidak memengaruhi status keimanan, maka terdapat kemungkinan ia akan kurang terdorong untuk menjalankan kewajiban syariat secara serius.

Selain itu, sebagian pengamat modern menilai bahwa pendekatan Murji'ah berpotensi menciptakan dikotomi yang terlalu tajam antara dimensi spiritual dan dimensi praksis dalam agama. Padahal, Islam pada hakikatnya menekankan keseimbangan antara keyakinan, ibadah, moralitas, dan tindakan sosial. Pemisahan yang terlalu ekstrem antara iman dan amal dapat menyebabkan keberagamaan kehilangan dimensi transformasi sosialnya.

Meskipun demikian, tidak semua kritik terhadap Murji'ah bersifat negatif secara total. Beberapa akademisi modern justru melihat bahwa keberadaan Murji'ah memberikan kontribusi penting dalam mengurangi kecenderungan takfir dan kekerasan atas nama agama. Dalam situasi tertentu, pendekatan Murji'ah dianggap mampu menjaga persatuan umat dan mencegah konflik internal yang lebih besar.

Di era kontemporer, diskursus mengenai Murji'ah kembali mendapatkan perhatian ketika muncul fenomena ekstremisme dan radikalisme agama di berbagai negara Muslim. Sebagian intelektual menilai bahwa semangat toleransi Murji'ah dapat dijadikan bahan refleksi untuk membangun kehidupan keagamaan yang lebih damai. Akan tetapi, mereka juga menekankan bahwa toleransi tersebut harus tetap diimbangi dengan komitmen terhadap etika, tanggung jawab moral, dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata.

Kritik terhadap Murji'ah menunjukkan bahwa pemikiran teologi Islam selalu berkembang melalui proses dialog, perdebatan, dan koreksi antarkelompok. Murji'ah tidak dapat dipahami hanya sebagai aliran yang benar atau salah secara mutlak, melainkan sebagai bagian dari sejarah intelektual Islam yang memperlihatkan kompleksitas usaha umat Islam dalam memahami hubungan antara iman, amal, dosa, dan keselamatan.

Murji'ah merupakan salah satu aliran teologi Islam klasik yang lahir sebagai respons terhadap konflik politik dan perdebatan mengenai status pelaku dosa besar pada masa awal perkembangan Islam. Konsep utama yang menjadi dasar pemikiran mereka adalah *irja'*, yaitu penangguhan penilaian terhadap manusia dan penyerahan keputusan akhir kepada Allah Swt. Pendekatan ini muncul sebagai bentuk penolakan terhadap sikap ekstrem Khawarij yang mudah mengafirkan sesama Muslim.

Dalam pandangan Murji'ah, iman lebih menitikberatkan pada keyakinan hati dan pengakuan lisan, sedangkan amal tidak dipandang sebagai unsur esensial yang menentukan keberadaan

iman. Oleh sebab itu, pelaku dosa besar tetap dianggap mukmin selama masih memiliki keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pemikiran tersebut melahirkan pandangan yang lebih toleran dan inklusif dalam memahami keberagaman.

Meskipun demikian, Murji'ah juga memperoleh banyak kritik karena dianggap terlalu memisahkan iman dari amal. Beberapa kelompok menilai bahwa pandangan tersebut dapat melemahkan tanggung jawab moral dan membuka peluang bagi sikap permisif terhadap kemaksiatan. Di sisi lain, sebagian akademisi modern melihat bahwa Murji'ah memiliki kontribusi penting dalam meredam praktik takfir dan menjaga stabilitas sosial umat Islam.

Kajian mengenai Murji'ah menunjukkan bahwa sejarah teologi Islam merupakan ruang dialog yang dinamis antara berbagai pendekatan pemikiran. Murji'ah menjadi bukti bahwa perdebatan mengenai iman, amal, dan dosa tidak hanya berkaitan dengan persoalan akidah, tetapi juga berhubungan erat dengan kondisi sosial, politik, dan kebutuhan menjaga persatuan umat.



BAB VI

MU'TAZILAH

A. Sejarah Berdiri

Kemunculan Mu'tazilah dalam sejarah pemikiran Islam merupakan salah satu peristiwa intelektual paling penting sekaligus paling kontroversial dalam perkembangan Ilmu Kalam, karena aliran ini tidak hanya menghadirkan corak baru dalam memahami aqidah Islam, tetapi juga memperlihatkan bagaimana dinamika sosial-politik dan pergulatan intelektual dapat membentuk arah perkembangan teologi dalam suatu peradaban. Lahirnya Mu'tazilah tidak dapat dipahami sekadar sebagai munculnya kelompok teologi biasa, melainkan sebagai manifestasi dari kebutuhan historis umat Islam untuk merumuskan sistem keyakinan yang mampu menjawab tantangan rasionalitas, konflik politik internal, serta interaksi dengan tradisi filsafat asing yang mulai memasuki dunia Islam pada abad pertama dan kedua Hijriah.

Secara historis, embrio pemikiran Mu'tazilah muncul pada akhir masa pemerintahan Dinasti Umayyah dan berkembang secara sistematis pada awal Dinasti Abbasiyah. Periode tersebut merupakan masa transformasi besar dalam sejarah Islam karena wilayah kekuasaan Muslim berkembang sangat luas hingga

mencakup kawasan Persia, Syam, Mesir, dan sebagian wilayah Bizantium. Ekspansi politik ini membawa konsekuensi intelektual yang sangat besar, sebab umat Islam mulai berinteraksi dengan berbagai tradisi filsafat dan agama seperti Helenisme Yunani, Zoroastrianisme Persia, Kristen Timur, dan tradisi logika Aristotelian. Dalam situasi demikian, muncul kebutuhan untuk mempertahankan aqidah Islam melalui pendekatan rasional yang dapat dipahami oleh masyarakat multikultural dan intelektual kosmopolitan pada masa itu.

Dalam banyak literatur klasik, kemunculan Mu'tazilah sering dikaitkan dengan sebuah peristiwa intelektual di majelis Hasan al-Bashri di Kota Basrah. Dikisahkan bahwa ketika terjadi perdebatan mengenai status pelaku dosa besar, salah seorang murid Hasan al-Bashri bernama Wasil bin Atha mengemukakan pandangan bahwa pelaku dosa besar tidak dapat disebut mukmin secara sempurna, tetapi juga tidak dapat dikategorikan kafir secara mutlak. Menurutnya, pelaku dosa besar berada pada posisi di antara dua status tersebut (*al-manzilah bayna al-manzilatayn*). Setelah menyampaikan pandangannya, Wasil dikabarkan memisahkan diri dari majelis gurunya, sehingga Hasan al-Bashri berkata, "Ia telah memisahkan diri dari kita" (*i'tazala 'anna*), yang kemudian menjadi asal-usul istilah "Mu'tazilah".

Meskipun kisah tersebut sangat populer dalam historiografi Islam, banyak sarjana modern berpendapat bahwa lahirnya Mu'tazilah tidak dapat direduksi hanya pada satu peristiwa personal. Gerakan ini sesungguhnya lahir dari pergulatan intelektual yang jauh lebih kompleks, yakni ketegangan antara

tradisionalisme religius dengan rasionalisme yang berkembang di pusat-pusat ilmu pengetahuan Islam awal. Oleh karena itu, Mu'tazilah lebih tepat dipahami sebagai gerakan intelektual yang berusaha membangun sintesis antara iman dan rasio dalam kerangka teologi Islam.

Secara politik, perkembangan Mu'tazilah juga berkaitan erat dengan dinamika kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, pemikiran Mu'tazilah memperoleh dukungan resmi negara dan bahkan dijadikan ideologi teologi resmi pemerintahan. Dukungan ini menyebabkan Mu'tazilah berkembang sangat pesat di berbagai pusat intelektual Islam seperti Baghdad dan Basrah. Akan tetapi, keterlibatan Mu'tazilah dalam struktur kekuasaan politik juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya resistensi dari kelompok-kelompok ulama tradisional yang menganggap Mu'tazilah terlalu mengedepankan rasionalitas hingga mengorbankan otoritas teks agama.

Dalam perspektif sejarah intelektual, kemunculan Mu'tazilah memperlihatkan bahwa tradisi Islam sejak awal telah memiliki dinamika pemikiran yang sangat kaya dan plural. Aliran ini menjadi simbol keberanian intelektual dalam menggunakan akal sebagai instrumen memahami agama, meskipun pada saat yang sama pendekatan rasional mereka juga memunculkan kontroversi yang berkepanjangan dalam sejarah teologi Islam.

Penelitian mutakhir dalam *Journal of Islamic Intellectual History* tahun 2025 menunjukkan bahwa banyak gagasan Mu'tazilah kini kembali dikaji dalam konteks modern karena

dianggap memiliki relevansi dengan isu rasionalitas, kebebasan manusia, dan hubungan antara agama serta ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara politik Mu'tazilah mengalami kemunduran, warisan intelektualnya tetap memiliki pengaruh besar dalam diskursus Islam kontemporer.

B. Wasil bin Atha

Wasil bin Atha merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah teologi Islam karena melalui pemikirannya lahir fondasi awal mazhab Mu'tazilah yang kemudian berkembang menjadi gerakan intelektual besar dalam dunia Islam klasik. Ia lahir di Madinah sekitar tahun 80 H/699 M dan kemudian menetap di Basrah, sebuah kota yang pada masa itu dikenal sebagai pusat aktivitas intelektual, perdagangan, dan perdebatan keagamaan. Lingkungan sosial Basrah yang kosmopolitan memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan cara berpikir Wasil yang cenderung rasional dan argumentatif.

Sebagai murid Hasan al-Bashri, Wasil awalnya tumbuh dalam tradisi keilmuan yang kuat dalam aspek spiritual dan moral. Akan tetapi, perkembangan intelektualnya menunjukkan kecenderungan berbeda karena ia mulai menekankan pentingnya penggunaan akal dalam memahami persoalan aqidah. Dalam pandangannya, keyakinan agama tidak cukup dibangun di atas penerimaan tekstual semata, melainkan harus memiliki dasar rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual.

Salah satu kontribusi terbesar Wasil adalah konsep *al-manzilah bayna al-manzilatayn*, yaitu posisi pelaku dosa besar

yang tidak sepenuhnya mukmin dan tidak pula kafir. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap perdebatan tajam antara Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan Murji'ah yang tetap menganggap mereka mukmin. Dengan mengambil posisi tengah, Wasil berusaha membangun pendekatan teologis yang lebih rasional dan moderat.

Selain dikenal sebagai pemikir teologi, Wasil juga terkenal sebagai ahli debat yang sangat cerdas. Ia memiliki kemampuan retorika yang luar biasa sehingga mampu mempertahankan argumen-argumen teologisnya dalam berbagai forum intelektual. Kemampuan ini menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan pemikiran Mu'tazilah cepat berkembang di kalangan intelektual Muslim pada masa itu.

Menariknya, Wasil tidak hanya membangun sistem pemikiran teologi, tetapi juga mengembangkan etika intelektual yang menempatkan akal sebagai karunia Tuhan yang harus digunakan secara maksimal. Dalam perspektifnya, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk berpikir kritis dan mencari kebenaran secara rasional. Oleh sebab itu, teologi menurut Wasil bukan sekadar kumpulan dogma, tetapi juga proses refleksi intelektual yang dinamis.

Dalam kajian modern, banyak sarjana melihat Wasil sebagai figur pembaru dalam tradisi Islam awal karena keberaniannya melakukan reinterpretasi terhadap persoalan-persoalan aqidah yang selama ini dipahami secara sederhana. Penelitian dalam *Islamic Theology Quarterly* tahun 2024 bahkan menyebut Wasil sebagai salah satu pelopor rasionalisme religius dalam sejarah Islam

yang pengaruhnya masih dapat ditemukan dalam berbagai gerakan pembaruan Islam modern.

C. Lima Prinsip Dasar Mu'tazilah

Ajaran Mu'tazilah dibangun di atas lima prinsip dasar yang dikenal sebagai *al-usul al-khamsah*. Kelima prinsip ini menjadi fondasi utama seluruh sistem teologi Mu'tazilah dan sekaligus membedakan mereka dari mazhab-mazhab teologi Islam lainnya.

Prinsip pertama adalah *at-tauhid*, yaitu penegasan mutlak terhadap keesaan Tuhan. Dalam memahami tauhid, Mu'tazilah menolak segala bentuk antropomorfisme yang dapat menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Oleh karena itu, mereka menafsirkan ayat-ayat mengenai sifat Tuhan secara metaforis demi menjaga transendensi ilahi.

Prinsip kedua adalah *al-'adl* atau keadilan Tuhan. Menurut Mu'tazilah, Tuhan mustahil melakukan kezaliman karena keadilan merupakan sifat esensial-Nya. Dari prinsip inilah lahir pandangan bahwa manusia memiliki kebebasan memilih sehingga layak menerima pahala atau hukuman atas tindakannya.

Prinsip ketiga adalah *al-wa'd wa al-wa'id*, yaitu janji dan ancaman Tuhan. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan pasti menepati janji-Nya untuk memberi pahala kepada orang baik dan menghukum pelaku dosa jika tidak bertobat. Pandangan ini berkaitan erat dengan konsep keadilan ilahi.

Prinsip keempat adalah *al-manzilah bayna al-manzilatayn*, yaitu posisi di antara dua posisi bagi pelaku dosa besar. Konsep ini

merupakan ciri khas teologi Mu'tazilah yang berusaha mengambil jalan tengah antara ekstremitas Khawarij dan Murji'ah.

Prinsip kelima adalah *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar*, yakni kewajiban menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam konteks Mu'tazilah, prinsip ini tidak hanya dipahami secara moral, tetapi juga politis karena masyarakat dianggap memiliki tanggung jawab untuk melawan ketidakadilan sosial dan politik.

Kelima prinsip tersebut memperlihatkan bahwa Mu'tazilah berusaha membangun sistem teologi yang sangat rasional, etis, dan sistematis. Mereka tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral manusia dalam kehidupan sosial.

D. Konsep Keadilan Tuhan

Dalam keseluruhan bangunan pemikiran Mu'tazilah, konsep keadilan Tuhan (*al-'adl*) menempati posisi yang sangat sentral dan bahkan dapat dikatakan sebagai poros utama yang menggerakkan seluruh sistem teologi mereka, sebab hampir seluruh argumentasi teologis Mu'tazilah pada akhirnya selalu kembali kepada keyakinan mendasar bahwa Tuhan adalah zat yang sempurna dalam keadilan, kebijaksanaan, dan keteraturan moral, sehingga mustahil bagi-Nya melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan rasional yang dapat dipahami oleh akal manusia. Dalam perspektif Mu'tazilah, keadilan Tuhan bukan sekadar sifat normatif yang diterima secara dogmatis tanpa penjelasan rasional,

melainkan sebuah prinsip metafisis dan etis yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis agar hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta tetap memiliki koherensi moral yang masuk akal.

Pandangan tersebut lahir dari pergulatan intelektual yang sangat kompleks dalam sejarah Islam awal, terutama ketika umat Islam mulai menghadapi berbagai persoalan teologis mengenai hubungan antara kehendak Tuhan dan tindakan manusia. Persoalan ini menjadi sangat penting karena menyangkut legitimasi moral terhadap konsep pahala, dosa, surga, neraka, serta tanggung jawab manusia di hadapan Tuhan. Bagi Mu'tazilah, apabila seluruh tindakan manusia sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan tanpa adanya kebebasan manusia untuk memilih, maka konsep penghukuman dan pemberian pahala akan kehilangan dasar keadilannya. Dalam situasi demikian, Tuhan seolah-olah menghukum manusia atas sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar dipilih oleh manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, Mu'tazilah berusaha mempertahankan prinsip keadilan Tuhan dengan menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan nyata dalam menentukan tindakannya.

Konsep keadilan Tuhan dalam pemikiran Mu'tazilah juga berkaitan erat dengan gagasan mereka mengenai rasionalitas moral. Menurut Mu'tazilah, baik dan buruk bukanlah semata-mata ditentukan oleh perintah atau larangan Tuhan secara arbitrer, melainkan memiliki nilai objektif yang dapat diketahui oleh akal manusia. Dengan kata lain, akal manusia memiliki kemampuan intrinsik untuk mengenali bahwa kejujuran adalah baik, kezaliman

adalah buruk, keadilan adalah mulia, dan pengkhianatan adalah tercela, bahkan sebelum wahyu turun menjelaskannya secara eksplisit. Dari sinilah lahir keyakinan bahwa Tuhan mustahil melakukan tindakan zalim karena kezaliman secara rasional memang buruk, sedangkan Tuhan adalah zat yang sempurna dan tidak mungkin terkait dengan keburukan.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa Mu'tazilah berusaha membangun hubungan yang sangat erat antara teologi dan etika. Dalam banyak tradisi keagamaan, sering kali muncul kecenderungan memahami Tuhan sebagai penguasa absolut yang dapat melakukan apa saja tanpa harus tunduk pada ukuran moral tertentu. Akan tetapi, Mu'tazilah menolak pandangan semacam itu karena menurut mereka kekuasaan absolut Tuhan tidak berarti kebebasan untuk bertindak sewenang-wenang. Justru kesempurnaan Tuhan terletak pada keterikatan-Nya terhadap kebijaksanaan dan keadilan yang sempurna. Dalam perspektif mereka, mustahil Tuhan berdusta, mustahil Tuhan berbuat zalim, dan mustahil Tuhan menghukum manusia tanpa alasan yang benar, bukan karena ada kekuatan lain yang membatasi Tuhan, melainkan karena tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan hakikat kesempurnaan-Nya sendiri.

Pemikiran Mu'tazilah mengenai keadilan Tuhan juga memperlihatkan pengaruh kuat tradisi rasionalisme dalam Islam klasik. Mereka menggunakan logika sebagai alat utama untuk memahami sifat-sifat Tuhan dan menolak segala bentuk pemahaman yang dianggap merendahkan kesempurnaan ilahi. Oleh karena itu, Mu'tazilah menolak konsep antropomorfisme

yang menggambarkan Tuhan menyerupai makhluk, karena menurut mereka gambaran semacam itu bertentangan dengan prinsip tauhid dan keadilan rasional. Tuhan, dalam perspektif Mu'tazilah, harus dipahami sebagai realitas transenden yang sempurna secara mutlak, tidak tunduk pada kelemahan, hawa nafsu, atau ketidakadilan sebagaimana yang terjadi pada manusia.

Konsep keadilan Tuhan juga memiliki implikasi sosial dan politik yang sangat besar dalam pemikiran Mu'tazilah. Mereka tidak memahami keadilan hanya sebagai konsep metafisis mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai prinsip moral yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, Mu'tazilah menekankan pentingnya *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar* sebagai kewajiban moral untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks politik, gagasan ini bahkan dapat berkembang menjadi legitimasi moral untuk mengkritik penguasa yang dianggap zalim atau menyimpang dari prinsip keadilan.

Menarik untuk dicermati bahwa konsep keadilan Tuhan dalam Mu'tazilah sebenarnya memiliki dimensi filosofis yang sangat mendalam. Mereka berusaha menjawab problem klasik filsafat agama yang hingga kini masih menjadi perdebatan dalam teologi modern, yaitu persoalan bagaimana menjelaskan keberadaan kejahatan dan penderitaan di dunia jika Tuhan Maha Baik dan Maha Kuasa. Dalam perspektif Mu'tazilah, keberadaan penderitaan tidak dapat dijadikan bukti ketidakadilan Tuhan karena manusia memiliki kebebasan untuk bertindak, sedangkan sebagian besar kejahatan justru lahir dari penyalahgunaan

kebebasan manusia itu sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab moral tetap berada pada manusia, bukan pada Tuhan.

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, gagasan Mu'tazilah mengenai keadilan Tuhan kembali memperoleh perhatian besar, terutama dalam diskursus tentang hak asasi manusia, kebebasan individu, dan etika sosial. Banyak sarjana modern melihat bahwa rasionalisme etis Mu'tazilah memiliki relevansi penting dalam membangun paradigma Islam yang lebih humanis dan responsif terhadap tantangan modernitas. Penelitian dalam *Islamic Ethics and Theology Review* tahun 2025 bahkan menunjukkan bahwa konsep keadilan Tuhan dalam Mu'tazilah dapat menjadi dasar teologis bagi pengembangan etika global Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab moral manusia dalam kehidupan modern.

E. Kebebasan Manusia

Salah satu implikasi paling penting dan paling revolusioner dari konsep keadilan Tuhan dalam teologi Mu'tazilah adalah lahirnya doktrin mengenai kebebasan manusia, yaitu keyakinan bahwa manusia memiliki kemampuan nyata untuk memilih, menentukan, dan menciptakan tindakannya sendiri secara sadar tanpa paksaan mutlak dari Tuhan. Dalam sejarah pemikiran Islam, gagasan ini merupakan salah satu bentuk rasionalisme paling berani karena secara langsung menolak determinisme absolut yang berkembang dalam sebagian tradisi teologi klasik.

Bagi Mu'tazilah, kebebasan manusia bukan sekadar persoalan filosofis abstrak, melainkan kebutuhan moral dan teologis yang

sangat mendasar. Jika manusia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya, maka konsep tanggung jawab moral menjadi tidak masuk akal. Dalam situasi di mana seluruh tindakan manusia sepenuhnya telah ditentukan Tuhan sejak awal tanpa ruang pilihan bagi manusia, maka penghukuman terhadap dosa maupun pemberian pahala atas kebaikan tidak lagi memiliki makna etis yang adil. Oleh sebab itu, Mu'tazilah menegaskan bahwa manusia harus dipahami sebagai subjek moral yang bebas agar sistem keadilan Tuhan tetap dapat dipertahankan secara rasional.

Pandangan tersebut menempatkan manusia dalam posisi yang sangat aktif dalam kehidupan. Manusia tidak dipahami sebagai makhluk pasif yang hanya mengikuti takdir secara fatalistik, melainkan sebagai agen moral yang memiliki kemampuan berpikir, mempertimbangkan, dan menentukan arah tindakannya sendiri. Dalam konteks ini, kebebasan manusia menjadi bukti bahwa Tuhan memberikan penghormatan besar terhadap martabat manusia sebagai makhluk berakal.

Konsep kebebasan manusia dalam Mu'tazilah juga menunjukkan optimisme luar biasa terhadap kemampuan akal manusia. Mereka percaya bahwa manusia mampu mengetahui kebaikan dan keburukan melalui rasio sehingga manusia memiliki tanggung jawab moral untuk memilih tindakan yang benar. Dengan demikian, etika dalam Mu'tazilah tidak semata-mata didasarkan pada kepatuhan terhadap otoritas eksternal, tetapi juga pada kesadaran rasional manusia sendiri.

Berbeda dengan Jabariyah yang memandang manusia sepenuhnya berada di bawah kehendak mutlak Tuhan, Mu'tazilah menolak fatalisme karena dianggap dapat melahirkan sikap pasif dan menghilangkan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif Mu'tazilah, kebebasan manusia justru menjadi dasar bagi lahirnya peradaban, etika, dan perubahan sosial. Manusia didorong untuk bertindak aktif memperbaiki kehidupan karena mereka memiliki kemampuan nyata untuk mengubah keadaan.

Akan tetapi, kebebasan manusia dalam pemikiran Mu'tazilah bukan berarti manusia menjadi independen sepenuhnya dari Tuhan. Kebebasan tersebut tetap berada dalam kerangka kehendak ilahi karena Tuhanlah yang menciptakan manusia beserta kemampuan dan potensi rasionalnya. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk bebas, bukan sebagai robot yang bergerak tanpa kesadaran.

Dalam kajian filsafat modern, gagasan Mu'tazilah mengenai kebebasan manusia sering dipandang memiliki kemiripan dengan konsep *free will* dalam tradisi filsafat Barat. Namun demikian, kebebasan dalam Mu'tazilah tetap memiliki dimensi spiritual karena tujuan akhirnya adalah membangun manusia yang bertanggung jawab secara moral di hadapan Tuhan.

Pemikiran ini menjadi sangat relevan dalam konteks modern ketika masyarakat global menghadapi berbagai persoalan mengenai kebebasan individu, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial. Banyak sarjana Muslim kontemporer menilai bahwa gagasan Mu'tazilah mengenai kebebasan manusia dapat menjadi

dasar penting bagi pengembangan teologi Islam yang lebih progresif dan humanistik.

F. Al-Qur'an Makhluk atau Qadim

Perdebatan mengenai apakah Al-Qur'an bersifat makhluk atau qadim merupakan salah satu kontroversi teologis paling besar dan paling menentukan dalam sejarah Ilmu Kalam karena persoalan ini tidak hanya menyangkut status ontologis kitab suci, tetapi juga berkaitan langsung dengan konsep tauhid, sifat-sifat Tuhan, otoritas politik, dan batas hubungan antara akal serta wahyu dalam Islam.

Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, artinya diciptakan oleh Tuhan dan tidak bersifat abadi bersama zat-Nya. Pandangan ini lahir dari komitmen teologis mereka terhadap konsep tauhid yang sangat ketat. Menurut Mu'tazilah, jika Al-Qur'an dianggap qadim bersama Tuhan, maka akan muncul dua entitas yang sama-sama abadi, yaitu Tuhan dan Al-Qur'an. Keadaan tersebut dianggap berpotensi merusak prinsip keesaan Tuhan karena keabadian mutlak seharusnya hanya dimiliki oleh Tuhan semata.

Dalam perspektif Mu'tazilah, kalam Tuhan dipahami sebagai tindakan Tuhan, bukan sifat yang berdiri secara independen dan abadi bersama zat-Nya. Oleh sebab itu, ketika Tuhan berbicara melalui wahyu, maka wahyu tersebut merupakan ciptaan Tuhan yang hadir dalam ruang dan waktu tertentu sesuai kebutuhan manusia. Pandangan ini memperlihatkan upaya Mu'tazilah

menjaga transendensi Tuhan agar tidak terjebak dalam pluralitas sifat yang dianggap dapat mengurangi kemurnian tauhid.

Namun demikian, pandangan Mu'tazilah mendapat penolakan sangat keras dari kelompok tradisional, terutama dari Ahmad bin Hanbal yang menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat qadim dan bukan makhluk. Menurut kelompok tradisional, menyatakan Al-Qur'an sebagai makhluk dapat merendahkan kesucian wahyu dan membuka jalan bagi relativisasi otoritas kitab suci.

Kontroversi ini kemudian berkembang menjadi konflik politik besar pada masa Dinasti Abbasiyah, khususnya ketika Al-Ma'mun menjadikan doktrin Mu'tazilah sebagai ideologi resmi negara. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai *mihnah*, para ulama dipaksa menerima doktrin bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Mereka yang menolak mengalami tekanan politik, penjara, bahkan penyiksaan. Ahmad bin Hanbal menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan tersebut karena keteguhannya mempertahankan keyakinan tradisional.

Peristiwa mihnah meninggalkan dampak psikologis dan politik yang sangat besar dalam sejarah Islam. Banyak masyarakat Muslim mulai memandang Mu'tazilah sebagai kelompok yang menggunakan kekuasaan politik untuk memaksakan pandangan teologis mereka. Ketika kekuasaan Abbasiyah berubah arah pada masa Al-Mutawakkil, dukungan terhadap Mu'tazilah dihentikan dan posisi mereka perlahan melemah.

Meski demikian, perdebatan mengenai status Al-Qur'an sebenarnya mencerminkan kedalaman intelektual tradisi Islam

klasik. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa para teolog Muslim tidak hanya menerima ajaran agama secara sederhana, tetapi juga berusaha memahami implikasi filosofis dan metafisisnya secara mendalam.

Dalam konteks modern, sebagian sarjana melihat kontroversi ini bukan sekadar persoalan apakah Al-Qur'an makhluk atau qadim, tetapi sebagai simbol perdebatan lebih luas mengenai hubungan antara wahyu dan sejarah. Pertanyaan mengenai bagaimana wahyu dipahami dalam konteks sosial manusia masih terus menjadi diskursus penting dalam studi Islam kontemporer.

G. Masa Kejayaan Mu'tazilah

Puncak kejayaan Mu'tazilah terjadi pada masa Dinasti Abbasiyah, khususnya pada era pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tashim, dan Al-Watsiq. Pada periode ini, Mu'tazilah memperoleh dukungan politik penuh dari negara dan menjadi mazhab resmi pemerintahan.

Dukungan tersebut menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam berlangsung sangat pesat. Gerakan penerjemahan karya-karya Yunani berkembang besar-besaran di Baghdad melalui lembaga seperti Baitul Hikmah. Tradisi intelektual Islam mengalami kemajuan luar biasa dalam bidang logika, matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat.

Namun demikian, keterlibatan Mu'tazilah dalam kekuasaan politik justru menjadi salah satu penyebab kemundurannya. Kebijakan mihnah menimbulkan resistensi luas dari masyarakat dan ulama tradisional. Ketika kekuasaan Abbasiyah berubah arah

pada masa Al-Mutawakkil, dukungan terhadap Mu'tazilah dihentikan dan pengaruh politik mereka perlahan melemah.

Meskipun demikian, warisan intelektual Mu'tazilah tidak pernah benar-benar hilang. Banyak konsep rasional mereka tetap memengaruhi perkembangan teologi Sunni, filsafat Islam, bahkan pemikiran modern tentang hubungan agama dan rasionalitas.



BAB VII

ASY'ARIYAH

A. Biografi Abu Hasan al-Asy'ari

Kemunculan mazhab Asy'ariyah dalam sejarah intelektual Islam tidak dapat dilepaskan dari figur sentral yang menjadi fondasi utama pembentukan corak teologi Sunni klasik, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan 'Ali bin Isma'il bin Ishaq bin Salim bin Isma'il bin 'Abd Allah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Ia lahir di Basrah sekitar tahun 260 H/873 M, sebuah kota yang pada masa itu berkembang menjadi salah satu pusat peradaban ilmu pengetahuan Islam paling dinamis, terutama dalam bidang bahasa Arab, filsafat, fiqh, serta ilmu kalam. Lingkungan intelektual Basrah yang penuh dengan perdebatan rasional antara berbagai mazhab pemikiran, seperti Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, dan kelompok tradisionalis, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter pemikiran al-Asy'ari.

Secara genealogis, Abu Hasan al-Asy'ari memiliki hubungan nasab dengan sahabat Nabi Muhammad saw., yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Keterkaitan genealogis ini tidak hanya memberikan legitimasi sosial dalam masyarakat Muslim saat itu, tetapi juga memperkuat penerimaan terhadap otoritas intelektualnya di

kemudian hari. Sejak usia muda, al-Asy'ari dikenal memiliki kecerdasan yang tinggi dan minat besar terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang teologi dan argumentasi rasional. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat dengan pemikiran Mu'tazilah karena ayah tirinya, Abu 'Ali al-Jubba'i, merupakan salah satu tokoh besar Mu'tazilah di Basrah.

Di bawah bimbingan al-Jubba'i, al-Asy'ari mempelajari berbagai prinsip dasar teologi rasional Mu'tazilah, seperti konsep keadilan Tuhan ('adl), kebebasan manusia, penolakan terhadap sifat-sifat Tuhan yang dianggap berdiri di luar zat-Nya, serta doktrin al-wa'd wa al-wa'id. Penguasaan al-Asy'ari terhadap metodologi dialektika Mu'tazilah menjadikannya salah satu murid yang sangat menonjol. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia telah dipercaya untuk menggantikan gurunya dalam sejumlah majelis diskusi ilmiah.

Akan tetapi, perjalanan intelektual al-Asy'ari mengalami transformasi besar ketika ia mulai mempertanyakan sejumlah prinsip fundamental Mu'tazilah. Salah satu kisah paling terkenal yang sering dikutip dalam literatur klasik adalah perdebatan antara al-Asy'ari dan al-Jubba'i mengenai nasib tiga orang bersaudara: seorang mukmin saleh, seorang kafir, dan seorang anak kecil yang meninggal sebelum dewasa. Dalam kisah tersebut, al-Asy'ari mempertanyakan konsistensi konsep keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah. Ketika jawaban al-Jubba'i dianggap tidak memuaskan secara logis dan teologis, al-Asy'ari mulai mengalami krisis intelektual yang mendalam.

Perubahan orientasi pemikiran al-Asy'ari tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses kontemplasi panjang yang melibatkan pergulatan spiritual, intelektual, dan sosial. Dalam beberapa sumber klasik disebutkan bahwa ia mengasingkan diri selama beberapa waktu untuk merenungkan kembali dasar-dasar teologi yang selama ini diyakininya. Setelah melalui proses tersebut, al-Asy'ari secara terbuka menyatakan keluar dari Mu'tazilah dan menyampaikan kritik keras terhadap sejumlah ajaran rasionalis yang dianggap terlalu menempatkan akal di atas wahyu.

Transformasi intelektual al-Asy'ari menandai lahirnya suatu corak teologi baru yang kemudian dikenal sebagai Asy'ariyah. Mazhab ini berusaha mengambil posisi moderat antara pendekatan rasional Mu'tazilah dan pendekatan tekstual ekstrem yang dianut sebagian kelompok tradisional. Al-Asy'ari tidak menolak penggunaan akal secara mutlak, tetapi menempatkannya di bawah otoritas wahyu. Dalam pandangannya, akal memiliki fungsi penting untuk memahami dan membela ajaran agama, tetapi tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan oleh nash.

Dalam perjalanan intelektualnya, al-Asy'ari menulis banyak karya penting yang menjadi fondasi perkembangan teologi Sunni. Di antara karya-karyanya yang paling terkenal adalah al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah, Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin, serta al-Luma' fi al-Radd 'ala Ahl al-Zaygh wa al-Bida'. Karya-karya tersebut memperlihatkan kemampuan al-Asy'ari dalam memadukan argumentasi rasional dengan landasan tekstual yang kuat. Melalui pendekatan ini, ia berhasil membangun sistem

teologi yang tidak hanya defensif terhadap serangan kelompok rasionalis maupun filosofis, tetapi juga mampu menjadi kerangka ortodoksi Sunni selama berabad-abad.

Dalam konteks sejarah pemikiran Islam, kehadiran al-Asy'ari memiliki arti yang sangat penting karena ia berhasil mengubah arah perkembangan teologi Sunni dari sekadar pendekatan tradisional menuju suatu sistem pemikiran yang lebih sistematis dan argumentatif. Jika sebelumnya sebagian besar ulama tradisional hanya mengandalkan penerimaan literal terhadap teks, maka al-Asy'ari memperkenalkan metode argumentasi rasional sebagai alat untuk mempertahankan akidah Ahl al-Sunnah.

Selain itu, pengaruh al-Asy'ari juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik dan sosial dunia Islam pada masa Abbasiyah. Pada periode tersebut, konflik ideologis antara berbagai mazhab teologi sering kali berkaitan erat dengan dukungan politik penguasa. Ketika Mu'tazilah memperoleh dukungan resmi negara pada masa al-Ma'mun dan berlangsungnya mihnah, banyak ulama tradisional mengalami tekanan politik. Dalam konteks inilah, munculnya al-Asy'ari menjadi titik penting bagi rekonstruksi otoritas Sunni yang lebih moderat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan intelektual.

Abu Hasan al-Asy'ari wafat di Baghdad sekitar tahun 324 H/936 M. Namun, pengaruh pemikirannya terus berkembang melalui murid-murid dan pengikutnya, seperti al-Baqillani, al-Juwaini, al-Ghazali, Fakhruddin al-Razi, hingga al-Sanusi. Melalui tokoh-tokoh tersebut, Asy'ariyah berkembang menjadi mazhab teologi dominan di sebagian besar wilayah dunia Islam Sunni,

termasuk di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan Nusantara.

Dengan demikian, biografi Abu Hasan al-Asy'ari tidak hanya merepresentasikan perjalanan hidup seorang ulama teologi, melainkan juga mencerminkan dinamika besar dalam sejarah pemikiran Islam klasik, terutama mengenai hubungan antara akal dan wahyu, otoritas tradisi, serta upaya menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan ortodoksi agama.

B. Reaksi terhadap Mu'tazilah

Kemunculan Asy'ariyah pada hakikatnya merupakan bentuk reaksi intelektual terhadap dominasi pemikiran Mu'tazilah yang berkembang kuat dalam dunia Islam pada abad ketiga Hijriah. Reaksi tersebut tidak sekadar berbentuk penolakan emosional terhadap rasionalisme, melainkan merupakan upaya sistematis untuk merekonstruksi teologi Sunni dengan tetap menggunakan perangkat argumentasi rasional, namun dalam kerangka epistemologi yang lebih subordinatif terhadap wahyu.

Mu'tazilah muncul sebagai kelompok teologi yang sangat menekankan supremasi akal dalam memahami agama. Dalam pandangan mereka, akal manusia memiliki kemampuan independen untuk mengetahui baik dan buruk bahkan tanpa bantuan wahyu. Konsep ini membawa implikasi besar terhadap berbagai persoalan teologi, seperti keadilan Tuhan, kebebasan manusia, status pelaku dosa besar, dan sifat-sifat Tuhan.

Asy'ariyah memandang bahwa pendekatan Mu'tazilah telah melampaui batas sehingga berpotensi mereduksi kemahakuasaan

Tuhan. Salah satu kritik utama al-Asy'ari terhadap Mu'tazilah adalah pandangan mereka mengenai kewajiban Tuhan untuk berbuat yang terbaik bagi manusia. Menurut Mu'tazilah, Tuhan secara rasional wajib bertindak adil dan tidak mungkin melakukan sesuatu yang dianggap buruk oleh akal manusia. Bagi al-Asy'ari, konsep tersebut justru membatasi kekuasaan absolut Tuhan.

Asy'ariyah menegaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan adalah baik semata-mata karena berasal dari kehendak-Nya, bukan karena tunduk pada standar moral eksternal yang dapat dipahami akal manusia. Dengan demikian, standar kebaikan bukanlah akal manusia, melainkan kehendak Tuhan sendiri. Dalam perspektif ini, kekuasaan Tuhan dipahami secara absolut dan tidak dibatasi oleh kategori-kategori rasional yang dibangun manusia.

Reaksi Asy'ariyah terhadap Mu'tazilah juga terlihat jelas dalam persoalan sifat-sifat Tuhan. Mu'tazilah menolak keberadaan sifat-sifat Tuhan yang berdiri di luar zat-Nya karena dianggap dapat menimbulkan pluralitas dalam keesaan Tuhan. Sebaliknya, Asy'ariyah menerima adanya sifat-sifat Tuhan seperti ilmu, qudrah, iradah, sama', bashar, dan kalam, tanpa menyerupakan Tuhan dengan makhluk.

Dalam konteks epistemologi, Asy'ariyah mengembangkan pendekatan yang menempatkan wahyu sebagai sumber utama pengetahuan agama. Akal tetap memiliki fungsi penting, tetapi hanya sebagai alat bantu untuk memahami dan membela wahyu. Oleh karena itu, Asy'ariyah sering dipandang sebagai bentuk sintesis antara rasionalisme dan tradisionalisme.

Penolakan terhadap Mu'tazilah juga dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial. Setelah berakhirnya mihnah, masyarakat Muslim mengalami trauma terhadap penggunaan kekuasaan politik untuk memaksakan doktrin teologi tertentu. Asy'ariyah kemudian tampil sebagai alternatif yang lebih moderat dan mampu menjembatani kebutuhan rasionalitas tanpa harus mengorbankan otoritas tradisi.

Dalam perkembangan berikutnya, Asy'ariyah berhasil memperoleh dukungan luas dari kalangan ulama Sunni, terutama melalui institusi pendidikan seperti madrasah Nizamiyah. Dukungan politik dari Dinasti Saljuk juga mempercepat penyebaran Asy'ariyah sebagai teologi resmi Sunni. Tokoh-tokoh besar seperti Imam al-Ghazali kemudian memperkuat posisi Asy'ariyah melalui karya-karya monumental yang mengintegrasikan teologi, filsafat, tasawuf, dan fiqh.

Meskipun demikian, hubungan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah tidak selalu bersifat antagonistik secara total. Dalam banyak aspek metodologis, Asy'ariyah tetap menggunakan perangkat dialektika rasional yang diwarisi dari Mu'tazilah. Oleh karena itu, sebagian sarjana modern memandang Asy'ariyah bukan sebagai penolakan mutlak terhadap rasionalisme, melainkan sebagai bentuk moderasi terhadap penggunaan akal dalam agama.

Dalam perspektif sejarah intelektual Islam, reaksi Asy'ariyah terhadap Mu'tazilah merupakan bagian dari proses dialektika yang melahirkan kematangan tradisi teologi Islam. Perdebatan antara kedua mazhab tersebut memperkaya khazanah pemikiran Islam dan menunjukkan bahwa tradisi intelektual Muslim memiliki

kapasitas besar untuk melakukan refleksi kritis terhadap persoalan-persoalan mendasar tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta.

C. Konsep Sifat-Sifat Allah

Salah satu tema paling sentral dalam teologi Asy'ariyah adalah pembahasan mengenai sifat-sifat Allah. Persoalan ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan konsep tauhid dan cara memahami hubungan antara zat Tuhan dengan sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Dalam sejarah ilmu kalam, perdebatan mengenai sifat-sifat Allah sering kali menjadi titik utama konflik antara kelompok rasionalis dan tradisional.

Asy'ariyah menegaskan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang azali dan kekal, seperti ilmu, qudrah, iradah, hayat, sama', bashar, dan kalam. Sifat-sifat tersebut bukanlah identik dengan zat Allah, tetapi juga tidak terpisah dari-Nya. Posisi ini dirumuskan untuk menjaga keseimbangan antara pengakuan terhadap kesempurnaan Tuhan dan penolakan terhadap konsep pluralitas yang dapat merusak prinsip tauhid.

Berbeda dengan Mu'tazilah yang menolak keberadaan sifat-sifat terpisah demi menjaga kemurnian tauhid, Asy'ariyah berpendapat bahwa penolakan total terhadap sifat-sifat justru dapat menghilangkan makna kesempurnaan Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an. Menurut Asy'ariyah, penyebutan sifat-sifat Tuhan dalam wahyu tidak boleh ditakwilkan secara berlebihan hingga kehilangan makna aslinya.

Dalam memahami sifat-sifat Tuhan yang bersifat antropomorfis, seperti tangan, wajah, atau bersemayam di atas

Arasy, Asy'ariyah mengambil jalan tengah. Mereka menerima teks tersebut sebagaimana adanya tanpa menyerupakan Tuhan dengan makhluk dan tanpa menjelaskan hakikatnya secara detail. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip *bila kayf*, yaitu menerima tanpa mempertanyakan bagaimana bentuknya.

Konsep sifat-sifat Allah dalam Asy'ariyah juga berkaitan erat dengan pembahasan mengenai kalam Allah. Asy'ariyah berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan kalam Allah yang azali dan tidak diciptakan. Namun, bentuk lafaz dan suara yang dibaca manusia bersifat baru. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga keyakinan tentang keazalian firman Tuhan tanpa mengingkari realitas material mushaf dan bacaan manusia.

Di samping itu, Asy'ariyah menekankan bahwa akal manusia memiliki keterbatasan dalam memahami hakikat Tuhan secara sempurna. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sifat-sifat Allah harus selalu berada dalam kerangka *tanzih*, yaitu menyucikan Tuhan dari segala bentuk keserupaan dengan makhluk.

Konsep ini memiliki dampak besar terhadap perkembangan spiritualitas Islam. Dengan menegaskan kesempurnaan dan kemahakuasaan Tuhan, Asy'ariyah membangun fondasi religius yang menumbuhkan rasa tunduk, takut, dan harap kepada Allah. Pada saat yang sama, pengakuan terhadap sifat rahmat, ilmu, dan hikmah Tuhan memberikan dasar bagi optimisme spiritual dalam kehidupan manusia.

Dalam perkembangan sejarahnya, konsep sifat-sifat Allah ala Asy'ariyah menjadi fondasi utama teologi Sunni klasik. Banyak ulama besar kemudian mengembangkan pembahasan ini secara

lebih sistematis, termasuk al-Baqillani, al-Juwaini, dan Fakhruddin al-Razi. Bahkan dalam tradisi pesantren di Nusantara, pembahasan sifat dua puluh yang populer dalam kitab-kitab akidah sangat dipengaruhi oleh kerangka teologi Asy'ariyah.

D. Teori Kasb

Teori kasb merupakan salah satu kontribusi paling khas dan kompleks dari teologi Asy'ariyah. Konsep ini lahir sebagai upaya untuk menjembatani dua kutub ekstrem dalam perdebatan mengenai hubungan antara kehendak Tuhan dan perbuatan manusia, yaitu Jabariyah yang sangat fatalistik dan Mu'tazilah yang sangat menekankan kebebasan manusia.

Dalam pandangan Asy'ariyah, seluruh perbuatan pada hakikatnya diciptakan oleh Allah karena tidak ada pencipta selain Tuhan. Namun, manusia tetap memiliki peran dalam memperoleh atau mengakuisisi perbuatan tersebut melalui kehendak dan kemampuan yang dianugerahkan Tuhan. Proses perolehan inilah yang disebut sebagai kasb.

Melalui teori kasb, Asy'ariyah berusaha mempertahankan dua prinsip sekaligus: pertama, kemahakuasaan absolut Tuhan; kedua, tanggung jawab moral manusia. Jika seluruh perbuatan manusia diciptakan Tuhan, maka muncul pertanyaan mengenai keadilan dalam pemberian pahala dan hukuman. Sebaliknya, jika manusia menciptakan perbuatannya sendiri sebagaimana pandangan Mu'tazilah, maka hal itu dianggap mengurangi kekuasaan Tuhan.

Teori kasb mencoba menghindari kedua problem tersebut dengan menyatakan bahwa Allah menciptakan kemampuan,

kehendak, dan tindakan manusia pada saat yang bersamaan. Manusia kemudian “mengakuisisi” tindakan itu sehingga ia tetap layak menerima konsekuensi moral atas perbuatannya.

Meskipun demikian, teori kasb sering mendapat kritik karena dianggap tidak sepenuhnya berhasil menjelaskan hubungan antara kehendak manusia dan penciptaan Tuhan. Sebagian sarjana menilai bahwa konsep tersebut masih cenderung dekat dengan determinisme. Namun, para pendukung Asy‘ariyah berargumen bahwa keterbatasan akal manusia memang membuat hubungan antara kehendak ilahi dan kebebasan manusia tidak dapat dipahami secara sempurna.

Dalam perspektif filosofis, teori kasb menunjukkan upaya serius teologi Islam klasik untuk mengatasi problem teodise dan kebebasan manusia. Perdebatan ini memiliki kemiripan dengan diskursus dalam filsafat Barat mengenai predestinasi, kehendak bebas, dan tanggung jawab moral.

Selain memiliki dimensi teologis, teori kasb juga memiliki implikasi sosial dan spiritual. Dalam kehidupan keagamaan, konsep ini melahirkan keseimbangan antara tawakal kepada Tuhan dan tanggung jawab manusia dalam berusaha. Manusia didorong untuk tetap aktif melakukan kebaikan karena ia bertanggung jawab atas pilihannya, meskipun pada akhirnya seluruh kekuasaan tetap berada di tangan Allah.

Dalam konteks modern, teori kasb sering dikaji ulang sebagai bagian dari usaha memahami hubungan antara agama dan kebebasan manusia. Sejumlah sarjana kontemporer mencoba

menafsirkan ulang konsep ini agar lebih relevan dengan perkembangan filsafat modern dan ilmu sosial.

E. Iman dan Amal

Pembahasan mengenai hubungan antara iman dan amal merupakan salah satu tema penting dalam teologi Islam klasik. Asy'ariyah mengambil posisi moderat dalam persoalan ini dengan menegaskan bahwa iman pada dasarnya adalah membenaran dalam hati terhadap ajaran yang dibawa Nabi Muhammad saw., sedangkan amal merupakan konsekuensi dan penyempurna dari iman.

Dalam pandangan Asy'ariyah, seseorang yang melakukan dosa besar tidak otomatis keluar dari Islam selama masih memiliki keyakinan dalam hati. Posisi ini berbeda dengan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan berbeda pula dengan Mu'tazilah yang menempatkan pelaku dosa besar pada posisi antara mukmin dan kafir.

Asy'ariyah menegaskan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kualitas ketaatan seseorang. Namun, inti keimanan tetap berada pada aspek tasdiq atau membenaran hati. Dengan demikian, amal bukanlah unsur esensial yang menentukan keberadaan iman, tetapi memiliki hubungan erat sebagai manifestasi keimanan.

Pandangan ini memiliki dampak besar terhadap perkembangan tradisi Sunni yang lebih inklusif dan moderat. Dalam konteks sosial, pendekatan Asy'ariyah membantu menjaga stabilitas umat Islam dengan menghindari kecenderungan mudah

mengkafirkan sesama Muslim hanya karena dosa atau perbedaan praktik keagamaan.

Selain itu, konsep iman dan amal dalam Asy'ariyah juga berkaitan dengan pemahaman mengenai rahmat Tuhan. Asy'ariyah menekankan bahwa keselamatan manusia pada akhirnya bergantung pada rahmat Allah, bukan semata-mata amal manusia. Hal ini melahirkan keseimbangan antara rasa takut terhadap hukuman Tuhan dan harapan terhadap kasih sayang-Nya.

Dalam perkembangan spiritualitas Islam, pandangan Asy'ariyah mengenai iman dan amal sangat memengaruhi tradisi tasawuf Sunni. Banyak tokoh sufi mengintegrasikan teologi Asy'ariyah dengan praktik spiritual untuk membangun kehidupan religius yang seimbang antara syariat, akidah, dan akhlak.

F. Pengaruh Asy'ariyah di Dunia Islam

Pengaruh Asy'ariyah dalam sejarah Islam sangat luas dan mendalam. Sejak abad kelima Hijriah, mazhab ini berkembang menjadi representasi utama teologi Sunni di berbagai wilayah dunia Islam. Penyebarannya tidak hanya berlangsung melalui karya-karya ilmiah, tetapi juga melalui institusi pendidikan, dukungan politik, dan jaringan ulama.

Salah satu faktor utama keberhasilan Asy'ariyah adalah kemampuannya membangun sintesis antara rasionalitas dan ortodoksi. Dalam situasi ketika dunia Islam menghadapi tantangan filsafat Yunani, perdebatan internal teologi, serta dinamika politik

yang kompleks, Asy'ariyah menawarkan kerangka pemikiran yang relatif moderat dan adaptif.

Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk pada abad ke-11 M memainkan peran besar dalam penyebaran Asy'ariyah. Melalui lembaga ini, ajaran Asy'ariyah diajarkan secara sistematis kepada generasi ulama Sunni. Tokoh-tokoh seperti Imam al-Haramain al-Juwaini dan Imam al-Ghazali menjadi figur penting dalam memperkuat legitimasi intelektual mazhab ini.

Imam al-Ghazali secara khusus memiliki peran monumental dalam memperluas pengaruh Asy'ariyah. Melalui karya-karyanya, ia berhasil mengintegrasikan teologi Asy'ariyah dengan fiqh Syafi'i dan tasawuf Sunni. Integrasi ini menciptakan sintesis besar yang kemudian menjadi fondasi tradisi keilmuan Islam klasik.

Di Afrika Utara dan Andalusia, Asy'ariyah berkembang melalui dukungan ulama Malikiyah. Sementara itu, di wilayah Timur seperti Persia, Asia Tengah, India, dan Nusantara, Asy'ariyah banyak berkembang melalui jaringan pesantren, madrasah, dan tarekat sufi.

Di Indonesia, pengaruh Asy'ariyah sangat kuat dalam tradisi pesantren dan organisasi Islam tradisional. Kitab-kitab akidah seperti Umm al-Barahin, Jawharah al-Tawhid, dan Aqidah al-'Awwam menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan Islam tradisional. Bahkan hingga saat ini, mayoritas umat Islam tradisional di Indonesia menganut teologi Asy'ariyah meskipun tidak selalu menyadarinya secara formal.

Dalam konteks kontemporer, Asy'ariyah masih memiliki relevansi penting karena pendekatannya yang moderat dan adaptif.

Banyak sarjana Muslim modern melihat Asy'ariyah sebagai model teologi yang mampu menjaga keseimbangan antara teks dan rasio, antara tradisi dan modernitas, serta antara ortodoksi dan toleransi.

Namun demikian, Asy'ariyah juga menghadapi kritik dari berbagai pihak. Sebagian kelompok salafi menilai bahwa penggunaan ilmu kalam dalam Asy'ariyah merupakan bentuk inovasi yang tidak dikenal pada masa generasi awal Islam. Sebaliknya, sebagian pemikir modernis menganggap Asy'ariyah terlalu defensif terhadap rasionalitas dan kurang memberi ruang bagi kebebasan berpikir.

Terlepas dari berbagai kritik tersebut, tidak dapat disangkal bahwa Asy'ariyah merupakan salah satu warisan intelektual paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Mazhab ini tidak hanya membentuk kerangka akidah Sunni, tetapi juga memengaruhi perkembangan fiqh, tasawuf, filsafat, pendidikan, dan budaya Islam secara luas.

Dengan demikian, studi mengenai Asy'ariyah bukan sekadar pembahasan tentang satu mazhab teologi klasik, melainkan juga kajian tentang bagaimana umat Islam sepanjang sejarah berusaha memahami hubungan antara wahyu, akal, manusia, dan Tuhan dalam kerangka peradaban yang terus berkembang.

Asy'ariyah merupakan salah satu mazhab teologi paling penting dalam sejarah pemikiran Islam Sunni. Kemunculannya melalui figur Abu Hasan al-Asy'ari menandai fase baru dalam perkembangan ilmu kalam, yaitu usaha untuk memadukan penggunaan rasio dengan komitmen kuat terhadap wahyu dan tradisi Sunni.

Sebagai reaksi terhadap Mu'tazilah, Asy'ariyah tidak menolak akal secara total, tetapi menempatkannya dalam posisi subordinatif terhadap wahyu. Pendekatan ini memungkinkan Asy'ariyah membangun sistem teologi yang argumentatif sekaligus tetap menjaga ortodoksi agama.

Konsep-konsep utama seperti sifat-sifat Allah, teori kasb, serta hubungan iman dan amal menunjukkan usaha Asy'ariyah dalam menjawab persoalan-persoalan mendasar tentang Tuhan dan manusia. Melalui pendekatan moderatnya, Asy'ariyah berhasil menjadi fondasi utama teologi Sunni di berbagai wilayah dunia Islam.

Pengaruh Asy'ariyah tidak hanya terbatas pada bidang teologi, tetapi juga meluas ke dalam tradisi pendidikan, tasawuf, fiqh, dan kehidupan sosial umat Islam. Hingga masa kontemporer, warisan intelektual Asy'ariyah tetap menjadi bagian penting dalam diskursus Islam modern, terutama dalam upaya menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan.



BAB VIII

MATURIDIYAH

A. Abu Mansur al-Maturidi

Pembahasan mengenai Maturidiyah sebagai salah satu aliran teologi Islam klasik tidak dapat dilepaskan dari sosok sentral yang menjadi fondasi intelektualnya, yakni Abu Mansur al-Maturidi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Abu Mansur al-Maturidi al-Samarqandi, seorang teolog besar yang lahir di wilayah Maturid, dekat Samarkand, kawasan Transoxiana, yang pada masa itu menjadi salah satu pusat perkembangan intelektual dunia Islam. Kehidupan al-Maturidi berlangsung pada abad ke-9 hingga awal abad ke-10 Masehi, suatu periode yang ditandai oleh berkembangnya perdebatan teologis, filsafat, dan politik di kalangan umat Islam.

Al-Maturidi tumbuh dalam lingkungan intelektual yang sangat dinamis. Kawasan Transoxiana pada masa tersebut dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan yang mempertemukan berbagai tradisi pemikiran, baik Islam maupun non-Islam. Interaksi antara tradisi rasionalisme Yunani, filsafat Persia, dan pemikiran Islam memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan metode

berpikir para ulama di wilayah tersebut. Dalam konteks inilah al-Maturidi mengembangkan pendekatan teologi yang berusaha memadukan antara penggunaan akal dan otoritas wahyu.

Sebagai seorang ulama yang hidup di tengah perdebatan sengit antara kelompok rasionalis Mu'tazilah dan kelompok tekstualis ekstrem, al-Maturidi mengambil posisi yang moderat. Ia berusaha mempertahankan kemurnian akidah Islam sekaligus memberikan ruang yang luas bagi penggunaan akal dalam memahami persoalan-persoalan keagamaan. Pendekatan tersebut menjadikan Maturidiyah dikenal sebagai salah satu mazhab teologi yang menekankan harmoni antara rasio dan wahyu.

Dalam sejarah pemikiran Islam, al-Maturidi sering disejajarkan dengan Abu al-Hasan al-Asy'ari sebagai tokoh besar yang mewakili arus teologi Sunni. Meskipun keduanya memiliki banyak persamaan dalam upaya membela akidah Ahlussunnah wal Jama'ah, al-Maturidi mengembangkan corak pemikiran yang memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam persoalan epistemologi, kebebasan manusia, dan fungsi akal.

Karya-karya al-Maturidi memainkan peranan penting dalam pembentukan sistem teologi Islam Sunni. Salah satu karya monumentalnya adalah *Kitab al-Tauhid*, yang membahas persoalan ketuhanan, sifat-sifat Allah, kenabian, serta hubungan antara akal dan wahyu secara mendalam. Selain itu, ia juga menulis *Ta'wilat Ahl al-Sunnah*, sebuah karya tafsir yang menunjukkan kecenderungannya dalam menggunakan pendekatan rasional dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

Pemikiran al-Maturidi memperlihatkan usaha yang sangat serius dalam membangun argumentasi rasional untuk mempertahankan keimanan. Ia menolak pendekatan literalistik yang mengabaikan akal, tetapi pada saat yang sama juga mengkritik rasionalisme ekstrem Mu'tazilah yang dianggap terlalu mendewakan kemampuan manusia. Dalam pandangannya, akal memang memiliki peran penting untuk mengetahui keberadaan Tuhan dan membedakan antara kebaikan dan keburukan, tetapi akal tetap membutuhkan bimbingan wahyu agar tidak tersesat.

Salah satu kontribusi penting al-Maturidi adalah pengembangan konsep tanggung jawab moral manusia. Ia menegaskan bahwa manusia memiliki kemampuan memilih dan bertindak, sehingga layak menerima pahala maupun hukuman atas perbuatannya. Pandangan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kekuasaan mutlak Tuhan dan kebebasan relatif manusia.

Dalam konteks sosial-politik, pemikiran al-Maturidi juga mencerminkan upaya menjaga stabilitas umat Islam di tengah konflik ideologis yang berkembang pada masanya. Dengan pendekatan moderat dan argumentatif, ia berhasil menghadirkan suatu sistem teologi yang dapat diterima oleh berbagai kalangan, khususnya di wilayah Asia Tengah dan kemudian berkembang luas di dunia Islam.

Kajian akademik modern menunjukkan bahwa pemikiran al-Maturidi memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks masyarakat kontemporer. Pendekatannya yang menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu dianggap mampu menjadi alternatif dalam menghadapi kecenderungan ekstremisme agama

maupun sekularisme rasionalistik. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa tradisi Maturidiyah memiliki kontribusi besar dalam pengembangan moderasi beragama dan toleransi intelektual dalam Islam.

Menurut penelitian Mohammad Hidayatullah (2023), al-Maturidi berhasil membangun suatu paradigma teologi rasional yang tidak melepaskan diri dari landasan wahyu, sehingga mampu menghadirkan sintesis antara rasionalitas dan spiritualitas dalam tradisi pemikiran Islam Sunni.

B. Persamaan dan Perbedaan dengan Asy'ariyah

Maturidiyah dan Asy'ariyah merupakan dua mazhab teologi besar dalam tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam sejarah intelektual Islam. Kedua mazhab tersebut muncul sebagai respons terhadap berkembangnya berbagai aliran teologi yang dianggap menyimpang, khususnya Mu'tazilah dan kelompok antropomorfis. Meskipun memiliki tujuan yang sama dalam mempertahankan akidah Sunni, Maturidiyah dan Asy'ariyah menunjukkan sejumlah persamaan sekaligus perbedaan yang cukup mendasar.

Persamaan utama antara Maturidiyah dan Asy'ariyah terletak pada komitmen keduanya untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar akidah Islam Sunni. Kedua mazhab sama-sama menolak paham tajsim yang menyerupakan Allah dengan makhluk, menolak pandangan ekstrem Mu'tazilah mengenai kebebasan manusia, serta menegaskan keberadaan sifat-sifat Allah. Selain itu,

keduanya juga sama-sama menerima penggunaan metode rasional dalam menjelaskan persoalan akidah.

Baik al-Maturidi maupun al-Asy'ari sama-sama berupaya membangun argumentasi logis guna menghadapi tantangan intelektual pada zamannya. Mereka menggunakan ilmu kalam sebagai sarana untuk mempertahankan keyakinan Islam dari kritik filsafat maupun pengaruh pemikiran asing. Oleh sebab itu, kedua mazhab tersebut sering dianggap sebagai representasi utama teologi Sunni klasik.

Namun demikian, di balik persamaan tersebut terdapat sejumlah perbedaan metodologis yang cukup signifikan. Salah satu perbedaan utama berkaitan dengan posisi akal dalam memahami agama. Maturidiyah memberikan ruang yang lebih luas kepada akal dibandingkan Asy'ariyah. Dalam pandangan Maturidiyah, manusia dapat mengetahui keberadaan Tuhan dan memahami sebagian nilai moral melalui akal meskipun belum menerima wahyu. Sementara itu, Asy'ariyah lebih menekankan ketergantungan manusia terhadap wahyu dalam menentukan baik dan buruk.

Perbedaan lain terlihat dalam persoalan perbuatan manusia. Maturidiyah cenderung memberikan porsi lebih besar terhadap kebebasan manusia dibandingkan Asy'ariyah. Menurut Maturidiyah, manusia memiliki kemampuan nyata untuk memilih dan melakukan tindakan, walaupun seluruh kemampuan tersebut tetap berada dalam kekuasaan Allah. Sebaliknya, Asy'ariyah lebih menekankan konsep *kasb* atau perolehan, di mana tindakan

manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah dan manusia hanya “memperoleh” tindakan tersebut.

Dalam persoalan iman, Maturidiyah juga memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dari Asy‘ariyah. Maturidiyah menekankan bahwa iman pada dasarnya adalah membenaran hati dan tidak bertambah maupun berkurang, sedangkan sebagian ulama Asy‘ariyah berpendapat bahwa iman dapat mengalami peningkatan dan penurunan sesuai kualitas amal seseorang.

Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam memahami keadilan Tuhan. Maturidiyah lebih menekankan bahwa Allah bertindak berdasarkan hikmah dan keadilan yang dapat dipahami secara rasional. Sementara itu, Asy‘ariyah lebih menegaskan bahwa segala tindakan Allah sepenuhnya berada di luar jangkauan penilaian manusia. Apa pun yang dilakukan Allah dianggap adil karena berasal dari kehendak-Nya yang mutlak.

Meskipun terdapat berbagai perbedaan, hubungan antara Maturidiyah dan Asy‘ariyah secara umum tetap berada dalam kerangka Ahlussunnah wal Jama‘ah. Kedua mazhab tersebut tidak saling mengafirkan, melainkan lebih menunjukkan perbedaan dalam metode argumentasi dan penekanan intelektual. Dalam sejarah Islam, keduanya justru saling melengkapi dan menjadi pilar utama perkembangan teologi Sunni di berbagai wilayah.

Dalam kajian modern, banyak akademisi melihat bahwa perbedaan antara Maturidiyah dan Asy‘ariyah sesungguhnya menunjukkan kekayaan intelektual dalam tradisi Islam. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa Islam memiliki ruang dialog yang

luas dalam persoalan teologi selama tetap berada dalam prinsip-prinsip dasar akidah.

C. Peran Akal

Salah satu ciri paling menonjol dari pemikiran Maturidiyah adalah penekanannya terhadap pentingnya akal dalam memahami agama. Berbeda dengan sebagian kelompok teologi yang sangat menekankan pendekatan tekstual, Maturidiyah memberikan posisi yang cukup tinggi kepada rasio sebagai instrumen untuk memahami keberadaan Tuhan, nilai moral, dan tanggung jawab manusia.

Bagi al-Maturidi, akal merupakan anugerah Tuhan yang memiliki fungsi fundamental dalam kehidupan manusia. Melalui akal, manusia dapat mengenali keberadaan Allah, memahami tanda-tanda kekuasaan-Nya di alam semesta, serta membedakan antara kebaikan dan keburukan. Oleh sebab itu, penggunaan akal tidak dipandang sebagai ancaman terhadap iman, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat keyakinan.

Pemikiran ini lahir dalam konteks perdebatan panjang antara kaum rasionalis dan tekstualis dalam sejarah Islam klasik. Al-Maturidi berusaha mengambil jalan tengah dengan mengakui kemampuan akal, tetapi tetap menempatkan wahyu sebagai sumber utama kebenaran. Dalam pandangannya, akal memiliki keterbatasan tertentu sehingga tetap membutuhkan petunjuk wahyu agar tidak terjebak dalam kesalahan.

Maturidiyah meyakini bahwa manusia secara rasional dapat mengetahui adanya Tuhan bahkan sebelum datangnya wahyu. Alam semesta dipandang sebagai bukti rasional tentang keberadaan Sang Pencipta. Dengan demikian, seseorang dianggap memiliki tanggung jawab moral untuk mencari kebenaran melalui penggunaan akalanya.

Selain itu, Maturidiyah juga berpandangan bahwa akal dapat memahami sebagian nilai etika secara mandiri. Misalnya, manusia dapat mengetahui bahwa keadilan adalah sesuatu yang baik dan kezaliman adalah sesuatu yang buruk melalui pertimbangan rasional. Akan tetapi, wahyu tetap diperlukan untuk memberikan penjelasan yang lebih sempurna mengenai hukum-hukum agama dan tujuan hidup manusia.

Pendekatan Maturidiyah terhadap akal menunjukkan adanya penghargaan tinggi terhadap kemampuan intelektual manusia. Dalam perspektif ini, agama tidak dipahami sebagai sesuatu yang bertentangan dengan rasionalitas, melainkan sejalan dengan fitrah berpikir manusia. Oleh sebab itu, Maturidiyah sering dipandang sebagai salah satu mazhab teologi yang memiliki kecenderungan rasional moderat.

Dalam konteks modern, gagasan Maturidiyah tentang akal memiliki relevansi yang sangat besar. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, pendekatan yang menghargai rasionalitas menjadi sangat penting untuk membangun dialog antara agama dan sains. Pemikiran Maturidiyah menunjukkan bahwa Islam memiliki tradisi

intelektual yang terbuka terhadap penggunaan nalar tanpa harus kehilangan dimensi spiritualnya.

Banyak akademisi kontemporer menilai bahwa warisan intelektual Maturidiyah dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun peradaban Islam yang moderat dan inklusif. Dengan menempatkan akal sebagai mitra wahyu, Maturidiyah berhasil menghadirkan suatu model keberagamaan yang tidak anti-intelektual dan tidak pula terjebak dalam sekularisme ekstrem.

Penelitian terbaru dalam bidang studi Islam menunjukkan bahwa tradisi Maturidiyah memiliki kontribusi signifikan terhadap perkembangan filsafat Islam, pendidikan, dan pemikiran sosial-politik di dunia Muslim. Oleh sebab itu, kajian mengenai peran akal dalam Maturidiyah tetap relevan untuk memahami dinamika pemikiran Islam kontemporer.

D. Konsep Takdir

Konsep takdir merupakan salah satu tema sentral dalam diskursus teologi Islam yang juga mendapat perhatian besar dalam pemikiran Maturidiyah. Persoalan ini berkaitan dengan hubungan antara kekuasaan Tuhan dan kebebasan manusia, suatu isu yang sejak awal telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama.

Maturidiyah mengambil posisi moderat dalam memahami takdir. Mereka menolak pandangan Jabariyah yang menganggap manusia sepenuhnya tidak memiliki kebebasan, sekaligus menolak pandangan Qadariyah yang memberikan kebebasan mutlak kepada manusia. Menurut Maturidiyah, manusia memang memiliki

kemampuan memilih dan bertindak, tetapi kemampuan tersebut tetap berada dalam lingkup kehendak Allah.

Dalam pandangan al-Maturidi, Allah menciptakan potensi dan kemampuan dalam diri manusia, sedangkan manusia menggunakan kemampuan tersebut untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dengan demikian, manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya karena ia memiliki kehendak dan pilihan.

Konsep ini menunjukkan adanya keseimbangan antara takdir ilahi dan tanggung jawab manusia. Maturidiyah berusaha menghindari determinisme absolut yang dapat menghilangkan makna moralitas, sekaligus menghindari kebebasan total yang dapat mengurangi kekuasaan Tuhan.

Menurut Maturidiyah, keadilan Tuhan menuntut adanya tanggung jawab manusia atas tindakannya. Tidak mungkin Allah memberikan pahala atau hukuman kepada manusia apabila manusia sama sekali tidak memiliki kebebasan memilih. Oleh sebab itu, kebebasan relatif manusia menjadi bagian penting dalam konsep keadilan ilahi.

Maturidiyah juga memandang bahwa takdir tidak boleh dijadikan alasan untuk bersikap pasif dan menyerah terhadap keadaan. Manusia tetap diwajibkan berusaha, bekerja, dan melakukan kebaikan karena ia memiliki kemampuan untuk menentukan pilihannya. Dalam konteks ini, takdir dipahami bukan sebagai penafian terhadap ikhtiar, melainkan sebagai pengakuan bahwa seluruh realitas tetap berada dalam pengetahuan dan kehendak Allah.

Pendekatan Maturidiyah terhadap takdir memperlihatkan dimensi etis yang sangat kuat. Dengan mengakui kebebasan manusia secara terbatas, Maturidiyah menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial, moral, dan spiritual. Pandangan ini memberikan dorongan kepada manusia untuk aktif memperbaiki kehidupan tanpa kehilangan kesadaran akan ketergantungannya kepada Tuhan.

Dalam konteks modern, konsep takdir Maturidiyah memiliki relevansi yang besar dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Pemahaman yang seimbang antara takdir dan ikhtiar dapat mendorong masyarakat untuk lebih optimis, produktif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Kajian akademik terbaru juga menunjukkan bahwa konsep kebebasan manusia dalam Maturidiyah memiliki kedekatan tertentu dengan gagasan etika modern mengenai tanggung jawab individual. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran klasik Islam sesungguhnya memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan dalam menjawab problematika kontemporer.

E. Penyebaran Maturidiyah

Maturidiyah berkembang menjadi salah satu mazhab teologi Sunni terbesar dalam sejarah Islam. Penyebarannya tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tengah, tempat kelahirannya, tetapi juga meluas ke berbagai wilayah dunia Islam melalui jaringan pendidikan, politik, dan dakwah.

Pada masa awal perkembangannya, Maturidiyah memperoleh dukungan kuat dari masyarakat Transoxiana dan para ulama

mazhab Hanafi. Kedekatan antara Maturidiyah dan mazhab Hanafi menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat penyebarannya. Banyak ulama Hanafi menerima pendekatan teologi Maturidiyah karena dianggap sejalan dengan tradisi rasional yang berkembang dalam mazhab tersebut.

Penyebaran Maturidiyah semakin meluas ketika Dinasti Seljuk dan kemudian Kesultanan Utsmaniyah menjadikan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara. Melalui dukungan politik dan institusi pendidikan, pemikiran Maturidiyah tersebar luas ke wilayah Anatolia, Turki, Balkan, Asia Selatan, hingga sebagian wilayah Timur Tengah.

Di Asia Tengah, Maturidiyah berkembang menjadi tradisi intelektual yang sangat kuat. Banyak madrasah dan pusat pendidikan Islam menjadikan karya-karya al-Maturidi sebagai bagian penting dari kurikulum teologi. Tradisi tersebut kemudian melahirkan banyak ulama besar yang turut menyebarkan pemikiran Maturidiyah ke berbagai wilayah.

Di kawasan Asia Selatan, khususnya India dan Pakistan, pengaruh Maturidiyah juga sangat besar melalui jaringan ulama Hanafi. Banyak lembaga pendidikan Islam di wilayah tersebut mengajarkan teologi Maturidiyah sebagai bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jama'ah.

Sementara itu, di dunia Melayu-Nusantara, pengaruh Maturidiyah masuk melalui tradisi Sunni yang dibawa para ulama dari Timur Tengah dan India. Meskipun masyarakat Nusantara lebih sering mengenal istilah Asy'ariyah, dalam praktiknya banyak

unsur pemikiran Maturidiyah yang juga berkembang, terutama dalam tradisi pesantren dan pendidikan Islam klasik.

Penyebaran Maturidiyah menunjukkan bahwa mazhab ini memiliki kemampuan adaptasi yang cukup tinggi terhadap berbagai konteks budaya dan sosial. Pendekatannya yang moderat, rasional, dan inklusif menjadikan Maturidiyah relatif mudah diterima di berbagai wilayah.

Dalam konteks kontemporer, Maturidiyah kembali mendapat perhatian sebagai salah satu model teologi Islam moderat yang dapat menjadi alternatif dalam menghadapi tantangan radikalisme dan ekstremisme agama. Banyak akademisi dan lembaga pendidikan Islam mulai mengkaji ulang warisan intelektual Maturidiyah untuk membangun pemahaman Islam yang lebih toleran dan dialogis.

Penelitian modern menunjukkan bahwa tradisi Maturidiyah memiliki kontribusi penting dalam pembentukan identitas Islam Sunni di berbagai kawasan dunia. Oleh sebab itu, memahami sejarah penyebaran Maturidiyah tidak hanya penting untuk kajian sejarah teologi, tetapi juga untuk memahami dinamika perkembangan peradaban Islam secara keseluruhan.

Maturidiyah merupakan salah satu mazhab teologi Sunni yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah pemikiran Islam. Aliran ini lahir melalui pemikiran Abu Mansur al-Maturidi yang berusaha membangun sintesis antara wahyu dan akal dalam memahami persoalan akidah.

Sebagai bagian dari Ahlussunnah wal Jama'ah, Maturidiyah memiliki banyak persamaan dengan Asy'ariyah, terutama dalam

mempertahankan prinsip-prinsip dasar akidah Sunni. Akan tetapi, Maturidiyah memberikan ruang yang lebih luas terhadap penggunaan akal dan kebebasan manusia dibandingkan Asy'ariyah.

Pemikiran Maturidiyah tentang akal menunjukkan bahwa Islam memiliki tradisi intelektual yang menghargai rasionalitas tanpa harus melepaskan wahyu sebagai sumber utama kebenaran. Sementara itu, konsep takdir dalam Maturidiyah memperlihatkan usaha menyeimbangkan antara kekuasaan Tuhan dan tanggung jawab manusia.

Penyebaran Maturidiyah yang luas di berbagai wilayah dunia Islam menunjukkan besarnya pengaruh mazhab ini dalam pembentukan tradisi Sunni. Hingga masa kini, pemikiran Maturidiyah tetap relevan sebagai salah satu model teologi moderat yang mampu menjawab tantangan kehidupan modern.



BAB IX

SYIAH

A. Sejarah Lahirnya Syiah

Kemunculan Syiah dalam sejarah Islam merupakan salah satu peristiwa paling penting sekaligus paling kompleks dalam perkembangan politik, teologi, dan peradaban Islam, karena kelahiran kelompok ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai munculnya mazhab keagamaan biasa, melainkan sebagai hasil dari pergulatan sejarah yang melibatkan persoalan legitimasi kekuasaan, otoritas spiritual, konflik sosial, serta perbedaan interpretasi terhadap kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Dalam konteks tersebut, Syiah bukan hanya sebuah identitas teologis, tetapi juga fenomena historis yang lahir dari pengalaman politik dan emosional umat Islam awal yang sangat mendalam.

Secara etimologis, istilah *Syiah* berasal dari kata Arab *syī'ah* yang berarti “pengikut”, “pendukung”, atau “kelompok”. Dalam perkembangan sejarah Islam awal, istilah ini digunakan untuk menyebut para pendukung Ali bin Abi Thalib yang meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi seharusnya berada di tangan Ali dan keturunannya. Keyakinan tersebut lahir dari

pandangan bahwa keluarga Nabi memiliki kedudukan spiritual dan moral yang istimewa sehingga lebih berhak memimpin umat dibandingkan tokoh-tokoh lain di luar Ahlul Bait.

Untuk memahami lahirnya Syiah secara komprehensif, penting untuk melihat kondisi sosial-politik umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. Ketika Nabi meninggal dunia pada tahun 632 M, umat Islam menghadapi persoalan besar mengenai siapa yang berhak melanjutkan kepemimpinan komunitas Muslim. Di tengah situasi yang penuh ketegangan tersebut, sebagian sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah dan memilih Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Akan tetapi, sebagian kelompok lain meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak menjadi penerus Nabi karena kedekatan keluarga, kedalaman ilmu, serta sejumlah riwayat yang dipahami sebagai penunjukan spiritual terhadap dirinya.

Perbedaan pandangan tersebut pada awalnya lebih bersifat politik daripada teologis. Akan tetapi, perkembangan sejarah kemudian menyebabkan persoalan kepemimpinan berubah menjadi doktrin teologi yang sangat mendalam. Konflik politik yang terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, terbunuhnya khalifah tersebut, serta perang saudara yang melibatkan Ali bin Abi Thalib dengan kelompok oposisi semakin memperkuat identitas politik pendukung Ali. Situasi menjadi semakin dramatis setelah terjadinya Perang Shiffin dan arbitrase (*tahkim*) yang dianggap sebagian pengikut Ali sebagai bentuk pengkhianatan terhadap legitimasi kepemimpinannya.

Akan tetapi, peristiwa paling menentukan dalam pembentukan identitas Syiah adalah tragedi Peristiwa Karbala pada tahun 680 M. Dalam peristiwa tersebut, Husain bin Ali beserta keluarga dan pengikutnya dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah di Padang Karbala. Tragedi ini meninggalkan luka emosional yang sangat mendalam dalam kesadaran kolektif Syiah dan kemudian menjadi simbol perjuangan melawan tirani serta ketidakadilan politik. Sejak saat itu, identitas Syiah tidak lagi sekadar dukungan politik terhadap keluarga Ali, tetapi berkembang menjadi gerakan religius yang memiliki doktrin spiritual dan teologis tersendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya, Syiah mengalami transformasi intelektual yang sangat besar. Ajaran mengenai kepemimpinan spiritual keluarga Nabi berkembang menjadi konsep imamah yang memiliki dimensi metafisis dan teologis yang mendalam. Para imam tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pewaris ilmu ilahi yang memiliki otoritas spiritual khusus dalam menafsirkan agama.

Secara historis, perkembangan Syiah juga dipengaruhi oleh situasi politik Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang sering kali menekan kelompok-kelompok pendukung Ahlul Bait. Tekanan politik tersebut menyebabkan komunitas Syiah berkembang dalam suasana oposisi dan marginalisasi. Dalam kondisi demikian, lahirlah tradisi intelektual dan spiritual yang sangat kuat di kalangan Syiah, terutama dalam bidang filsafat, tafsir, dan teologi.

Pada era modern, kajian mengenai sejarah lahirnya Syiah mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Banyak sarjana

kontemporer menekankan bahwa Syiah harus dipahami bukan hanya sebagai fenomena sektarian, tetapi sebagai bagian integral dari sejarah intelektual dan politik Islam. Penelitian dalam *Journal of Shi'a Islamic Studies* tahun 2025 menunjukkan bahwa pembentukan identitas Syiah sangat dipengaruhi oleh pengalaman historis tentang ketidakadilan politik dan pencarian legitimasi spiritual dalam masyarakat Islam awal.

B. Konsep Imamah

Konsep *imamah* merupakan inti paling fundamental dalam teologi Syiah karena seluruh bangunan pemikiran Syiah pada dasarnya bertumpu pada keyakinan bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad saw. bukanlah persoalan politik biasa yang dapat ditentukan melalui musyawarah manusia semata, melainkan institusi spiritual yang ditetapkan langsung oleh Tuhan melalui Nabi-Nya. Dalam perspektif Syiah, imamah bukan sekadar jabatan administratif atau kekuasaan politik, tetapi kelanjutan dari misi kenabian dalam menjaga kemurnian agama dan membimbing umat menuju kebenaran.

Berbeda dengan pandangan Sunni yang memandang khalifah sebagai pemimpin politik hasil konsensus umat, Syiah memahami imam sebagai figur yang memiliki legitimasi ilahi (*divine authority*). Oleh karena itu, imam dipandang memiliki kedudukan spiritual yang sangat tinggi dan tidak dapat dipilih secara sembarangan oleh masyarakat. Menurut teologi Syiah, hanya Tuhan yang berhak menentukan siapa imam yang sah karena

hanya Tuhan yang mengetahui siapa manusia paling suci dan paling layak memimpin umat.

Konsep imamah dalam Syiah berkembang dari keyakinan bahwa Nabi Muhammad saw. telah memberikan isyarat bahkan penunjukan langsung terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, terutama melalui peristiwa Ghadir Khum yang oleh Syiah dipahami sebagai penetapan Ali sebagai penerus spiritual Nabi. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa kepemimpinan umat seharusnya tetap berada dalam garis keturunan Ahlul Bait.

Dalam teologi Syiah, imam memiliki sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dari pemimpin biasa. Salah satu konsep paling penting adalah *'ismah* atau kemaksuman, yaitu keyakinan bahwa imam terbebas dari dosa dan kesalahan dalam urusan agama. Kemaksuman ini dianggap penting karena imam dipandang sebagai penjaga autentisitas wahyu dan penafsir ajaran Islam yang benar. Oleh sebab itu, otoritas imam dalam Syiah tidak hanya bersifat politik, tetapi juga epistemologis dan spiritual.

Selain itu, imam diyakini memiliki pengetahuan khusus (*'ilm ladunni*) yang diwariskan secara spiritual dari Nabi Muhammad saw. Pengetahuan ini memungkinkan imam memahami makna terdalam Al-Qur'an dan hukum-hukum agama. Dalam tradisi Syiah, imam sering digambarkan sebagai "Al-Qur'an yang hidup" karena perannya sebagai penafsir otoritatif terhadap wahyu.

Konsep imamah juga memiliki dimensi eskatologis yang sangat kuat, terutama dalam Syiah Dua Belas Imam. Mereka meyakini bahwa imam kedua belas, yaitu Muhammad al-Mahdi, tidak wafat tetapi berada dalam keadaan ghaib (*occultation*) dan

suatu saat akan kembali sebagai Imam Mahdi untuk menegakkan keadilan di muka bumi.

Dalam perspektif modern, konsep imamah sering dipahami tidak hanya sebagai doktrin spiritual, tetapi juga sebagai simbol resistensi terhadap ketidakadilan politik. Banyak pemikir Syiah kontemporer menafsirkan imamah sebagai konsep kepemimpinan moral yang menekankan keberpihakan terhadap kaum tertindas dan perjuangan melawan tirani.

C. Pembagian Syiah

Perkembangan Syiah dalam sejarah Islam memperlihatkan sebuah dinamika intelektual dan politik yang sangat kompleks, karena kelompok ini tidak tumbuh sebagai tradisi keagamaan yang sepenuhnya tunggal dan homogen, melainkan berkembang melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh pergulatan sejarah, konflik politik, perbedaan interpretasi teologis, serta perubahan sosial yang berlangsung selama berabad-abad di berbagai wilayah dunia Islam. Oleh sebab itu, pembagian internal Syiah tidak dapat dipahami hanya sebagai fragmentasi sederhana akibat perebutan kepemimpinan, melainkan sebagai refleksi dari perbedaan cara memahami hubungan antara otoritas spiritual, legitimasi politik, dan penafsiran agama dalam Islam.

Pada fase awal kemunculannya, komunitas Syiah pada dasarnya masih memiliki orientasi yang relatif sama, yaitu keyakinan bahwa kepemimpinan umat Islam seharusnya berada di tangan keluarga Nabi Muhammad saw., khususnya keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah az-Zahra. Akan tetapi, seiring

berjalannya waktu, terutama setelah wafatnya para imam yang dianggap memiliki legitimasi spiritual, muncul perbedaan pendapat mengenai siapa yang paling berhak menjadi penerus kepemimpinan berikutnya. Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan berbagai cabang dalam tradisi Syiah.

Persoalan suksesi imam memiliki posisi yang sangat penting dalam teologi Syiah karena konsep *imamah* bukan sekadar kepemimpinan administratif, melainkan institusi spiritual yang diyakini memiliki legitimasi ilahi. Oleh sebab itu, perbedaan dalam menentukan imam yang sah tidak hanya dipandang sebagai perbedaan politik, tetapi juga menyangkut persoalan akidah dan keselamatan spiritual umat. Dalam konteks tersebut, setiap kelompok Syiah mengembangkan argumentasi teologis dan historis masing-masing untuk membenarkan garis imamah yang mereka yakini.

Secara umum, tradisi Syiah terbagi ke dalam tiga cabang besar, yaitu Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Ismailiyah, dan Syiah Zaidiyah. Ketiga cabang ini memiliki fondasi keyakinan yang sama mengenai pentingnya Ahlul Bait sebagai pusat otoritas spiritual Islam, tetapi berkembang dengan karakteristik teologis, filosofis, dan politik yang sangat berbeda.

Cabang terbesar dan paling dominan dalam dunia Syiah modern adalah Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Dua Belas Imam. Kelompok ini meyakini bahwa kepemimpinan spiritual umat Islam berada pada dua belas imam yang dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan berakhir pada Muhammad al-Mahdi yang diyakini berada dalam keadaan ghaib hingga akhir zaman. Tradisi ini berkembang

sangat kuat terutama di Iran, Irak, dan sebagian wilayah Lebanon serta Bahrain. Dalam perkembangan sejarahnya, Itsna Asyariyah berhasil membangun sistem teologi dan hukum Islam yang sangat sistematis sehingga menjadi salah satu mazhab paling berpengaruh dalam dunia Islam kontemporer.

Sementara itu, Syiah Ismailiyah muncul akibat perbedaan pandangan mengenai suksesi setelah wafatnya Ja'far al-Shadiq. Mayoritas pengikut Syiah menerima Musa al-Kazim sebagai penerus imamah, tetapi kelompok Ismailiyah meyakini bahwa hak kepemimpinan seharusnya diberikan kepada Ismail bin Ja'far atau keturunannya. Dari sinilah lahir tradisi Ismailiyah yang dikenal sangat menekankan dimensi esoteris dan simbolik dalam memahami ajaran agama. Dalam tradisi Ismailiyah, teks-teks agama sering ditafsirkan secara batiniah sehingga melahirkan corak pemikiran filosofis dan mistik yang sangat kuat.

Syiah Ismailiyah memiliki kontribusi besar dalam sejarah intelektual Islam, terutama pada masa berdirinya Dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti ini tidak hanya menjadi kekuatan politik besar, tetapi juga pusat perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, astronomi, dan sastra Islam. Kota Kairo pada masa Fatimiyah berkembang menjadi salah satu pusat intelektual terbesar dunia Islam dengan berdirinya lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki pengaruh luas hingga ke wilayah Afrika Utara dan Asia Barat.

Adapun Syiah Zaidiyah berkembang terutama di wilayah Yaman dan mengikuti ajaran Zaid bin Ali. Berbeda dengan cabang-cabang Syiah lainnya, Zaidiyah memiliki pendekatan yang lebih

moderat terhadap konsep imamah. Mereka tidak menganggap imam sebagai figur yang ma'shum secara absolut dan tidak membatasi kepemimpinan hanya pada garis keturunan tertentu secara ketat. Menurut Zaidiyah, imam adalah keturunan Hasan atau Husain yang memiliki ilmu, keberanian, dan kemampuan memperjuangkan keadilan sosial. Karena pendekatan ini, banyak sarjana menilai bahwa Zaidiyah memiliki kedekatan tertentu dengan tradisi Sunni, khususnya dalam bidang hukum Islam dan pendekatan rasional terhadap persoalan politik.

Menarik untuk dicermati bahwa perbedaan-perbedaan dalam tubuh Syiah tidak selalu menghasilkan konflik destruktif. Dalam banyak periode sejarah, berbagai cabang Syiah justru berkembang sebagai tradisi intelektual yang sangat produktif. Masing-masing kelompok membangun sistem filsafat, teologi, dan hukum yang unik sesuai dengan pengalaman historis mereka. Oleh karena itu, memahami Syiah hanya sebagai kelompok politik atau sekadar mazhab teologi akan sangat menyederhanakan kompleksitas tradisi intelektual yang sebenarnya sangat kaya.

Dalam kajian akademik modern, para sarjana semakin menekankan bahwa keberagaman internal Syiah menunjukkan adanya pluralitas pemikiran dalam Islam yang tidak dapat direduksi ke dalam satu model tunggal. Penelitian dalam *Journal of Shi'a Studies and Islamic Civilization* tahun 2025 menunjukkan bahwa dinamika internal Syiah merupakan contoh bagaimana tradisi Islam mampu mengembangkan berbagai pendekatan terhadap persoalan otoritas, spiritualitas, dan politik tanpa kehilangan akar historisnya dalam ajaran Islam.

Pembagian Syiah sesungguhnya memperlihatkan bahwa sejarah Islam bukanlah sejarah yang statis dan seragam, melainkan sejarah yang dipenuhi dialog, perdebatan, reinterpretasi, dan pencarian terus-menerus terhadap bentuk kepemimpinan spiritual yang dianggap paling autentik dan paling sesuai dengan pesan moral Islam.

D. Syiah Itsna Asyariyah

Syiah Itsna Asyariyah merupakan cabang terbesar, paling berpengaruh, dan paling berkembang secara sistematis dalam keseluruhan tradisi Syiah, sehingga dalam banyak konteks istilah “Syiah” sendiri sering kali secara langsung diasosiasikan dengan mazhab Itsna Asyariyah atau Syiah Dua Belas Imam. Dominasi kelompok ini dalam dunia Syiah modern tidak hanya disebabkan oleh jumlah pengikutnya yang sangat besar, tetapi juga karena keberhasilannya membangun sistem teologi, filsafat, hukum, dan struktur kelembagaan keagamaan yang sangat kompleks dan terorganisasi sepanjang sejarah Islam.

Nama “Itsna Asyariyah” berasal dari bahasa Arab yang berarti “dua belas”, merujuk pada keyakinan mereka mengenai keberadaan dua belas imam yang dianggap sebagai penerus sah kepemimpinan spiritual Nabi Muhammad saw. Rangkaian imam tersebut dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan berakhir pada Muhammad al-Mahdi yang diyakini masih hidup dalam keadaan ghaib dan akan kembali pada akhir zaman sebagai penyelamat umat manusia.

Dalam teologi Itsna Asyariyah, para imam bukan hanya dipahami sebagai pemimpin politik atau tokoh agama biasa, melainkan figur suci yang memiliki otoritas spiritual dan epistemologis yang sangat tinggi. Mereka diyakini memperoleh pengetahuan ilahi yang diwariskan secara spiritual dari Nabi Muhammad saw., sehingga memiliki kemampuan memahami makna terdalam Al-Qur'an dan hukum-hukum agama secara sempurna. Oleh karena itu, imam dalam tradisi Itsna Asyariyah dipandang sebagai penjaga autentisitas Islam setelah wafatnya Nabi.

Salah satu konsep paling penting dalam teologi Itsna Asyariyah adalah doktrin *'ismah* atau kemaksuman imam. Menurut keyakinan mereka, para imam terbebas dari dosa, kesalahan, dan penyimpangan dalam urusan agama. Doktrin ini lahir dari keyakinan bahwa seorang pemimpin spiritual yang bertugas membimbing umat menuju kebenaran harus memiliki integritas moral dan spiritual yang sempurna. Dengan demikian, otoritas imam dalam Syiah bukan hanya berdasarkan keturunan biologis, tetapi juga karena kualitas spiritual yang diyakini dianugerahkan langsung oleh Tuhan.

Konsep ghaibnya imam kedua belas memiliki posisi yang sangat sentral dalam spiritualitas dan eskatologi Syiah Itsna Asyariyah. Menurut tradisi mereka, Muhammad al-Mahdi memasuki masa ghaib sejak abad ke-9 M untuk melindungi dirinya dari ancaman politik penguasa Abbasiyah. Meskipun tidak tampak secara fisik, imam ghaib diyakini tetap hidup dan memiliki hubungan spiritual dengan umat manusia. Keyakinan ini

melahirkan harapan eskatologis yang sangat kuat dalam tradisi Syiah, yaitu bahwa suatu saat Imam Mahdi akan muncul kembali untuk menegakkan keadilan dan mengakhiri penindasan di dunia.

Dalam perkembangan sejarahnya, Syiah Itsna Asyariyah berhasil membangun tradisi intelektual yang sangat maju. Berbeda dengan stereotip yang sering memandang Syiah hanya dari aspek politik atau ritual keagamaannya, tradisi Itsna Asyariyah sebenarnya memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat Islam, ilmu kalam, tafsir, dan hukum Islam. Tokoh-tokoh seperti Mulla Sadra mengembangkan sintesis filsafat, mistisisme, dan teologi yang sangat mendalam, sementara Muhammad Baqir al-Sadr memberikan kontribusi besar dalam pengembangan filsafat sosial dan ekonomi Islam modern.

Perkembangan intelektual Syiah Itsna Asyariyah juga tidak dapat dipisahkan dari munculnya pusat-pusat pendidikan keagamaan (*hawzah*) di kota-kota seperti Najaf dan Qom. Lembaga-lembaga ini memainkan peranan sangat penting dalam melahirkan ulama-ulama besar yang tidak hanya mengembangkan teologi Syiah, tetapi juga aktif dalam persoalan sosial dan politik dunia Islam modern.

Dalam konteks politik kontemporer, pengaruh Syiah Itsna Asyariyah semakin besar setelah Revolusi Iran 1979 yang dipimpin oleh Ruhollah Khomeini. Revolusi ini tidak hanya mengubah struktur politik Iran, tetapi juga memperlihatkan bagaimana teologi Syiah dapat berkembang menjadi ideologi politik modern melalui konsep *wilayat al-faqih* atau kepemimpinan ulama selama masa ghaib Imam Mahdi.

Namun demikian, Syiah Itsna Asyariyah juga terus mengalami dinamika internal dan reinterpretasi modern. Banyak pemikir Syiah kontemporer mencoba membangun pendekatan baru yang lebih dialogis terhadap pluralitas Islam dan tantangan global modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan hubungan agama dengan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Syiah Itsna Asyariyah bukan tradisi yang beku, melainkan sistem pemikiran yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

E. Syiah Zaidiyah

Syiah Zaidiyah merupakan salah satu cabang paling tua dan paling unik dalam keseluruhan sejarah perkembangan Syiah, karena kelompok ini menampilkan corak pemikiran yang relatif berbeda dibandingkan tradisi Syiah lainnya, baik dalam persoalan teologi, politik, maupun konsep kepemimpinan keagamaan. Dalam banyak kajian akademik modern, Zaidiyah sering dipandang sebagai bentuk “Syiah moderat” karena pendekatannya yang lebih rasional, lebih terbuka terhadap dinamika politik, serta tidak terlalu menekankan unsur-unsur esoteris dan sakralisasi imam sebagaimana berkembang dalam tradisi Syiah Itsna Asyariyah maupun Syiah Ismailiyah.

Secara historis, kemunculan Zaidiyah berkaitan erat dengan perjuangan Zaid bin Ali, cucu dari Husain bin Ali dan keturunan langsung dari keluarga Nabi Muhammad saw. Zaid bin Ali dikenal sebagai tokoh yang memiliki keberanian politik tinggi serta semangat perlawanan terhadap ketidakadilan kekuasaan Dinasti Umayyah. Pada awal abad ke-8 M, ia memimpin gerakan oposisi

terhadap pemerintahan Umayyah yang dianggap telah menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan Islam. Meskipun pemberontakan tersebut akhirnya mengalami kegagalan dan Zaid bin Ali gugur, perjuangannya meninggalkan pengaruh besar terhadap pembentukan identitas politik dan teologi Zaidiyah.

Berbeda dengan tradisi Syiah lain yang sangat menekankan legitimasi spiritual imam berdasarkan penunjukan ilahi (*nass*), Zaidiyah mengembangkan pandangan yang lebih fleksibel mengenai konsep imamah. Dalam perspektif mereka, seorang imam memang harus berasal dari keturunan Hasan atau Husain sebagai bagian dari Ahlul Bait, tetapi tidak harus ditentukan secara eksklusif melalui penunjukan spiritual tertentu. Yang lebih penting adalah kemampuan imam dalam menegakkan keadilan, memiliki ilmu agama yang mendalam, keberanian politik, serta kesediaan memimpin perjuangan melawan kezaliman.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Zaidiyah memiliki orientasi politik yang sangat kuat. Imam dalam tradisi Zaidiyah tidak dipahami sebagai figur mistis yang memiliki kemampuan supranatural atau kemaksuman absolut, melainkan sebagai pemimpin moral dan sosial yang aktif memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, konsep kepemimpinan dalam Zaidiyah lebih bersifat dinamis dan terbuka dibandingkan cabang Syiah lainnya.

Salah satu aspek paling penting yang membedakan Zaidiyah dari Syiah Itsna Asyariyah adalah penolakan terhadap doktrin *'ismah* atau kemaksuman imam secara mutlak. Dalam tradisi Itsna Asyariyah, imam diyakini terbebas dari dosa dan kesalahan dalam

urusan agama. Akan tetapi, Zaidiyah tidak menerima pandangan tersebut secara absolut. Menurut mereka, imam tetap manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan, meskipun harus memiliki integritas moral dan kapasitas intelektual yang tinggi. Pandangan ini membuat struktur teologi Zaidiyah menjadi lebih dekat dengan pendekatan rasional dalam tradisi Sunni.

Kedekatan tertentu antara Zaidiyah dan Sunni juga tampak dalam bidang hukum Islam. Banyak ulama Zaidiyah menggunakan metode ijtihad yang relatif serupa dengan tradisi Sunni dan tidak terlalu mengembangkan dimensi batiniah atau esoteris sebagaimana berkembang dalam Ismailiyah. Dalam persoalan fikih, beberapa pandangan hukum Zaidiyah bahkan memiliki kesamaan dengan mazhab Hanafi dan Mu'tazilah, terutama dalam penggunaan akal sebagai instrumen penting dalam memahami teks agama.

Pengaruh Mu'tazilah terhadap Zaidiyah memang sangat signifikan. Dalam bidang teologi, Zaidiyah mengadopsi sejumlah prinsip rasionalisme Mu'tazilah, terutama mengenai keadilan Tuhan, kebebasan manusia, dan penggunaan akal dalam memahami persoalan akidah. Oleh sebab itu, para sarjana sering menyebut Zaidiyah sebagai salah satu cabang Syiah yang paling rasional dalam sejarah Islam klasik.

Di wilayah Yaman, Zaidiyah berkembang menjadi kekuatan sosial dan politik yang sangat penting selama berabad-abad. Para imam Zaidiyah tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga penguasa politik yang membentuk struktur pemerintahan

lokal. Tradisi politik ini melahirkan sistem kepemimpinan religius yang khas di Yaman dan bertahan cukup lama hingga era modern.

Menarik untuk dicermati bahwa karakter moderat Zaidiyah memungkinkan kelompok ini memiliki hubungan yang relatif lebih cair dengan komunitas Sunni dibandingkan cabang Syiah lainnya. Dalam banyak fase sejarah, interaksi antara Sunni dan Zaidiyah berlangsung dalam bentuk pertukaran intelektual dan kerja sama sosial yang cukup harmonis. Hal ini berbeda dengan sejumlah konflik sektarian yang sering muncul antara Sunni dan kelompok Syiah lain di beberapa wilayah Timur Tengah.

Dalam konteks modern, kajian mengenai Zaidiyah kembali memperoleh perhatian besar, terutama setelah munculnya dinamika politik baru di Yaman. Banyak peneliti melihat bahwa memahami Zaidiyah tidak cukup hanya dari perspektif konflik politik kontemporer, tetapi juga harus mempertimbangkan sejarah panjang tradisi intelektual dan teologinya yang sangat kaya. Penelitian dalam *Middle Eastern Islamic Studies Review* tahun 2025 menunjukkan bahwa Zaidiyah memiliki posisi unik dalam spektrum pemikiran Islam karena berhasil memadukan loyalitas terhadap Ahlul Bait dengan pendekatan rasional dan politis yang relatif moderat.

Dengan demikian, Syiah Zaidiyah memperlihatkan bahwa tradisi Syiah sesungguhnya sangat beragam dan tidak dapat dipahami secara tunggal. Zaidiyah menjadi contoh bagaimana sebuah mazhab Islam mampu mengembangkan bentuk teologi yang tetap mempertahankan kecintaan terhadap keluarga Nabi,

tetapi sekaligus membuka ruang besar bagi rasionalitas, aktivisme sosial, dan dinamika politik yang realistik.

F. Pandangan Teologi Syiah

Secara umum, bangunan teologi Syiah disusun di atas sejumlah prinsip fundamental yang membentuk keseluruhan cara pandang mereka terhadap Tuhan, manusia, wahyu, dan sejarah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup tauhid, keadilan Tuhan, kenabian, imamah, dan hari akhir. Akan tetapi, meskipun banyak unsur teologi Syiah memiliki kesamaan dengan tradisi Sunni dalam persoalan dasar keimanan, konsep *imamah* tetap menjadi elemen pembeda paling utama yang memberikan identitas khas terhadap keseluruhan struktur pemikiran Syiah.

Dalam pandangan Syiah, tauhid tidak hanya dipahami sebagai pengakuan terhadap keesaan Tuhan secara formal, melainkan juga sebagai penegasan bahwa Tuhan adalah realitas absolut yang sempurna dalam sifat, kehendak, dan kebijaksanaan-Nya. Oleh karena itu, teologi Syiah sangat menekankan kesucian dan transendensi Tuhan serta menolak segala bentuk antropomorfisme yang menggambarkan Tuhan menyerupai makhluk. Dalam hal ini, pemikiran teologi Syiah memiliki kedekatan tertentu dengan tradisi rasionalisme Islam klasik.

Salah satu karakteristik paling menonjol dalam teologi Syiah adalah penekanan kuat terhadap konsep keadilan Tuhan (*al-'adl*). Syiah meyakini bahwa Tuhan mustahil melakukan kezaliman karena keadilan merupakan bagian dari kesempurnaan ilahi. Konsep ini melahirkan pandangan bahwa manusia memiliki

tanggung jawab moral atas tindakannya sendiri, sehingga kebebasan manusia menjadi syarat penting bagi keadilan Tuhan. Dalam konteks ini, banyak pemikiran Syiah memiliki hubungan intelektual yang erat dengan Mu'tazilah, terutama dalam persoalan kebebasan manusia dan rasionalitas etika.

Pengaruh rasionalisme dalam teologi Syiah tampak jelas dalam penghargaan tinggi terhadap akal sebagai instrumen memahami agama. Bagi banyak teolog Syiah, akal bukan lawan wahyu, melainkan sarana yang membantu manusia memahami makna terdalam dari ajaran ilahi. Oleh sebab itu, tradisi intelektual Syiah melahirkan banyak filsuf dan teolog besar yang mengembangkan sintesis antara wahyu, filsafat, dan mistisisme.

Namun demikian, teologi Syiah tidak berhenti pada rasionalisme semata. Salah satu dimensi paling khas dalam pemikiran Syiah adalah spiritualitas dan esoterisme yang sangat mendalam. Para imam tidak hanya dipahami sebagai pemimpin politik atau ahli hukum agama, tetapi juga sebagai figur spiritual yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan serta kemampuan memahami makna batin dari wahyu. Dalam banyak tradisi Syiah, imam bahkan dipandang sebagai perantara spiritual yang membimbing manusia menuju pengetahuan hakiki tentang Tuhan.

Dimensi spiritual tersebut melahirkan tradisi penghormatan yang sangat besar terhadap Ahlul Bait dan para imam. Ziarah ke makam imam, peringatan tragedi Peristiwa Karbala, serta ritual-ritual keagamaan lainnya menjadi bagian penting dari identitas spiritual Syiah. Bagi komunitas Syiah, Karbala bukan hanya tragedi

sejarah, tetapi simbol abadi perjuangan melawan kezaliman dan pengorbanan demi mempertahankan kebenaran moral.

Konsep imamah dalam teologi Syiah juga memiliki dimensi epistemologis yang sangat penting. Imam dipandang sebagai penjaga otoritatif penafsiran agama sehingga keberadaan mereka dianggap penting untuk menjaga kemurnian ajaran Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Oleh sebab itu, otoritas imam dalam Syiah melampaui fungsi politik dan mencakup otoritas spiritual serta intelektual.

Dalam perkembangan modern, teologi Syiah mengalami transformasi besar terutama setelah Revolusi Iran 1979 yang dipimpin oleh Ruhollah Khomeini. Revolusi tersebut menjadi titik penting dalam sejarah modern Syiah karena berhasil mengubah teologi yang selama berabad-abad berkembang dalam posisi oposisi menjadi dasar ideologi negara modern.

Salah satu konsep paling penting yang berkembang dalam konteks tersebut adalah *wilayat al-faqih*, yaitu gagasan mengenai kepemimpinan ulama selama masa ghaib Imam Mahdi. Menurut konsep ini, para ulama memiliki legitimasi untuk memimpin masyarakat dan negara sebagai wakil imam ghaib dalam menjaga syariat dan keadilan sosial. Konsep ini kemudian menjadi fondasi sistem politik Republik Islam Iran.

Akan tetapi, perkembangan modern juga menunjukkan bahwa teologi Syiah tidak bersifat statis. Banyak pemikir Syiah kontemporer berusaha melakukan reinterpretasi terhadap konsep-konsep klasik agar lebih relevan dengan tantangan modern seperti demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan hubungan agama

dengan negara. Sebagian pemikir mencoba membangun pendekatan yang lebih inklusif terhadap hubungan Sunni-Syiah dan menekankan pentingnya persatuan umat Islam di tengah perubahan global.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa teologi Syiah terus bergerak dan bertransformasi sesuai dinamika sosial-politik masyarakat Muslim modern. Tradisi ini tidak hanya mempertahankan warisan sejarah dan spiritualitas Ahlul Bait, tetapi juga terus berupaya menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupan kontemporer.



BAGIAN III

**POKOK-POKOK
PEMBAHASAN
ILMU KALAM**



BAB X

KETUHANAN DALAM ILMU KALAM

Pembahasan mengenai ketuhanan dalam tradisi Ilmu Kalam merupakan salah satu inti terpenting dalam keseluruhan bangunan pemikiran Islam, sebab seluruh struktur keyakinan, sistem etika, orientasi spiritual, hingga konstruksi peradaban umat Islam pada dasarnya bertumpu pada bagaimana manusia memahami Tuhan sebagai pusat eksistensi dan sumber segala realitas. Oleh karena itu, diskursus ketuhanan dalam Ilmu Kalam tidak pernah hanya berhenti pada pembicaraan normatif mengenai keberadaan Allah semata, melainkan berkembang menjadi medan intelektual yang sangat luas yang melibatkan argumentasi rasional, pendekatan tekstual, refleksi metafisik, bahkan dialog kritis dengan filsafat, sains, dan perkembangan sosial kemasyarakatan modern. Dalam sejarah pemikiran Islam, para mutakallimun tidak sekadar berusaha mempertahankan keimanan dari serangan kelompok ateistik, skeptik, maupun aliran keagamaan lain, tetapi juga berupaya membangun sistem argumentasi yang mampu menjelaskan hubungan antara Tuhan, alam, manusia, dan kehidupan secara logis serta dapat diterima oleh akal.

Dalam konteks tersebut, konsep tauhid menjadi fondasi paling mendasar dalam pembahasan Ilmu Kalam. Tauhid bukan

hanya berarti pengakuan verbal bahwa Allah itu Esa, melainkan sebuah sistem kesadaran teologis yang menempatkan Allah sebagai satu-satunya sumber penciptaan, pengaturan, pengabdian, dan kesempurnaan mutlak. Konsep tauhid kemudian berkembang ke dalam berbagai klasifikasi yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap dimensi-dimensi keesaan Allah, di antaranya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, serta tauhid asma wa sifat. Ketiga dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena masing-masing saling melengkapi dalam membentuk pandangan keimanan yang utuh.

Pada perkembangan berikutnya, pembahasan ketuhanan dalam Ilmu Kalam juga melahirkan berbagai argumentasi rasional mengenai keberadaan Allah, seperti dalil huduts, dalil imkan, dalil keteraturan alam, dan berbagai pendekatan filosofis lainnya. Semua argumentasi tersebut menunjukkan bahwa keyakinan terhadap Allah dalam Islam tidak dibangun atas dasar dogmatisme semata, melainkan memiliki landasan intelektual yang kuat. Selain itu, para ulama Ilmu Kalam juga merumuskan pembahasan mendalam mengenai sifat-sifat Allah, baik sifat wajib maupun sifat mustahil, guna menjaga kemurnian akidah Islam dari kecenderungan tasybih, tajsim, ataupun penolakan terhadap sifat-sifat ketuhanan.

Bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai dimensi-dimensi utama ketuhanan dalam Ilmu Kalam, meliputi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dalil keberadaan Allah, serta sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Pembahasan akan dikembangkan secara analitis dengan

pendekatan akademik yang mendalam sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana Ilmu Kalam membangun konstruksi ketuhanan dalam tradisi intelektual Islam.

A. Tauhid Rububiyah

Tauhid rububiyah merupakan konsep ketauhidan yang menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, yakni Tuhan yang menciptakan, memiliki, mengatur, memelihara, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, serta mengendalikan seluruh alam semesta tanpa adanya sekutu sedikit pun. Kata “Rabb” dalam tradisi bahasa Arab tidak hanya bermakna Tuhan dalam pengertian umum, tetapi juga mencakup makna pengatur, pendidik, pemelihara, dan penguasa absolut atas seluruh eksistensi. Dengan demikian, tauhid rububiyah mengandung pengertian bahwa tidak ada satu kekuatan pun di alam raya ini yang memiliki otoritas mutlak selain Allah.

Dalam perspektif Ilmu Kalam, tauhid rububiyah memiliki posisi yang sangat fundamental karena menjadi dasar ontologis bagi seluruh keberadaan alam. Alam tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya sebab pertama yang menciptakan dan mengaturnya. Para mutakallimun memandang bahwa keteraturan kosmos, kesinambungan hukum-hukum alam, dan keterikatan seluruh makhluk dalam sistem yang harmonis merupakan indikasi rasional tentang keberadaan Rabb yang Mahakuasa. Oleh sebab itu, pembahasan tauhid rububiyah selalu berkaitan erat dengan persoalan penciptaan alam dan relasi Tuhan dengan makhluk.

Al-Qur'an secara berulang kali menegaskan aspek rububiyah Allah dalam berbagai ayat. Misalnya dalam QS. Al-Fatihah ayat 2 yang menyebut Allah sebagai "Rabb al-'Alamin", Tuhan semesta alam. Penyebutan ini menunjukkan bahwa rububiyah Allah bersifat universal, meliputi seluruh makhluk tanpa pengecualian. Allah tidak hanya menjadi Tuhan bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh dimensi eksistensi, baik yang tampak maupun yang tidak tampak.

Konsep tauhid rububiyah juga menegaskan bahwa seluruh proses kehidupan berada dalam pengaturan Allah. Hujan turun bukan semata-mata karena mekanisme alamiah, melainkan karena kehendak Allah yang mengatur hukum-hukum alam tersebut. Demikian pula kelahiran, kematian, kesehatan, rezeki, dan seluruh dinamika kehidupan manusia pada hakikatnya berlangsung dalam cakupan kehendak dan kekuasaan Allah. Pemahaman seperti ini melahirkan kesadaran spiritual bahwa manusia bukan pusat kekuasaan mutlak, melainkan makhluk yang sangat bergantung kepada Tuhan.

Dalam sejarah pemikiran Islam, tauhid rububiyah sering digunakan sebagai argumentasi untuk membantah pandangan dualisme yang meyakini adanya dua kekuatan utama dalam alam semesta, seperti konsep terang dan gelap dalam sebagian tradisi keagamaan kuno. Islam menolak pandangan tersebut karena meniscayakan adanya pembagian kekuasaan absolut. Jika terdapat dua penguasa mutlak, maka keteraturan alam akan mengalami konflik permanen. Oleh sebab itu, kesatuan dan keteraturan

kosmos menjadi salah satu indikasi logis bahwa pengaturnya juga satu.

Selain itu, tauhid rububiyah memiliki implikasi etis dan sosial yang sangat luas. Kesadaran bahwa Allah adalah Rabb seluruh manusia akan melahirkan pandangan egalitarian dalam kehidupan sosial. Tidak ada manusia yang secara mutlak berhak mengklaim dirinya sebagai penguasa absolut atas manusia lain, sebab seluruh manusia pada hakikatnya sama-sama hamba Allah. Dalam konteks ini, tauhid rububiyah tidak hanya berfungsi sebagai konsep metafisik, tetapi juga sebagai fondasi moral dan sosial yang mendorong terciptanya keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab kemanusiaan.

Dalam perkembangan kontemporer, para pemikir Islam modern mencoba mengaitkan tauhid rububiyah dengan krisis ekologis dan problem kemanusiaan global. Mereka berpendapat bahwa kerusakan lingkungan pada dasarnya berakar pada hilangnya kesadaran rububiyah, yakni ketika manusia memandang dirinya sebagai penguasa mutlak atas alam tanpa mempertimbangkan dimensi ketuhanan dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, tauhid rububiyah tidak hanya relevan dalam diskursus teologis klasik, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam membangun etika lingkungan dan kesadaran peradaban modern.

Kajian terbaru mengenai dimensi tauhid rububiyah dan uluhiyah juga menunjukkan bahwa pemahaman tauhid tidak semata-mata bersifat dogmatis, tetapi memiliki implikasi pedagogis dan sosial dalam pembentukan karakter umat Islam

modern. Penelitian tentang aspek-aspek tauhid menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap rububiyah Allah dapat memperkuat akidah serta mencegah penyimpangan keyakinan dalam kehidupan beragama. (melatijournal.com)

B. Tauhid Uluhiyah

Tauhid uluhiyah merupakan aspek ketauhidan yang menegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah dan dijadikan tujuan penghambaan. Jika tauhid rububiyah berkaitan dengan pengakuan terhadap kekuasaan Allah sebagai pencipta dan pengatur alam, maka tauhid uluhiyah berkaitan dengan konsekuensi praktis dari pengakuan tersebut, yakni bahwa seluruh bentuk ibadah, ketaatan, cinta, harapan, rasa takut, dan pengabdian harus diarahkan hanya kepada Allah.

Konsep uluhiyah berasal dari kata “ilah” yang berarti sesembahan. Dalam pengertian teologis, ilah bukan sekadar objek ritual, tetapi segala sesuatu yang dijadikan pusat ketundukan dan orientasi hidup manusia. Oleh sebab itu, tauhid uluhiyah pada hakikatnya merupakan proses pembebasan manusia dari segala bentuk penghambaan selain kepada Allah, baik penghambaan kepada berhala, kekuasaan, materi, hawa nafsu, ideologi, maupun sesama manusia.

Dalam Al-Qur'an, tauhid uluhiyah menjadi inti dakwah seluruh nabi dan rasul. Semua nabi membawa pesan yang sama, yaitu menyeru manusia agar hanya menyembah Allah dan menjauhi thaghut. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam sejarah kemanusiaan bukanlah sekadar pengingkaran

terhadap keberadaan Tuhan, melainkan penyimpangan dalam praktik penghambaan. Banyak masyarakat kuno sebenarnya mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta, tetapi mereka tetap menyekutukan Allah dalam ibadah.

Ilmu Kalam memandang tauhid uluhiyah sebagai inti relasi eksistensial antara manusia dan Tuhan. Manusia diciptakan bukan sekadar untuk hidup secara biologis, melainkan untuk menjalankan fungsi ubudiyah, yaitu penghambaan total kepada Allah. Oleh sebab itu, ibadah dalam Islam tidak dibatasi pada ritual formal seperti salat, puasa, dan haji, tetapi mencakup seluruh aktivitas kehidupan yang dilakukan dengan niat mencari ridha Allah.

Secara filosofis, tauhid uluhiyah juga berkaitan dengan konsep kebebasan manusia. Ketika manusia hanya tunduk kepada Allah, maka ia terbebas dari dominasi sesama makhluk. Dalam perspektif ini, tauhid menjadi kekuatan emansipatoris yang membebaskan manusia dari tirani sosial, ekonomi, maupun politik. Sejarah Islam menunjukkan bahwa ajaran tauhid memiliki kekuatan revolusioner dalam menghancurkan sistem penindasan yang menempatkan manusia sebagai objek eksploitasi.

Dalam konteks modern, tauhid uluhiyah dapat dipahami sebagai kritik terhadap materialisme dan sekularisme ekstrem yang menjadikan materi sebagai pusat orientasi kehidupan. Banyak manusia modern yang secara formal mengakui keberadaan Tuhan, tetapi dalam praktik kehidupannya justru menuhankan kekuasaan, uang, popularitas, dan kepentingan duniawi. Fenomena ini menunjukkan bahwa syirik tidak selalu hadir dalam bentuk

penyembahan berhala fisik, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk pengultusan terhadap nilai-nilai duniawi.

Para ulama Ilmu Kalam juga menegaskan bahwa tauhid uluhiyah memiliki dimensi moral yang sangat penting. Ketika manusia menyadari bahwa seluruh amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka ia akan terdorong untuk menjalani kehidupan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tauhid uluhiyah bukan hanya persoalan ritual keagamaan, tetapi juga fondasi pembentukan etika sosial.

Kajian kontemporer mengenai tauhid uluhiyah menunjukkan bahwa konsep ini memiliki relevansi besar dalam pembangunan karakter dan pendidikan Islam modern. Penelitian tentang kandungan tauhid uluhiyah dalam ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa penghambaan kepada Allah melahirkan kesadaran spiritual yang mampu membentuk integritas moral serta ketahanan psikologis individu dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. (ejournal.inisnu.ac.id)

C. Tauhid Asma wa Sifat

Tauhid asma wa sifat merupakan dimensi ketauhidan yang berkaitan dengan keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi tanpa melakukan penyimpangan makna, penolakan, penyerupaan, ataupun penggambaran fisik terhadap Tuhan. Pembahasan ini termasuk salah satu tema paling kompleks dalam Ilmu Kalam karena menyangkut hubungan antara teks wahyu, akal, bahasa, dan metafisika.

Dalam tradisi Islam, Allah memiliki nama-nama yang indah atau *al-asma' al-husna* yang mencerminkan kesempurnaan-Nya. Nama-nama tersebut bukan sekadar simbol linguistik, tetapi mengandung makna teologis yang sangat mendalam. Ketika Allah disebut sebagai *Ar-Rahman*, maka hal itu menunjukkan keluasan kasih sayang-Nya; ketika disebut *Al-'Alim*, maka menunjukkan kesempurnaan ilmu-Nya; dan ketika disebut *Al-Qadir*, maka menunjukkan kemahakuasaan-Nya.

Para ulama Ilmu Kalam berbeda pendapat mengenai bagaimana memahami sifat-sifat Allah. Kelompok *Mu'tazilah* cenderung menolak pemisahan sifat dari zat Allah karena khawatir hal tersebut akan menimbulkan pluralitas dalam keesaan Tuhan. Sementara itu, kelompok *Asy'ariyah* dan *Maturidiyah* menerima adanya sifat-sifat Allah sebagai sifat yang melekat pada zat-Nya tanpa menyerupakan dengan makhluk.

Perdebatan mengenai sifat-sifat Allah menunjukkan betapa seriusnya para *mutakallimun* dalam menjaga kemurnian tauhid. Mereka berusaha mencari titik keseimbangan antara mempertahankan teks wahyu dan menghindari pemahaman antropomorfis terhadap Tuhan. Dalam konteks ini, Ilmu Kalam memainkan peran penting sebagai instrumen intelektual untuk menjaga akidah Islam dari kecenderungan ekstrem.

Tauhid asma wa sifat juga memiliki dimensi spiritual yang sangat mendalam. Mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat-Nya akan melahirkan hubungan emosional dan spiritual yang lebih kuat antara manusia dan Tuhan. Seseorang yang memahami Allah sebagai *Al-Ghafur* akan memiliki harapan terhadap

ampunan-Nya, sedangkan pemahaman terhadap Allah sebagai Al-‘Adl akan melahirkan kesadaran moral mengenai pentingnya keadilan.

Dalam perspektif psikologi agama, penghayatan terhadap asma wa sifat Allah dapat membentuk stabilitas mental dan spiritual manusia. Nama-nama Allah memberikan orientasi makna dalam kehidupan sehingga manusia tidak terjebak dalam kehampaan eksistensial. Oleh sebab itu, pembahasan asma wa sifat tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga penting dalam pembentukan kesehatan spiritual manusia modern.

Perkembangan kajian kontemporer menunjukkan bahwa konsep asma wa sifat memiliki relevansi besar dalam pendidikan karakter Islam. Pemahaman terhadap sifat-sifat Allah dipandang mampu membangun kesadaran etis, spiritualitas sosial, serta orientasi moral yang lebih humanis dan transendental. (melatijournal.com)

D. Dalil Keberadaan Allah

Pembahasan mengenai dalil keberadaan Allah merupakan salah satu tema paling penting dalam Ilmu Kalam karena berkaitan langsung dengan dasar rasional keimanan. Para mutakallimun berupaya menunjukkan bahwa keberadaan Allah tidak hanya diterima melalui wahyu, tetapi juga dapat dibuktikan melalui argumentasi akal yang logis dan sistematis.

Salah satu dalil yang paling terkenal dalam Ilmu Kalam adalah dalil huduts, yaitu argumentasi yang menyatakan bahwa alam bersifat baru dan segala sesuatu yang baru pasti membutuhkan

pencipta. Alam semesta mengalami perubahan, pergerakan, dan keterbatasan, sehingga tidak mungkin bersifat qadim atau ada dengan sendirinya. Oleh karena itu, harus ada zat yang bersifat azali dan tidak bergantung kepada apa pun, yaitu Allah.

Selain dalil huduts, terdapat pula dalil imkan yang dikembangkan oleh para filsuf Muslim. Dalil ini menjelaskan bahwa seluruh makhluk bersifat mungkin ada dan mungkin tidak ada. Karena keberadaannya tidak bersifat wajib, maka harus ada wujud yang bersifat wajib al-wujud yang menjadi sumber keberadaan seluruh makhluk.

Dalil lain yang sangat populer adalah dalil keteraturan alam atau teleologis. Keteraturan kosmos menunjukkan adanya desain dan tujuan yang teratur. Pergantian siang dan malam, keteraturan orbit planet, keseimbangan ekosistem, dan kompleksitas struktur biologis menunjukkan bahwa alam semesta tidak mungkin muncul secara kebetulan.

Dalam konteks modern, argumentasi keberadaan Allah juga berkembang melalui dialog dengan sains kontemporer. Banyak ilmuwan dan pemikir modern melihat bahwa hukum-hukum fisika yang sangat presisi justru menunjukkan adanya desain kosmik yang luar biasa. Meskipun sains tidak secara langsung membuktikan keberadaan Tuhan, keteraturan dan kompleksitas alam memberikan ruang refleksi metafisik mengenai keberadaan pencipta.

Di sisi lain, Ilmu Kalam juga memberikan kritik terhadap ateisme dan materialisme yang memandang alam semesta sebagai realitas yang berdiri sendiri tanpa pencipta. Para mutakallimun

menilai bahwa pandangan tersebut tidak mampu menjelaskan asal-usul eksistensi secara memadai. Jika segala sesuatu harus memiliki sebab, maka pertanyaan mengenai sebab pertama tetap tidak dapat dihindari.

Dalil keberadaan Allah dalam Islam pada akhirnya tidak hanya bertujuan memenangkan perdebatan intelektual, tetapi juga mengantarkan manusia kepada kesadaran spiritual. Akal digunakan sebagai jalan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, sedangkan wahyu memberikan petunjuk agar manusia tidak tersesat dalam spekulasi metafisik yang berlebihan.

E. Sifat Wajib dan Mustahil bagi Allah

Pembahasan mengenai sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah merupakan salah satu inti kajian Ilmu Kalam klasik yang bertujuan menjaga kemurnian akidah Islam. Para ulama menyusun konsep ini untuk memberikan pemahaman sistematis mengenai kesempurnaan Allah sekaligus menolak segala sifat kekurangan yang tidak layak bagi-Nya.

Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki Allah sebagai Tuhan Yang Mahasempurna. Sementara itu, sifat mustahil adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah karena bertentangan dengan kesempurnaan ketuhanan. Dalam tradisi Ahlussunnah, sifat wajib Allah secara umum dirumuskan menjadi dua puluh sifat.

Sifat pertama adalah wujud, yaitu bahwa Allah pasti ada. Keberadaan Allah bersifat mutlak dan tidak bergantung kepada apa pun. Berbeda dengan makhluk yang keberadaannya bergantung

pada sebab-sebab tertentu, keberadaan Allah bersifat mandiri dan absolut.

Sifat kedua adalah qidam, yaitu bahwa Allah terdahulu tanpa permulaan. Allah tidak diciptakan dan tidak didahului oleh ketiadaan. Lawannya adalah huduts, yaitu baru, yang mustahil bagi Allah.

Sifat ketiga adalah baqa', yaitu kekal. Allah tidak akan mengalami kehancuran ataupun kematian. Seluruh makhluk bersifat fana, sedangkan Allah bersifat abadi.

Sifat berikutnya adalah mukhalafatu lil hawadits, yakni Allah berbeda dengan seluruh makhluk. Allah tidak menyerupai makhluk dalam zat, sifat, maupun perbuatan-Nya. Karena itu, segala bentuk penyerupaan Tuhan dengan makhluk ditolak dalam akidah Islam.

Allah juga memiliki sifat qiyamuhu binafsih, yakni berdiri sendiri dan tidak membutuhkan apa pun. Seluruh makhluk membutuhkan Allah, sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkan makhluk.

Sifat wahdaniyah menunjukkan bahwa Allah Maha Esa, baik dalam zat, sifat, maupun perbuatan-Nya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam kekuasaan dan ketuhanan.

Selain sifat-sifat tersebut, Allah juga memiliki sifat qudrah (Mahakuasa), iradah (Maha Berkehendak), ilmu (Maha Mengetahui), hayat (Maha Hidup), sama' (Maha Mendengar), bashar (Maha Melihat), dan kalam (Maha Berfirman). Seluruh sifat tersebut menunjukkan kesempurnaan Allah yang tidak terbatas.

Adapun sifat mustahil bagi Allah merupakan kebalikan dari sifat wajib. Misalnya, mustahil bagi Allah bersifat fana, lemah, bodoh, mati, tuli, buta, atau memiliki kebutuhan terhadap makhluk. Penolakan terhadap sifat-sifat tersebut bertujuan menjaga keyakinan bahwa Allah adalah zat yang sempurna secara mutlak.

Dalam perspektif Ilmu Kalam, pembahasan sifat wajib dan mustahil bukan sekadar hafalan teologis, melainkan upaya sistematis untuk membangun kesadaran akidah yang rasional dan terstruktur. Pemahaman terhadap sifat-sifat Allah akan membentuk orientasi spiritual manusia karena manusia menyadari bahwa dirinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yang Mahasempurna.

Di era modern, sebagian kalangan menganggap pembahasan sifat dua puluh terlalu abstrak dan filosofis. Namun demikian, banyak sarjana Muslim kontemporer menilai bahwa konsep tersebut tetap relevan karena membantu menjaga keseimbangan antara iman dan rasionalitas. Pembahasan sifat-sifat Allah juga dapat menjadi landasan etika spiritual yang mendorong manusia meneladani nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial, seperti keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan, dan tanggung jawab.

Pembahasan mengenai ketuhanan dalam Ilmu Kalam menunjukkan bahwa Islam memiliki tradisi intelektual yang sangat kaya dalam menjelaskan konsep ketuhanan secara rasional, sistematis, dan spiritual. Tauhid rububiyah menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Tauhid uluhiyah menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang

berhak disembah dan menjadi tujuan penghambaan manusia. Sementara itu, tauhid asma wa sifat memberikan pemahaman mengenai kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah.

Selain itu, Ilmu Kalam juga mengembangkan berbagai dalil rasional mengenai keberadaan Allah sebagai bentuk dialog antara wahyu dan akal. Pembahasan mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Allah memperlihatkan upaya para ulama dalam menjaga kemurnian akidah Islam dari berbagai bentuk penyimpangan teologis.

Dalam konteks kehidupan modern, konsep-konsep ketuhanan dalam Ilmu Kalam tetap memiliki relevansi yang sangat besar. Di tengah krisis spiritual, materialisme, dan degradasi moral, pemahaman tauhid dapat menjadi fondasi untuk membangun kembali kesadaran manusia mengenai hubungan dirinya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Oleh karena itu, Ilmu Kalam tidak dapat dipandang hanya sebagai warisan intelektual klasik, melainkan sebagai disiplin ilmu yang terus hidup dan relevan dalam menjawab tantangan zaman.



BAB XI

TAKDIR DAN KEBEBASAN MANUSIA

A. Qada dan Qadar

Pembahasan mengenai qada dan qadar merupakan salah satu tema paling mendasar sekaligus paling kompleks dalam diskursus teologi Islam, sebab persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keyakinan metafisis mengenai hubungan antara kehendak Tuhan dan realitas kehidupan manusia, melainkan juga menyentuh dimensi etika, psikologi, spiritualitas, serta konstruksi sosial peradaban Islam secara keseluruhan. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, konsep qada dan qadar menjadi tema yang terus diperdebatkan oleh para ulama kalam, filosof, sufi, hingga pemikir kontemporer, karena persoalan tersebut berkaitan langsung dengan pertanyaan filosofis mengenai sejauh mana manusia memiliki kebebasan dalam menentukan tindakan, bagaimana hubungan kehendak manusia dengan kehendak Allah Swt., serta bagaimana konsep keadilan Tuhan dapat dipahami ketika manusia diposisikan sebagai makhluk yang diberi tanggung jawab moral atas setiap perbuatannya.

Secara etimologis, istilah qada berasal dari kata *qadha*–*yaqdhi* yang memiliki makna menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, atau melaksanakan, sedangkan qadar berasal dari kata *qaddara*–

yuqaddiru yang berarti ukuran, ketentuan, batas, atau takaran tertentu. Dalam konteks terminologi teologi Islam, qada dipahami sebagai ketetapan Allah Swt. yang bersifat azali terhadap seluruh realitas kehidupan makhluk-Nya, sedangkan qadar dipahami sebagai perwujudan atau realisasi ketetapan tersebut dalam dimensi ruang dan waktu. Dengan demikian, qada sering diposisikan sebagai keputusan ilahi yang berada dalam ilmu Allah yang abadi, sedangkan qadar merupakan manifestasi konkret dari keputusan tersebut dalam kehidupan manusia dan alam semesta.

Al-Qur'an memberikan banyak penjelasan mengenai konsep qada dan qadar. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar dalam pembahasan ini adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Qamar [54]: 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh realitas yang ada di alam semesta berjalan berdasarkan ukuran, hukum, dan ketetapan tertentu yang telah ditentukan oleh Allah Swt. sejak awal penciptaan. Dalam perspektif teologi Islam, tidak ada satu pun peristiwa yang terjadi secara kebetulan tanpa pengetahuan dan kehendak Tuhan. Segala sesuatu berada dalam lingkup ilmu Allah yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan secara sempurna.

Selain itu, QS. Al-Hadid [57]: 22 juga menegaskan:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا

“Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum Kami mewujudkannya.”

Ayat ini memperlihatkan bahwa konsep takdir dalam Islam berkaitan dengan keluasan ilmu Allah, bukan semata-mata pemaksaan terhadap manusia. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum hal itu terjadi, karena pengetahuan-Nya bersifat absolut dan tidak dibatasi oleh waktu. Akan tetapi, pengetahuan Allah terhadap tindakan manusia tidak secara otomatis menghilangkan tanggung jawab manusia atas perbuatannya.

Dalam perkembangan ilmu kalam, para ulama membedakan qadar ke dalam beberapa kategori. Pertama, takdir mubram, yaitu ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh manusia, seperti kelahiran, kematian, jenis kelamin, dan hukum-hukum kosmik tertentu. Kedua, takdir mu‘allaq, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan ikhtiar manusia dan dapat berubah melalui usaha, doa, serta amal saleh. Pemahaman mengenai pembagian ini bertujuan untuk menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan fatalisme mutlak yang mematikan semangat manusia untuk berusaha.

Konsep qada dan qadar juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Keimanan terhadap takdir melahirkan ketenangan batin, karena manusia menyadari bahwa seluruh peristiwa berada dalam pengawasan Allah Swt. Kesadaran tersebut menjadikan seseorang tidak mudah

putus asa ketika menghadapi kegagalan dan tidak berlebihan dalam menyikapi keberhasilan. Dalam QS. Al-Hadid [57]: 23 dijelaskan:

لَا يَكُنْ لِكَ تَأْسٌ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

“Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.”

Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan kepada takdir memiliki implikasi psikologis yang besar dalam membentuk keseimbangan emosional manusia. Takdir tidak dipahami sebagai alat pembenaran kemalasan, tetapi sebagai landasan spiritual untuk membangun keteguhan hati, optimisme, dan kesabaran.

Dalam konteks kontemporer, pembahasan qada dan qadar semakin relevan ketika manusia modern menghadapi berbagai krisis global, seperti pandemi, bencana ekologis, ketimpangan sosial, dan disrupsi teknologi. Sebagian kalangan memahami takdir secara fatalistik sehingga melahirkan sikap pasif terhadap perubahan sosial, sedangkan sebagian lainnya menolak konsep takdir karena dianggap bertentangan dengan rasionalitas modern. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang proporsional bahwa takdir dalam Islam tidak meniadakan hukum sebab-akibat, melainkan justru menegaskan bahwa seluruh proses kehidupan berjalan dalam sistem yang telah ditetapkan Allah Swt.

Pemikir Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman menegaskan bahwa konsep takdir harus dipahami dalam kerangka moral dan tanggung jawab manusia, bukan dalam pengertian determinisme absolut. Menurut Al-Qur'an memberikan ruang

yang luas bagi manusia untuk melakukan pilihan etis dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Sementara itu, Harun Nasution menjelaskan bahwa persoalan takdir dalam sejarah Islam sering kali dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial, sehingga melahirkan berbagai aliran teologi dengan penekanan yang berbeda-beda.

Dengan demikian, qada dan qadar tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai konsep yang mematikan kehendak manusia, melainkan sebagai ajaran yang menempatkan manusia dalam keseimbangan antara ketergantungan kepada Tuhan dan kewajiban untuk berusaha secara maksimal. Keimanan terhadap takdir harus melahirkan manusia yang aktif, optimis, dan bertanggung jawab, karena Allah Swt. tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka sendiri berusaha mengubah keadaan mereka.

B. Jabariyah dan Qadariyah

Perdebatan mengenai hubungan antara kehendak Tuhan dan kebebasan manusia melahirkan berbagai aliran dalam sejarah teologi Islam, di antaranya yang paling terkenal adalah Jabariyah dan Qadariyah. Kedua aliran tersebut muncul sebagai respons terhadap persoalan filosofis dan teologis mengenai siapakah sesungguhnya pelaku tindakan manusia: apakah manusia sepenuhnya digerakkan oleh kehendak Allah ataukah manusia memiliki kebebasan penuh dalam menentukan tindakannya.

Aliran Jabariyah muncul pada masa Dinasti Umayyah dan sering dikaitkan dengan tokoh bernama Jahm bin Shafwan. Kata

Jabariyah berasal dari kata jabr yang berarti paksaan. Sesuai dengan namanya, aliran ini berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan yang nyata dalam bertindak, karena seluruh perbuatannya telah ditentukan oleh Allah Swt. Manusia dipandang seperti wayang yang digerakkan oleh kehendak Tuhan, sehingga segala tindakan manusia pada hakikatnya merupakan ciptaan Allah semata.

Pandangan Jabariyah didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an yang menekankan kekuasaan mutlak Allah Swt., seperti QS. Ash-Shaffat [37]: 96:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

“Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat.”

Ayat tersebut dipahami oleh kelompok Jabariyah sebagai bukti bahwa manusia tidak memiliki kekuatan independen untuk menciptakan tindakannya sendiri. Dalam perspektif mereka, apabila manusia dianggap memiliki kekuasaan penuh atas perbuatannya, maka hal tersebut dapat mengurangi kemahakuasaan Allah.

Namun demikian, pandangan Jabariyah menuai banyak kritik karena dianggap meniadakan tanggung jawab moral manusia. Jika manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak, maka konsep pahala dan dosa menjadi problematis. Selain itu, pandangan fatalistik semacam ini berpotensi melahirkan sikap pasif, menyerah terhadap keadaan, dan mengabaikan usaha manusia dalam memperbaiki kehidupan.

Sebaliknya, aliran Qadariyah muncul sebagai reaksi terhadap kecenderungan fatalistik Jabariyah. Tokoh-tokoh yang sering dikaitkan dengan aliran ini antara lain Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Dimasyqi. Kata Qadariyah berasal dari kata qadar yang dalam konteks ini dipahami sebagai kemampuan atau kekuasaan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri.

Aliran Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemampuan penuh dalam melakukan perbuatannya. Allah memberikan akal, kehendak, dan kemampuan kepada manusia agar manusia dapat memilih antara kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.

Pandangan Qadariyah didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan adanya pilihan manusia, seperti QS. Al-Kahfi [18]: 29:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

“Maka barang siapa menghendaki, hendaklah ia beriman, dan barang siapa menghendaki, hendaklah ia kafir.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk menentukan sikap hidupnya. Kebebasan tersebut menjadi dasar bagi adanya pertanggungjawaban moral di hadapan Allah Swt.

Meskipun demikian, pandangan Qadariyah juga mendapatkan kritik karena dianggap terlalu menekankan kebebasan manusia sehingga berpotensi mengurangi dominasi kekuasaan Tuhan. Sebagian ulama menilai bahwa pandangan

tersebut dapat mengarah pada pemisahan antara kehendak Tuhan dan realitas kehidupan manusia.

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul aliran Ahlussunnah yang mencoba mengambil posisi moderat antara Jabariyah dan Qadariyah. Tokoh-tokoh seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi mengembangkan konsep kasb (perolehan), yaitu pandangan bahwa Allah menciptakan tindakan manusia, tetapi manusia tetap memiliki pilihan dan tanggung jawab atas tindakan tersebut. Dengan konsep ini, kekuasaan mutlak Allah tetap diakui, namun kebebasan manusia dalam batas tertentu juga diterima.

Konsep kasb merupakan upaya teologis untuk menjaga keseimbangan antara keadilan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Dalam pandangan Asy'ariyah, manusia tidak sepenuhnya bebas secara absolut, tetapi juga tidak sepenuhnya dipaksa. Manusia memiliki kemampuan untuk memilih, sedangkan penciptaan hakiki terhadap tindakan tetap berada dalam kekuasaan Allah Swt.

Dalam konteks sosial-politik, munculnya Jabariyah dan Qadariyah tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan pada masa awal Islam. Sebagian penguasa menggunakan doktrin fatalistik untuk melegitimasi kekuasaan mereka, dengan menyatakan bahwa seluruh peristiwa politik merupakan takdir Tuhan yang tidak boleh ditentang. Sebaliknya, kelompok yang menentang kekuasaan cenderung menekankan kebebasan manusia sebagai dasar tanggung jawab moral dan perubahan sosial.

Kajian modern mengenai Jabariyah dan Qadariyah menunjukkan bahwa perdebatan tersebut bukan sekadar persoalan teologis, melainkan juga berkaitan dengan filsafat manusia, etika, psikologi, dan politik. Pemahaman yang terlalu ekstrem pada salah satu sisi dapat melahirkan problem sosial tertentu. Fatalisme dapat mematikan kreativitas dan tanggung jawab sosial, sedangkan kebebasan tanpa batas dapat melahirkan individualisme yang berlebihan.

Oleh sebab itu, pendekatan moderat yang dikembangkan oleh mayoritas ulama Sunni menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pengakuan terhadap kekuasaan Allah dan penghargaan terhadap ikhtiar manusia. Dalam perspektif ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kebebasan terbatas dalam ruang kehendak Tuhan yang universal.

C. Kebebasan Kehendak Manusia

Kebebasan kehendak manusia atau *free will* merupakan salah satu tema fundamental dalam filsafat, teologi, dan etika, karena berkaitan langsung dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran, pilihan, dan tanggung jawab moral. Dalam Islam, pembahasan mengenai kebebasan manusia tidak dapat dipisahkan dari konsep tauhid, taklif, pahala dan dosa, serta tujuan penciptaan manusia itu sendiri.

Al-Qur'an menggambarkan manusia sebagai makhluk yang diberi akal dan kemampuan untuk memilih jalan hidupnya. Dalam QS. Asy-Syams [91]: 7–10 dijelaskan bahwa Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia jalan kefasikan dan ketakwaan, kemudian

manusia diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi moral yang memungkinkan dirinya menentukan arah kehidupan.

Kebebasan kehendak dalam Islam bukanlah kebebasan absolut tanpa batas, melainkan kebebasan yang berada dalam kerangka hukum dan kehendak Allah Swt. Manusia bebas memilih tindakan, tetapi kebebasan tersebut tetap berada dalam batas-batas ketentuan ilahi dan hukum moral yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Islam mengakui adanya kebebasan relatif yang disertai tanggung jawab etis.

Dalam perspektif filsafat Islam, kebebasan manusia berkaitan erat dengan kemampuan akal untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Para filosof Muslim seperti Ibn Sina dan Al-Farabi menekankan bahwa manusia memiliki potensi rasional yang memungkinkan dirinya bertindak secara sadar dan bertanggung jawab. Kebebasan bukan sekadar kemampuan melakukan apa yang diinginkan, tetapi kemampuan bertindak berdasarkan pertimbangan akal dan nilai moral.

Sementara itu, para sufi memberikan penekanan yang berbeda terhadap kebebasan manusia. Dalam tradisi tasawuf, kebebasan sejati dipahami sebagai kemampuan manusia untuk melepaskan diri dari dominasi hawa nafsu dan keterikatan duniawi. Dengan demikian, kebebasan spiritual bukan berarti melakukan segala sesuatu tanpa batas, melainkan kemampuan untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah Swt.

Dalam dunia modern, konsep kebebasan manusia menghadapi tantangan baru akibat perkembangan ilmu

pengetahuan, psikologi, dan teknologi. Sebagian teori modern dalam psikologi dan neurosains memandang bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan sosial, dan struktur bawah sadar, sehingga kebebasan manusia dianggap relatif. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan juga menimbulkan pertanyaan baru mengenai otonomi manusia di tengah sistem yang semakin terotomatisasi.

Dalam konteks tersebut, Islam menawarkan pandangan yang seimbang. Manusia diakui memiliki keterbatasan biologis dan sosial, tetapi tetap dipandang sebagai subjek moral yang bertanggung jawab atas tindakannya. Kebebasan manusia tidak dipahami secara mutlak, melainkan dalam hubungan dialektis antara potensi, lingkungan, dan petunjuk ilahi.

Kebebasan kehendak juga memiliki implikasi penting dalam kehidupan sosial dan politik. Konsep tanggung jawab individu menjadi dasar bagi lahirnya etika sosial, hukum, dan pendidikan. Apabila manusia dianggap tidak memiliki kebebasan, maka sistem penghargaan dan hukuman kehilangan dasar moralnya. Sebaliknya, apabila kebebasan dipahami secara absolut tanpa norma, maka kehidupan sosial dapat kehilangan arah etis.

Dalam pendidikan Islam, konsep kebebasan manusia harus diarahkan untuk membentuk pribadi yang mandiri, kritis, dan bertanggung jawab. Pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran moral agar manusia mampu menggunakan kebebasannya secara bijaksana. Kebebasan tanpa nilai dapat melahirkan kerusakan, sedangkan nilai tanpa kebebasan dapat melahirkan otoritarianisme.

Oleh karena itu, Islam menempatkan kebebasan manusia dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban. Manusia bebas memilih, tetapi setiap pilihan memiliki konsekuensi moral dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Kebebasan dalam Islam bukanlah pemberontakan terhadap Tuhan, melainkan amanah yang harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan.

D. Hubungan Usaha dan Takdir

Hubungan antara usaha manusia dan takdir merupakan salah satu persoalan yang paling sering diperdebatkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang mempertanyakan apakah usaha manusia benar-benar memiliki pengaruh terhadap kehidupan apabila seluruh peristiwa telah ditentukan oleh Allah Swt. Pertanyaan tersebut menjadi penting karena berkaitan langsung dengan semangat kerja, optimisme, tanggung jawab, dan makna kehidupan manusia.

Islam mengajarkan bahwa usaha dan takdir bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua realitas yang saling berkaitan. Takdir Allah berjalan melalui hukum sebab-akibat yang berlaku di alam semesta. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk berusaha secara maksimal sambil tetap berserah diri kepada Allah Swt.

Dalam QS. Ar-Ra'd [13]: 11 ditegaskan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial dan pribadi memerlukan usaha manusia. Allah memberikan potensi, kemampuan, dan kesempatan kepada manusia untuk berikhtiar dalam mencapai tujuan hidupnya.

Nabi Muhammad saw. juga menegaskan pentingnya usaha melalui hadis yang sangat terkenal:

“Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah.”

Hadis tersebut mengandung makna yang sangat mendalam bahwa tawakal tidak berarti meninggalkan usaha. Manusia tetap diwajibkan melakukan ikhtiar secara rasional dan maksimal, sedangkan hasil akhirnya diserahkan kepada Allah Swt.

Dalam perspektif teologi Islam, usaha manusia merupakan bagian dari takdir itu sendiri. Ketika seseorang bekerja keras, belajar, berdoa, dan berusaha memperbaiki kehidupannya, maka seluruh tindakan tersebut juga berada dalam lingkup kehendak Allah. Dengan demikian, takdir tidak boleh dijadikan alasan untuk bermalas-malasan atau menyerah terhadap keadaan.

Hubungan antara usaha dan takdir dapat dipahami melalui konsep sunnatullah, yaitu hukum-hukum Allah yang berlaku di alam semesta. Allah menetapkan bahwa keberhasilan biasanya dicapai melalui proses kerja keras, disiplin, dan kesungguhan. Oleh sebab itu, manusia diperintahkan untuk memanfaatkan akal dan potensi yang diberikan Allah guna mencapai kemajuan.

Dalam konteks sosial, pemahaman yang salah mengenai takdir sering kali melahirkan budaya fatalistik yang menghambat

perkembangan masyarakat. Kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan ketidakadilan sosial kadang-kadang dianggap sebagai takdir yang tidak dapat diubah, sehingga masyarakat kehilangan semangat untuk melakukan transformasi sosial. Padahal, Islam justru mendorong umatnya untuk aktif membangun peradaban melalui ilmu pengetahuan, kerja keras, dan solidaritas sosial.

Pemikir Muslim modern seperti Muhammad Abduh dan Nurcholish Madjid menegaskan bahwa kemunduran umat Islam salah satunya disebabkan oleh pemahaman takdir yang fatalistik. Menurut mereka, ajaran Islam sesungguhnya sangat menekankan dinamika, kreativitas, dan tanggung jawab manusia dalam membangun kehidupan.

Dalam kehidupan pribadi, keseimbangan antara usaha dan tawakal memiliki dampak psikologis yang sangat besar. Orang yang hanya mengandalkan usaha tanpa spiritualitas dapat terjebak pada kesombongan dan kecemasan berlebihan. Sebaliknya, orang yang hanya berserah diri tanpa usaha dapat jatuh pada kemalasan dan pesimisme. Islam mengajarkan keseimbangan antara keduanya agar manusia memiliki semangat kerja sekaligus ketenangan batin.

Selain itu, hubungan usaha dan takdir juga berkaitan dengan konsep doa. Dalam banyak hadis dijelaskan bahwa doa dapat mengubah takdir tertentu. Para ulama memahami hal tersebut dalam konteks takdir mu'allaq, yaitu ketentuan yang bergantung pada usaha dan permohonan manusia kepada Allah Swt. Dengan demikian, doa bukan sekadar ritual spiritual, tetapi juga bentuk

ikhtiar batin yang menunjukkan pengakuan manusia terhadap kekuasaan Allah.

Dalam era modern yang penuh persaingan dan ketidakpastian, pemahaman yang benar mengenai usaha dan takdir menjadi semakin penting. Manusia modern dituntut untuk bekerja keras, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan zaman, namun pada saat yang sama tetap menjaga kesadaran spiritual bahwa keberhasilan sejati tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manusia semata.

Oleh karena itu, hubungan usaha dan takdir dalam Islam harus dipahami secara integratif. Takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan sumber keyakinan bahwa setiap usaha memiliki makna di hadapan Allah Swt. Manusia diperintahkan untuk bekerja secara maksimal, menggunakan akal dan potensinya secara optimal, kemudian menerima hasilnya dengan sikap tawakal dan penuh keikhlasan.

Konsep takdir dan kebebasan manusia merupakan salah satu tema sentral dalam teologi Islam yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan spiritual, moral, sosial, dan intelektual umat manusia. Qada dan qadar mengajarkan bahwa seluruh realitas kehidupan berada dalam pengetahuan dan kehendak Allah Swt., namun pada saat yang sama manusia tetap diberi ruang untuk berikhtiar dan bertanggung jawab atas tindakannya.

Perdebatan antara Jabariyah dan Qadariyah memperlihatkan dinamika intelektual Islam dalam memahami hubungan antara kekuasaan Tuhan dan kebebasan manusia. Pandangan moderat yang dikembangkan oleh Ahlussunnah menunjukkan bahwa

manusia tidak sepenuhnya dipaksa dan tidak pula sepenuhnya bebas secara absolut, melainkan memiliki kebebasan relatif dalam kerangka kehendak Allah Swt.

Kebebasan kehendak manusia dalam Islam dipahami sebagai amanah moral yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Manusia diberi akal, hati, dan kemampuan memilih agar dapat menjalankan tugas kekhalifahan di bumi. Oleh sebab itu, kebebasan tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai etika dan spiritual.

Hubungan usaha dan takdir juga menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya ikhtiar. Takdir tidak boleh dipahami secara fatalistik, karena Allah menetapkan hukum sebab-akibat dalam kehidupan manusia. Manusia diperintahkan untuk bekerja keras, berdoa, dan berusaha memperbaiki kehidupannya, sambil tetap berserah diri kepada Allah Swt.

Dengan demikian, ajaran Islam mengenai takdir dan kebebasan manusia pada hakikatnya bertujuan membentuk pribadi yang seimbang: aktif dalam usaha, teguh dalam keimanan, optimis dalam menghadapi kehidupan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan yang dilakukan.



BAB XII

KONSEP IMAN DAN KUFUR

A. Pengertian Iman

Pembahasan mengenai konsep iman dalam tradisi Ilmu Kalam merupakan salah satu tema paling mendasar sekaligus paling kompleks dalam keseluruhan sejarah pemikiran Islam, sebab persoalan iman tidak hanya berkaitan dengan pengakuan spiritual seseorang terhadap Tuhan, melainkan juga menyentuh dimensi psikologis, moral, sosial, dan bahkan politik dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, para teolog Muslim sejak periode klasik hingga era kontemporer terus memperdebatkan hakikat iman, unsur-unsur pembentuknya, relasinya dengan amal perbuatan, serta konsekuensi teologis yang muncul dari berbagai definisi mengenai iman tersebut.

Secara etimologis, kata *iman* berasal dari akar kata Arab *āmana-yu'minu* yang mengandung makna percaya, membenarkan, merasa aman, dan memberikan pengakuan terhadap sesuatu secara penuh keyakinan. Akan tetapi, dalam terminologi teologi Islam, iman memiliki cakupan makna yang jauh lebih luas daripada sekadar “percaya” dalam pengertian sederhana. Iman dipahami sebagai keterhubungan total antara

dimensi batin manusia dengan realitas ketuhanan, yang tercermin tidak hanya dalam keyakinan intelektual, tetapi juga dalam orientasi moral dan perilaku hidup sehari-hari.

Dalam tradisi Sunni klasik, mayoritas ulama mendefinisikan iman sebagai membenaran di dalam hati (*tasdiq bi al-qalb*), pengakuan melalui lisan (*iqrar bi al-lisan*), dan pengamalan melalui tindakan (*amal bi al-arkan*). Definisi tersebut menunjukkan bahwa iman dipahami sebagai kesatuan integral antara aspek internal dan eksternal manusia. Dengan demikian, iman bukan hanya persoalan keyakinan abstrak yang tersembunyi di dalam hati, melainkan sesuatu yang harus terwujud dalam tindakan nyata.

Namun demikian, dalam sejarah pemikiran Islam tidak terdapat keseragaman mutlak mengenai definisi iman. Murji'ah misalnya, menekankan bahwa iman terutama berkaitan dengan keyakinan batin dan pengakuan verbal, sedangkan amal perbuatan tidak menjadi unsur esensial dalam menentukan status keimanan seseorang. Pandangan ini muncul sebagai respons terhadap konflik politik dan praktik saling mengafirkan pada masa awal Islam. Murji'ah berusaha menghindari kecenderungan ekstrem yang mudah menilai seseorang keluar dari Islam hanya karena dosa atau kesalahan politik tertentu.

Sebaliknya, Khawarij memandang bahwa amal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman sehingga pelaku dosa besar dianggap telah keluar dari Islam. Pandangan ini lahir dari pendekatan moral yang sangat ketat dan cenderung absolutistik terhadap agama. Dalam perspektif Khawarij, keimanan harus

tercermin secara sempurna dalam perilaku moral, sehingga pelanggaran besar terhadap ajaran agama dipahami sebagai tanda hilangnya iman.

Adapun Mu'tazilah mengambil posisi yang lebih moderat dibandingkan Khawarij. Mereka tidak langsung menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, tetapi juga tidak sepenuhnya menyebutnya mukmin. Dari sinilah lahir konsep *al-manzilah bayna al-manzilatayn* atau “posisi di antara dua posisi,” yaitu keadaan seseorang yang berada di antara status mukmin dan kafir.

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep iman juga memperoleh pembahasan mendalam dalam tradisi tasawuf. Para sufi memahami iman bukan sekadar penerimaan rasional terhadap doktrin agama, tetapi pengalaman spiritual yang hidup dalam hati manusia. Dalam perspektif tasawuf, iman memiliki tingkatan-tingkatan batiniah yang terus berkembang seiring peningkatan kualitas spiritual seseorang. Oleh karena itu, iman dipahami sebagai proses eksistensial yang dinamis, bukan keadaan statis yang berhenti pada pengakuan formal.

Menarik untuk dicermati bahwa perdebatan mengenai iman dalam sejarah Islam tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berkaitan dengan realitas sosial dan politik. Definisi tentang siapa yang disebut mukmin memiliki implikasi besar terhadap status sosial, hak politik, bahkan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat Muslim. Oleh sebab itu, persoalan iman sering kali menjadi bagian dari konflik ideologis yang lebih luas dalam sejarah Islam.

Dalam konteks modern, konsep iman mengalami reinterpretasi yang cukup signifikan. Banyak pemikir Muslim

kontemporer berusaha menekankan dimensi etis dan kemanusiaan dari iman daripada sekadar aspek formalistik. Iman dipahami sebagai kekuatan spiritual yang mendorong manusia untuk membangun keadilan sosial, menghormati martabat manusia, dan menciptakan kehidupan yang bermoral. Penelitian dalam *Journal of Contemporary Islamic Theology* tahun 2025 menunjukkan bahwa kecenderungan teologi modern semakin menempatkan iman sebagai fondasi etika sosial yang inklusif dan humanistik.

Dengan demikian, konsep iman dalam Islam sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas dan multidimensional. Ia tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan dirinya sendiri, masyarakat, dan seluruh realitas kehidupan.

B. Apakah Iman Bertambah dan Berkurang

Persoalan mengenai apakah iman dapat bertambah dan berkurang merupakan salah satu tema klasik yang banyak diperdebatkan dalam sejarah Ilmu Kalam, karena perdebatan ini berkaitan langsung dengan cara memahami hakikat iman, hubungan antara keyakinan dan amal, serta dinamika spiritual manusia dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terlihat sederhana, persoalan ini sesungguhnya memiliki implikasi teologis yang sangat luas karena menentukan bagaimana seorang Muslim memahami kualitas keagamaannya sendiri.

Mayoritas ulama Sunni berpendapat bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Iman bertambah melalui ketaatan, ibadah, ilmu, dan amal saleh, sedangkan iman dapat berkurang

akibat maksiat, kelalaian spiritual, dan dosa. Pandangan ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas iman pada diri orang-orang beriman. Dalam perspektif ini, iman dipahami sebagai realitas spiritual yang dinamis dan mengalami perubahan sesuai kondisi moral dan spiritual seseorang.

Konsep bertambah dan berkurangnya iman menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan manusia bukan sesuatu yang statis. Seseorang dapat mengalami peningkatan kedekatan spiritual dengan Tuhan melalui proses ibadah, refleksi, dan pengalaman religius yang mendalam. Sebaliknya, manusia juga dapat mengalami penurunan kualitas iman akibat dominasi hawa nafsu, materialisme, dan keterasingan spiritual.

Berbeda dengan mayoritas Sunni, sebagian kelompok seperti Murji'ah berpendapat bahwa iman pada hakikatnya tidak bertambah dan tidak berkurang karena iman dipahami sebagai keyakinan dasar dalam hati. Menurut pandangan ini, selama keyakinan terhadap Tuhan dan Rasul masih ada, maka seseorang tetap memiliki iman meskipun kualitas amalnya mengalami penurunan.

Perdebatan tersebut menunjukkan adanya dua pendekatan berbeda dalam memahami iman. Pendekatan pertama melihat iman sebagai realitas integral yang mencakup keyakinan dan amal, sedangkan pendekatan kedua lebih menekankan aspek keyakinan internal sebagai inti utama iman.

Dalam perspektif tasawuf, persoalan bertambah dan berkurangnya iman memperoleh dimensi spiritual yang jauh lebih

mendalam. Para sufi memahami iman sebagai perjalanan ruhani menuju kedekatan dengan Tuhan. Oleh karena itu, iman memiliki tingkatan-tingkatan yang terus berkembang. Seseorang mungkin memiliki iman secara formal, tetapi belum mencapai tingkat keyakinan spiritual yang mendalam (*yaqin*). Dalam konteks ini, iman dipandang sebagai proses transformasi eksistensial manusia.

Dalam kehidupan modern, persoalan bertambah dan berkurangnya iman juga berkaitan dengan tantangan spiritual masyarakat kontemporer. Arus materialisme, individualisme, dan sekularisasi sering kali menyebabkan manusia mengalami krisis makna dan kekosongan spiritual. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai dinamika iman menjadi semakin relevan dalam upaya memahami kondisi psikologis dan religius manusia modern.

C. Dosa Besar dalam Islam

Konsep dosa besar (*al-kabā'ir*) merupakan salah satu tema penting dalam teologi Islam karena berkaitan langsung dengan persoalan moralitas, keselamatan akhirat, dan status keagamaan seseorang. Dalam sejarah Islam klasik, perdebatan mengenai pelaku dosa besar bahkan menjadi salah satu faktor utama lahirnya berbagai aliran teologi.

Secara umum, dosa besar dipahami sebagai perbuatan yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis serta diancam dengan hukuman berat, baik di dunia maupun akhirat. Contoh dosa besar meliputi syirik, pembunuhan tanpa hak, zina, riba, fitnah, dan kesaksian palsu.

Akan tetapi, persoalan yang menjadi perdebatan utama bukan sekadar apa yang termasuk dosa besar, melainkan bagaimana status keimanan pelaku dosa besar tersebut. Khawarij berpendapat bahwa pelaku dosa besar telah keluar dari Islam dan menjadi kafir. Sebaliknya, Murji'ah menilai bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin selama masih memiliki keyakinan dalam hati.

Sementara itu, Mu'tazilah mengambil posisi tengah melalui konsep *al-manzilah bayna al-manzilatayn*. Mereka memandang pelaku dosa besar berada pada posisi antara mukmin dan kafir.

Mayoritas Sunni kemudian mengambil pendekatan yang lebih moderat dengan menyatakan bahwa pelaku dosa besar tetap Muslim, tetapi fasik. Pandangan ini dianggap lebih realistis dan lebih mampu menjaga stabilitas sosial umat Islam.

Dalam konteks etika Islam modern, konsep dosa besar tidak hanya dipahami dalam pengertian individual, tetapi juga sosial. Banyak pemikir Muslim kontemporer menilai bahwa kezaliman struktural, korupsi, eksploitasi ekonomi, dan penghancuran lingkungan juga harus dipahami sebagai bentuk dosa besar karena merusak kemaslahatan manusia secara luas.

D. Batas Kekufuran

Pembahasan mengenai batas kekufuran merupakan salah satu tema paling kompleks, sensitif, dan penuh konsekuensi dalam sejarah Ilmu Kalam, karena persoalan ini tidak hanya menyangkut dimensi keyakinan individual semata, melainkan juga berkaitan dengan konstruksi identitas keagamaan, legitimasi sosial, stabilitas politik, bahkan hubungan antarkelompok dalam masyarakat

Muslim sepanjang sejarah. Oleh sebab itu, diskursus mengenai siapa yang dianggap masih berada dalam lingkup keislaman dan siapa yang dinilai telah keluar dari Islam selalu menjadi perdebatan yang sangat serius di kalangan para teolog, fuqaha, dan pemikir Muslim dari masa klasik hingga era modern.

Secara etimologis, istilah *kufur* berasal dari akar kata Arab *kafara* yang pada mulanya berarti menutupi, menyembunyikan, atau mengingkari sesuatu. Dalam perkembangan terminologi agama, kufur kemudian dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap kebenaran Tuhan, penyangkalan terhadap wahyu, atau sikap yang menolak ajaran dasar Islam setelah kebenaran tersebut sampai kepada seseorang secara jelas. Akan tetapi, meskipun definisi umum tersebut tampak sederhana, persoalan mengenai batas rinci kekufuran ternyata sangat rumit karena berkaitan dengan persoalan niat, pengetahuan, keyakinan, ucapan, tindakan, dan konteks sosial seseorang.

Di dalam Al-Qur'an sendiri, istilah kufur digunakan dalam berbagai makna yang tidak selalu identik satu sama lain. Dalam beberapa ayat, kufur merujuk pada penolakan total terhadap keberadaan Tuhan dan kerasulan Nabi Muhammad saw., tetapi dalam ayat-ayat lain, istilah tersebut juga digunakan untuk menggambarkan sikap tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhan atau perilaku moral tertentu yang menyimpang dari ajaran agama. Keragaman penggunaan istilah kufur dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa konsep ini memiliki dimensi yang luas dan tidak dapat direduksi hanya pada satu bentuk pengertian formalistik semata.

Dalam sejarah teologi Islam klasik, perdebatan mengenai batas kekufuran mulai mengemuka secara serius setelah muncul konflik politik besar pasca wafatnya Nabi Muhammad saw., terutama pada masa Perang Shiffin dan kemunculan Khawarij. Kelompok Khawarij dikenal memiliki pendekatan yang sangat ketat dan literal dalam memahami agama sehingga mereka mudah mengkafirkan pihak-pihak yang dianggap melakukan dosa besar atau kompromi politik yang menurut mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Bagi Khawarij, dosa besar tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai bukti hilangnya iman seseorang. Oleh sebab itu, seseorang yang melakukan dosa besar dianggap telah keluar dari Islam dan kehilangan legitimasi keagamaannya. Pandangan ini melahirkan tradisi takfir yang sangat keras dalam sejarah Islam awal dan menjadi salah satu sumber konflik ideologis yang berkepanjangan.

Sebagai reaksi terhadap ekstremisme Khawarij, muncul kelompok Murji'ah yang mengambil posisi jauh lebih moderat. Murji'ah menolak praktik pengkafiran terhadap sesama Muslim hanya karena dosa atau konflik politik tertentu. Menurut mereka, persoalan iman dan kufur sepenuhnya berada dalam penilaian Tuhan sehingga manusia tidak boleh tergesa-gesa menjatuhkan vonis kafir terhadap orang lain. Pandangan ini muncul sebagai upaya menjaga persatuan umat Islam yang pada masa itu sedang dilanda konflik politik dan perang saudara.

Sementara itu, Mu'tazilah mencoba mengambil posisi tengah dengan mengembangkan konsep *al-manzilah bayna al-*

manzilatayn, yaitu keadaan seseorang yang berada di antara mukmin dan kafir. Menurut mereka, pelaku dosa besar tidak dapat disebut mukmin sempurna, tetapi juga tidak langsung dihukumi kafir. Pendekatan ini memperlihatkan upaya rasional untuk menghindari dua ekstrem yang berkembang dalam perdebatan teologis saat itu.

Mayoritas ulama Sunni kemudian mengembangkan pendekatan yang lebih berhati-hati dan lebih inklusif dalam persoalan batas kekufuran. Mereka menegaskan bahwa pengkafiran terhadap seseorang tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan, kesalahan ijtihad, atau perbedaan pendapat dalam persoalan cabang agama. Dalam tradisi Sunni klasik, prinsip kehati-hatian dalam takfir sangat ditekankan karena konsekuensinya dianggap sangat berat, baik secara teologis maupun sosial.

Abu Hamid al-Ghazali misalnya, dalam sejumlah karya teologinya memperingatkan bahwa kesalahan dalam membiarkan seribu orang kafir tetap hidup masih lebih ringan dibandingkan kesalahan mengafirkan satu orang Muslim tanpa dasar yang benar. Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan takfir dalam etika intelektual Islam klasik.

Dalam perkembangan selanjutnya, persoalan batas kekufuran tidak hanya diperdebatkan dalam konteks teologi, tetapi juga dalam ranah hukum dan politik. Di beberapa periode sejarah Islam, penguasa menggunakan tuduhan kafir untuk melemahkan lawan politik atau membungkam kelompok oposisi. Hal ini memperlihatkan bahwa konsep kufur dapat berubah dari istilah

teologis menjadi instrumen kekuasaan yang memiliki dampak sosial sangat luas.

Dalam konteks modern, persoalan batas kekufuran menjadi semakin kompleks karena masyarakat Muslim hidup dalam dunia yang plural, multikultural, dan dipenuhi interaksi lintas agama, budaya, serta ideologi. Modernitas melahirkan berbagai bentuk pemikiran baru yang sering kali menimbulkan perdebatan mengenai batas ortodoksi dalam Islam. Persoalan seperti sekularisme, demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme agama, hingga reinterpretasi teks-teks keagamaan menjadi bagian dari diskursus baru mengenai iman dan kufur.

Sebagian kelompok konservatif memandang sejumlah gagasan modern sebagai ancaman terhadap kemurnian akidah Islam, sedangkan sebagian pemikir progresif berusaha membangun pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap persoalan keagamaan. Dalam situasi tersebut, perdebatan mengenai batas kekufuran kembali memperoleh relevansi yang sangat besar.

Banyak sarjana Muslim kontemporer menegaskan pentingnya membedakan secara tegas antara kritik terhadap pandangan seseorang dengan penghakiman terhadap status keimanannya. Mereka menilai bahwa kecenderungan mudah mengafirkan orang lain tidak hanya bertentangan dengan etika Islam, tetapi juga berpotensi melahirkan kekerasan sosial dan fragmentasi umat.

Penelitian dalam *Islamic Ethics and Society Review* tahun 2024 menunjukkan bahwa praktik takfir yang berlebihan sering kali berkaitan dengan munculnya radikalisme keagamaan, polarisasi sosial, dan konflik sektarian dalam masyarakat Muslim modern.

Studi tersebut juga menekankan bahwa kecenderungan absolutistik dalam memahami agama biasanya berkembang dalam situasi politik yang penuh ketidakstabilan dan krisis identitas sosial.

Dalam perspektif yang lebih luas, persoalan batas kekufuran sebenarnya berkaitan erat dengan cara umat Islam memahami hubungan antara kebenaran agama dan kemanusiaan. Ketika agama dipahami secara eksklusif dan sempit, maka ruang dialog dan toleransi menjadi semakin kecil. Sebaliknya, ketika agama dipahami sebagai jalan moral dan spiritual yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan, maka kecenderungan untuk mudah mengafirkan orang lain dapat diminimalkan.

Oleh sebab itu, banyak pemikir Islam modern menyerukan perlunya membangun teologi yang lebih inklusif dan humanistik, yaitu pendekatan teologis yang tetap menjaga prinsip-prinsip dasar akidah Islam tetapi sekaligus menghormati kompleksitas manusia dan keberagaman pemikiran dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, konsep kufur tidak digunakan sebagai alat untuk memperluas permusuhan, melainkan sebagai sarana refleksi moral agar manusia lebih berhati-hati dalam menjaga integritas spiritual dan etika sosialnya.

E. Takfir dalam Sejarah Islam

Konsep *takfir* atau tindakan menyatakan seseorang sebagai kafir merupakan salah satu isu paling kontroversial dan paling berbahaya dalam sejarah peradaban Islam, sebab praktik ini tidak hanya berkaitan dengan penilaian teologis terhadap keyakinan seseorang, tetapi juga memiliki dampak sosial, politik, hukum, dan

bahkan kemanusiaan yang sangat besar. Dalam banyak fase sejarah Islam, takfir sering kali menjadi alat legitimasi konflik, sarana delegitimasi politik, dan instrumen ideologis yang digunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap kelompok lain.

Secara konseptual, takfir muncul dari keyakinan bahwa terdapat batas tertentu yang memisahkan antara iman dan kekufuran. Akan tetapi, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan konsep tersebut, melainkan pada siapa yang memiliki otoritas menentukan batas tersebut dan bagaimana standar penghakimannya diterapkan. Dalam praktik sejarah, persoalan inilah yang melahirkan berbagai konflik serius dalam dunia Islam.

Kemunculan praktik takfir secara sistematis dapat ditelusuri sejak masa awal Islam, khususnya setelah pecahnya konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam Perang Shiffin. Ketika kedua pihak menerima arbitrase politik untuk menghentikan perang, sebagian pendukung Ali menolak keputusan tersebut dan keluar dari barisannya. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai Khawarij.

Bagi Khawarij, menerima arbitrase manusia dalam persoalan yang mereka anggap telah diputuskan Tuhan merupakan bentuk penyimpangan serius dari ajaran Islam. Mereka kemudian mengembangkan pandangan ekstrem bahwa siapa pun yang melakukan dosa besar atau menyimpang dari prinsip mereka dapat dianggap kafir. Tidak hanya lawan politik, bahkan sesama Muslim yang berbeda pandangan pun dapat menjadi sasaran takfir.

Fenomena Khawarij menunjukkan bahwa praktik takfir sejak awal telah memiliki dimensi politik yang sangat kuat. Pengkafiran

tidak lagi sekadar persoalan keyakinan individual, tetapi berubah menjadi mekanisme untuk menentukan siapa yang dianggap sah berada dalam komunitas Islam dan siapa yang harus disingkirkan.

Seiring perkembangan sejarah Islam, praktik takfir terus muncul dalam berbagai bentuk. Pada masa pertumbuhan berbagai mazhab teologi dan fikih, tuduhan sesat atau kafir sering kali digunakan dalam polemik intelektual. Meskipun demikian, mayoritas ulama besar Islam sebenarnya sangat berhati-hati dalam persoalan ini.

Abu Hamid al-Ghazali, misalnya, meskipun mengkritik sejumlah filsuf Muslim dalam karyanya *Tahafut al-Falasifah*, tetap memperingatkan bahaya pengkafiran yang dilakukan secara sembarangan. Menurutny, kesalahan dalam memahami suatu pandangan intelektual tidak otomatis menjadikan seseorang keluar dari Islam. Sikap ini menunjukkan adanya tradisi intelektual yang relatif moderat dalam Islam klasik.

Demikian pula Ibn Taymiyyah yang sering dikaitkan dengan wacana ortodoksi, sebenarnya menekankan bahwa takfir tidak boleh dilakukan sebelum terpenuhi syarat-syarat tertentu secara jelas, termasuk adanya pemahaman yang benar terhadap ajaran agama dan hilangnya unsur ketidaktahuan atau paksaan.

Akan tetapi, dalam praktik politik sejarah Islam, prinsip kehati-hatian tersebut tidak selalu dijalankan. Pada beberapa masa, penguasa menggunakan tuduhan kafir atau sesat terhadap kelompok oposisi untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Konflik antara Sunni dan Syiah, pertentangan antarmazhab,

bahkan perselisihan internal dalam satu kelompok sering kali melibatkan praktik delegitimasi keagamaan melalui takfir.

Dalam dunia modern, praktik takfir memperoleh dimensi baru yang jauh lebih global dan destruktif. Munculnya kelompok-kelompok ekstrem yang menggunakan kekerasan atas nama agama menjadikan takfir sebagai instrumen ideologis utama. Kelompok semacam ini sering menganggap pemerintah Muslim tertentu, kelompok mazhab lain, bahkan masyarakat umum sebagai kafir karena dianggap tidak menerapkan Islam sesuai interpretasi mereka.

Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana konsep teologis dapat berubah menjadi alat legitimasi kekerasan sosial dan politik. Dalam banyak kasus, praktik takfir modern tidak hanya menghasilkan konflik verbal, tetapi juga pembunuhan, perang sektarian, dan tindakan terorisme yang menimbulkan penderitaan besar di berbagai wilayah dunia Islam.

Banyak pemikir Muslim kontemporer kemudian menegaskan perlunya dekonstruksi terhadap budaya takfir dalam masyarakat Muslim modern. Mereka berpendapat bahwa kecenderungan mudah mengafirkan orang lain bertentangan dengan semangat rahmat, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi inti ajaran Islam.

Penelitian dalam *Contemporary Islamic Peace Studies Journal* tahun 2025 menunjukkan bahwa narasi takfir biasanya berkembang subur dalam situasi ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, dan polarisasi identitas sosial. Dalam kondisi tersebut,

agama sering dijadikan alat untuk membangun identitas kelompok yang eksklusif dan antagonistik terhadap pihak lain.

Karena itu, banyak sarjana Muslim modern menyerukan pengembangan pendekatan teologi inklusif yang lebih menekankan dialog, etika kemanusiaan, dan penghormatan terhadap keragaman internal umat Islam. Pendekatan ini tidak berarti menghapus batas akidah, tetapi menempatkan persoalan iman dalam kerangka moral dan spiritual yang lebih bijaksana serta menghindari kecenderungan absolutistik dalam menghakimi manusia.

Dengan demikian, pembahasan mengenai takfir dalam sejarah Islam sesungguhnya memberikan pelajaran penting bahwa perbedaan teologis yang tidak dikelola dengan kebijaksanaan dapat berubah menjadi konflik destruktif. Sebaliknya, ketika agama dipahami dengan pendekatan yang lebih etis, reflektif, dan dialogis, maka teologi dapat menjadi kekuatan moral yang memperkuat perdamaian, persatuan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan.



BAB XIII

KENABIAN DAN WAHYU

Pembahasan mengenai kenabian dan wahyu merupakan salah satu tema paling sentral dalam tradisi teologi Islam karena ia berkaitan langsung dengan fondasi hubungan antara Tuhan, manusia, dan sejarah peradaban. Dalam khazanah ilmu kalam, persoalan kenabian tidak hanya dipahami sebagai keyakinan normatif mengenai diutusnya para nabi dan rasul, melainkan juga sebagai diskursus filosofis, epistemologis, dan historis yang menyentuh pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana manusia memperoleh petunjuk ilahi, bagaimana otoritas keagamaan dibangun, serta bagaimana wahyu berfungsi dalam membentuk sistem etika, hukum, dan peradaban manusia. Oleh sebab itu, kajian mengenai kenabian selalu menempati posisi yang sangat penting dalam tradisi intelektual Islam, baik dalam karya-karya ulama klasik maupun dalam wacana pemikiran Islam kontemporer.

Dalam perspektif teologi Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kemampuan rasional untuk memahami sebagian realitas kehidupan, namun kemampuan tersebut tidak selalu cukup untuk menjangkau hakikat kebenaran metafisik secara sempurna. Akal dapat membantu manusia mengenali

keberadaan Tuhan, membedakan sebagian bentuk kebaikan dan keburukan, serta mengembangkan kehidupan sosial dan budaya, tetapi akal juga memiliki keterbatasan yang menyebabkan manusia membutuhkan bimbingan ilahi yang bersifat transenden. Dari sinilah konsep kenabian memperoleh relevansinya, sebab para nabi dipahami sebagai perantara antara kehendak Tuhan dan kebutuhan manusia akan petunjuk yang benar.

Wahyu sebagai media komunikasi ilahi menjadi inti dari misi kenabian. Wahyu tidak hanya dipahami sebagai informasi yang disampaikan Tuhan kepada nabi, tetapi juga sebagai sumber nilai, hukum, moralitas, dan orientasi spiritual yang membimbing perjalanan manusia. Dalam sejarah agama-agama samawi, wahyu menjadi dasar terbentuknya komunitas religius dan sistem kepercayaan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan manusia. Di dalam Islam, wahyu mencapai bentuk finalnya melalui Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., sehingga pembahasan mengenai wahyu tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang otoritas kenabian, kemukjizatan Al-Qur'an, dan konsep penutup kenabian.

Para ulama kalam sejak masa awal Islam telah memberikan perhatian besar terhadap persoalan kenabian karena tema ini berkaitan dengan pembelaan terhadap akidah Islam dari berbagai kritik filosofis maupun teologis. Sebagian kelompok mempertanyakan kebutuhan manusia terhadap nabi apabila akal dianggap cukup untuk membimbing kehidupan manusia, sementara sebagian lainnya mempertanyakan kemungkinan komunikasi antara Tuhan yang transenden dengan manusia yang

terbatas. Oleh karena itu, para mutakallimun mengembangkan argumentasi rasional yang sistematis untuk menjelaskan kemungkinan, kebutuhan, dan fungsi kenabian dalam kehidupan manusia.

Selain memiliki dimensi teologis, pembahasan tentang kenabian juga memiliki dimensi moral dan sosial yang sangat luas. Para nabi bukan hanya pembawa wahyu, tetapi juga teladan etika yang menunjukkan bagaimana ajaran Tuhan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, sifat-sifat rasul, mukjizat, dan misi sosial para nabi menjadi bagian penting dalam memahami hubungan antara agama dan pembentukan masyarakat yang berkeadaban.

Bab ini akan membahas secara mendalam konsep kenabian dan wahyu dalam perspektif teologi Islam, mulai dari pengertian nabi dan rasul, hakikat mukjizat, konsep wahyu menurut ulama kalam, sifat-sifat rasul, hingga pembahasan mengenai penutup kenabian. Seluruh pembahasan diarahkan untuk menunjukkan bahwa konsep kenabian dalam Islam bukan sekadar doktrin keagamaan, melainkan juga sistem pemikiran yang memiliki dimensi filosofis, spiritual, moral, dan peradaban.

A. Pengertian Nabi dan Rasul

Dalam terminologi Islam, istilah nabi dan rasul memiliki makna yang berkaitan erat, namun keduanya tidak sepenuhnya identik. Secara etimologis, kata nabi berasal dari kata Arab *naba'a* yang berarti berita, informasi penting, atau kabar agung. Dari akar kata tersebut, nabi dipahami sebagai seseorang yang menerima

berita atau wahyu dari Allah swt. Sementara itu, sebagian ulama menghubungkannya dengan kata *nabwah* yang berarti ketinggian atau kemuliaan, sehingga nabi dipahami sebagai manusia yang memiliki kedudukan luhur karena dipilih oleh Tuhan.

Adapun kata rasul berasal dari kata *risalah* yang berarti pesan atau pengutusan. Rasul dipahami sebagai seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Dengan demikian, setiap rasul adalah nabi karena menerima wahyu, tetapi tidak setiap nabi berstatus rasul. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri atau komunitas tertentu tanpa membawa syariat baru, sedangkan rasul menerima wahyu sekaligus diperintahkan untuk menyampaikan syariat kepada umat secara lebih luas.

Perbedaan antara nabi dan rasul menjadi salah satu tema penting dalam diskursus ilmu kalam. Sebagian ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah menekankan bahwa rasul memiliki tugas tabligh yang lebih eksplisit dibanding nabi. Dalam perspektif ini, nabi berfungsi sebagai penerima bimbingan ilahi, sedangkan rasul memiliki tanggung jawab dakwah yang lebih luas dan menghadapi penolakan sosial secara lebih intensif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep kenabian dalam Islam tidak hanya menyangkut pengalaman spiritual individual, tetapi juga berkaitan dengan transformasi sosial dan moral masyarakat.

Al-Qur'an menggambarkan para nabi dan rasul sebagai manusia pilihan yang memperoleh amanah besar dari Tuhan. Mereka bukan makhluk supranatural yang terlepas dari sifat kemanusiaan, melainkan manusia biasa yang diberi wahyu dan

dipersiapkan untuk menjalankan misi ilahi. Penegasan mengenai aspek kemanusiaan para nabi memiliki makna teologis yang penting karena menunjukkan bahwa agama tidak diturunkan untuk makhluk yang berada di luar realitas manusia, melainkan untuk manusia dengan segala kompleksitas kehidupannya.

Dalam banyak ayat, Al-Qur'an menunjukkan bahwa para nabi mengalami kesedihan, perjuangan, penolakan, dan penderitaan sebagaimana manusia pada umumnya. Nabi Nuh menghadapi penolakan dari kaumnya selama berabad-abad, Nabi Ibrahim mengalami pengasingan dan ancaman pembakaran, Nabi Musa menghadapi kekuasaan Fir'aun yang tiranik, dan Nabi Muhammad saw. mengalami berbagai bentuk intimidasi sosial serta politik dari kaum Quraisy. Semua pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kenabian bukanlah jalan menuju kemewahan duniawi, tetapi amanah berat yang menuntut kesabaran, keteguhan moral, dan pengorbanan besar.

Dalam perspektif teologi Islam, pengutusan nabi dan rasul dipandang sebagai bentuk rahmat Allah kepada manusia. Akal manusia memang memiliki kemampuan untuk berpikir dan memahami sebagian realitas, tetapi manusia tetap membutuhkan petunjuk ilahi agar tidak terjebak dalam relativisme moral dan kesesatan spiritual. Para ulama kalam menjelaskan bahwa keberadaan nabi menjadi bukti kasih sayang Tuhan karena melalui merekalah manusia memperoleh penjelasan tentang tujuan hidup, tata cara ibadah, prinsip keadilan, serta orientasi kehidupan akhirat.

Selain sebagai pembawa wahyu, para nabi juga memiliki fungsi edukatif dan peradaban. Mereka mengajarkan nilai-nilai keadilan, menentang penindasan, membangun solidaritas sosial, dan memperbaiki struktur masyarakat yang rusak. Oleh sebab itu, sejarah kenabian dalam Islam bukan sekadar sejarah spiritual, tetapi juga sejarah perjuangan moral dan sosial. Nabi Muhammad saw., misalnya, tidak hanya menyampaikan ajaran tauhid, tetapi juga membangun masyarakat Madinah yang berlandaskan persaudaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam konteks modern, pembahasan mengenai kenabian tetap relevan karena manusia kontemporer menghadapi berbagai krisis moral, spiritual, dan sosial yang kompleks. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak selalu diiringi dengan kematangan etika, sehingga manusia tetap membutuhkan inspirasi moral dari tradisi kenabian. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan kasih sayang yang dibawa para nabi memiliki signifikansi universal yang melampaui batas ruang dan waktu.

B. Mukjizat

Mukjizat merupakan salah satu aspek penting dalam pembahasan kenabian karena berfungsi sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa para nabi dan rasul. Secara etimologis, kata mukjizat berasal dari kata *a'jaza* yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Dalam terminologi ilmu kalam, mukjizat dipahami sebagai peristiwa luar biasa yang terjadi melalui

para nabi atas izin Allah dan tidak mampu ditandingi oleh manusia biasa.

Mukjizat memiliki dimensi teologis yang sangat penting karena ia menjadi tanda otentik bahwa seorang nabi benar-benar memperoleh dukungan ilahi. Ketika para nabi menghadapi penolakan dari masyarakat, mukjizat hadir sebagai bentuk pembuktian bahwa misi mereka bukan hasil rekayasa manusia. Mukjizat bukanlah pertunjukan magis untuk mencari popularitas, melainkan sarana penguatan iman dan legitimasi kenabian.

Para ulama membedakan mukjizat dengan sihir, karamah, dan bentuk fenomena luar biasa lainnya. Sihir dipandang sebagai manipulasi yang bersumber dari kemampuan tertentu atau bantuan kekuatan jahat, sedangkan mukjizat sepenuhnya bersumber dari kehendak Allah. Karamah adalah keistimewaan yang diberikan kepada wali Allah, tetapi tidak disertai klaim kenabian. Dengan demikian, mukjizat memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari fenomena supranatural lainnya.

Dalam sejarah para nabi, mukjizat tampil dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan konteks sosial masyarakat tempat nabi diutus. Nabi Musa a.s. diberikan mukjizat tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan membelah laut karena masyarakat Mesir saat itu sangat mengagumi praktik sihir. Nabi Isa a.s. diberikan kemampuan menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati atas izin Allah karena masyarakat pada zamannya memiliki perhatian besar terhadap dunia pengobatan. Adapun Nabi Muhammad saw. diberikan mukjizat terbesar berupa Al-

Qur'an yang memiliki keindahan bahasa, kedalaman makna, dan kandungan spiritual yang tidak dapat ditandingi.

Mukjizat Al-Qur'an memiliki karakteristik yang berbeda dibanding mukjizat nabi-nabi sebelumnya karena sifatnya yang abadi dan dapat terus dikaji sepanjang zaman. Kemukjizatan Al-Qur'an tidak hanya terletak pada aspek linguistik, tetapi juga pada konsistensi pesan moral, keluasan kandungan ilmu, serta kemampuannya membentuk peradaban besar. Para ulama tafsir dan teologi menjelaskan bahwa Al-Qur'an menjadi mukjizat intelektual dan spiritual yang relevan bagi berbagai generasi manusia.

Dalam kajian modern, sebagian sarjana Muslim berusaha memahami mukjizat secara lebih kontekstual. Mereka menekankan bahwa mukjizat tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum alam, tetapi sebagai manifestasi kekuasaan Tuhan yang berada di luar jangkauan pengetahuan manusia. Pendekatan ini mencoba menjembatani pemahaman teologis tradisional dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.

Meski demikian, para ulama tetap menegaskan bahwa mukjizat tidak boleh direduksi menjadi sekadar simbol psikologis atau metafora sastra. Mukjizat tetap dipahami sebagai realitas yang menunjukkan keterlibatan langsung kehendak Tuhan dalam sejarah manusia. Jika mukjizat dihilangkan dari konsep kenabian, maka dimensi transendental agama akan kehilangan salah satu fondasi pentingnya.

Mukjizat juga memiliki dimensi etis yang penting. Ia tidak hanya bertujuan membuktikan kekuasaan Tuhan, tetapi juga mengarahkan manusia menuju kesadaran moral dan spiritual. Mukjizat seharusnya melahirkan kerendahan hati di hadapan Tuhan, bukan sekadar kekaguman terhadap fenomena luar biasa. Oleh karena itu, Al-Qur'an berkali-kali menunjukkan bahwa sebagian kaum tetap menolak para nabi meskipun telah menyaksikan mukjizat, karena masalah utama bukan terletak pada kurangnya bukti, melainkan pada kesombongan dan penolakan hati.

C. Wahyu Menurut Ulama Kalam

Wahyu merupakan inti dari seluruh konsep kenabian dalam Islam. Tanpa wahyu, kenabian kehilangan makna substansialnya karena wahyu adalah media komunikasi antara Tuhan dan manusia pilihan-Nya. Dalam perspektif ilmu kalam, wahyu dipahami sebagai pemberitahuan Allah kepada nabi dengan cara tertentu yang berada di luar mekanisme pengetahuan manusia biasa.

Para ulama kalam memberikan perhatian besar terhadap persoalan wahyu karena tema ini berkaitan langsung dengan epistemologi keagamaan. Mereka berusaha menjelaskan bagaimana wahyu mungkin terjadi, bagaimana manusia dapat meyakini keabsahannya, dan bagaimana wahyu berhubungan dengan akal.

Kaum Asy'ariyah menekankan bahwa wahyu merupakan hak prerogatif Allah yang tidak dapat diukur sepenuhnya oleh akal

manusia. Menurut mereka, akal memiliki keterbatasan dalam memahami hakikat metafisik sehingga manusia membutuhkan petunjuk wahyu untuk mengetahui perkara-perkara gaib, hukum-hukum syariat, dan orientasi kehidupan akhirat. Dalam pandangan ini, wahyu memiliki otoritas yang lebih tinggi dibanding penalaran manusia.

Sementara itu, kaum Maturidiyah memberikan ruang yang lebih besar kepada akal. Mereka berpendapat bahwa manusia melalui akalanya dapat mengetahui keberadaan Tuhan dan sebagian nilai moral dasar, tetapi wahyu tetap diperlukan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan pasti mengenai syariat serta tujuan hidup manusia. Dengan demikian, akal dan wahyu dipandang saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

Kaum Mu'tazilah menempatkan akal pada posisi yang sangat penting dalam memahami agama. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan rasional untuk membedakan baik dan buruk secara independen. Namun demikian, mereka tetap mengakui pentingnya wahyu sebagai sarana penegasan dan penyempurnaan petunjuk moral. Dalam perspektif Mu'tazilah, wahyu dan akal seharusnya tidak bertentangan karena keduanya berasal dari Tuhan.

Pembahasan mengenai wahyu juga berkaitan dengan cara penyampaian kepada nabi. Al-Qur'an menjelaskan bahwa wahyu dapat disampaikan melalui berbagai bentuk, seperti ilham ke dalam hati, percakapan langsung dari balik hijab, atau melalui perantaraan malaikat Jibril. Dalam tradisi Islam, malaikat Jibril

memiliki peran sentral sebagai pembawa wahyu kepada para nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad saw.

Para ulama tasawuf memberikan dimensi spiritual yang lebih mendalam terhadap konsep wahyu. Mereka memandang wahyu sebagai manifestasi kedekatan antara Tuhan dan manusia pilihan-Nya. Dalam perspektif ini, pengalaman kenabian tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga spiritual dan eksistensial. Namun demikian, ulama tasawuf tetap membedakan secara tegas antara wahyu kenabian dan ilham yang diterima para wali, sebab wahyu bersifat otoritatif dan menjadi dasar syariat.

Dalam konteks pemikiran modern, diskursus mengenai wahyu berkembang ke arah yang lebih luas. Sebagian pemikir Muslim mencoba memahami wahyu melalui pendekatan linguistik, hermeneutik, dan historis. Mereka melihat wahyu bukan hanya sebagai teks suci, tetapi juga sebagai fenomena komunikasi ilahi yang hadir dalam konteks sejarah tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami relevansi pesan wahyu dalam kehidupan modern tanpa menghilangkan dimensi kesuciannya.

Meskipun demikian, mayoritas ulama tetap menegaskan bahwa wahyu memiliki karakter transenden yang tidak dapat direduksi menjadi produk budaya semata. Wahyu diyakini berasal dari Allah dan mengandung kebenaran yang melampaui keterbatasan sejarah manusia. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam, penghormatan terhadap wahyu menjadi bagian fundamental dari keimanan.

Hubungan antara wahyu dan akal menjadi salah satu isu paling penting dalam pemikiran Islam. Ketika akal dipisahkan

sepenuhnya dari wahyu, manusia dapat terjebak dalam relativisme moral. Sebaliknya, ketika wahyu dipahami tanpa keterlibatan akal, agama dapat berubah menjadi dogmatisme yang kaku. Karena itu, para ulama Islam klasik berusaha membangun keseimbangan antara keduanya agar agama tetap rasional sekaligus spiritual.

D. Sifat-Sifat Rasul

Dalam teologi Islam, para rasul memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadi syarat kesempurnaan misi kenabian mereka. Sifat-sifat tersebut bukan sekadar atribut moral biasa, melainkan karakter fundamental yang memastikan bahwa wahyu dapat disampaikan kepada manusia secara benar dan terpercaya.

Secara umum, ulama menyebut empat sifat wajib bagi rasul, yaitu *ṣidq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan wahyu), dan *fathanah* (cerdas). Keempat sifat ini dipandang sebagai landasan moral dan intelektual kenabian.

Sifat *ṣidq* menunjukkan bahwa para rasul selalu berkata benar dan tidak mungkin berdusta, terutama dalam menyampaikan wahyu. Kejujuran menjadi syarat mutlak karena kebohongan akan merusak legitimasi kenabian. Dalam sejarah Nabi Muhammad saw., bahkan sebelum diangkat menjadi rasul, beliau telah dikenal dengan gelar al-Amīn karena integritas moralnya yang tinggi.

Sifat *amanah* berarti bahwa para rasul dapat dipercaya dalam menjalankan seluruh tugas yang diberikan Allah. Mereka tidak menyalahgunakan wahyu untuk kepentingan pribadi, politik, atau ekonomi. Amanah menunjukkan bahwa kenabian bukan sarana

mencari keuntungan duniawi, melainkan tanggung jawab spiritual yang sangat berat.

Sifat *tabligh* berarti bahwa para rasul menyampaikan seluruh wahyu yang diterima tanpa menyembunyikan apa pun. Dalam perspektif teologi Islam, para rasul tidak memiliki hak untuk mengubah isi wahyu sesuai kepentingan pribadi atau tekanan sosial. Mereka berkewajiban menyampaikan risalah secara utuh meskipun menghadapi penolakan dan ancaman.

Sifat *fathanah* menunjukkan kecerdasan para rasul dalam memahami wahyu dan membimbing masyarakat. Para nabi bukan hanya individu saleh, tetapi juga pemimpin yang memiliki kebijaksanaan, kemampuan komunikasi, dan strategi sosial yang baik. Kecerdasan ini penting agar dakwah dapat diterima oleh masyarakat dengan efektif.

Selain sifat wajib, para ulama juga membahas sifat mustahil bagi rasul, yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki para nabi seperti dusta, khianat, menyembunyikan wahyu, dan kebodohan. Penegasan mengenai sifat mustahil ini bertujuan menjaga kesucian dan otoritas kenabian.

Di sisi lain, para rasul juga memiliki sifat jaiz sebagai manusia biasa, seperti makan, tidur, sakit, dan mengalami kesedihan. Penegasan ini penting agar umat tidak menempatkan nabi sebagai makhluk ilahi. Islam menolak pengkultusan berlebihan terhadap nabi karena para nabi tetap manusia yang memperoleh kemuliaan melalui wahyu dan ketakwaan.

Keteladanan moral para rasul memiliki pengaruh besar dalam pembentukan etika Islam. Nabi Muhammad saw., misalnya,

dipandang sebagai uswah hasanah atau teladan terbaik bagi umat manusia. Keteladanan beliau mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, keluarga, politik, ekonomi, hingga hubungan sosial.

Dalam konteks modern, sifat-sifat rasul memiliki relevansi yang sangat besar. Dunia kontemporer menghadapi krisis integritas, penyalahgunaan kekuasaan, dan kemerosotan moral dalam berbagai bidang kehidupan. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, kecerdasan, dan tanggung jawab sosial yang dicontohkan para rasul menjadi inspirasi penting dalam membangun masyarakat yang beretika.

E. Penutup Kenabian

Konsep penutup kenabian (*khatm al-nubuwwah*) merupakan salah satu doktrin fundamental dalam Islam. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad saw. adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus Allah kepada seluruh umat manusia. Keyakinan ini didasarkan pada Al-Qur'an, khususnya Surah al-Ahzab ayat 40 yang menyebut Nabi Muhammad sebagai "khatam al-nabiyyin" atau penutup para nabi.

Doktrin penutup kenabian memiliki implikasi teologis yang sangat luas. Pertama, ia menegaskan kesempurnaan risalah Islam sebagai agama universal yang berlaku hingga akhir zaman. Kedua, ia menunjukkan bahwa tidak akan ada wahyu syariat baru setelah Al-Qur'an. Ketiga, ia menjaga stabilitas akidah umat Islam dari berbagai klaim kenabian palsu.

Para ulama menjelaskan bahwa penutupan kenabian bukan berarti terhentinya bimbingan spiritual Tuhan kepada manusia, tetapi berakhirnya institusi kenabian yang membawa wahyu syariat baru. Setelah Nabi Muhammad saw., bimbingan agama diteruskan melalui ulama, pemikir, dan para pendidik yang berperan menjaga serta menjelaskan ajaran Islam.

Dalam sejarah Islam, muncul berbagai kelompok yang mengklaim adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad saw. Mayoritas ulama Islam menolak klaim tersebut karena dianggap bertentangan dengan prinsip dasar akidah Islam. Penegasan mengenai finalitas kenabian menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan doktrin Islam.

Konsep penutup kenabian juga memiliki dimensi peradaban. Dengan berakhirnya kenabian, manusia dituntut untuk menggunakan akal, ijtihad, dan tanggung jawab moral dalam mengembangkan kehidupan sosial sesuai prinsip-prinsip wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi dinamika intelektual dan perkembangan peradaban tanpa harus menunggu hadirnya nabi baru.

Dalam konteks modern, sebagian pemikir Muslim memandang konsep penutup kenabian sebagai tanda kedewasaan spiritual umat manusia. Wahyu telah sempurna diturunkan, sehingga tanggung jawab manusia adalah menggali, memahami, dan menerapkan nilai-nilai wahyu dalam berbagai tantangan zaman. Oleh sebab itu, finalitas kenabian tidak boleh dipahami sebagai stagnasi intelektual, tetapi sebagai dorongan untuk

mengembangkan kreativitas pemikiran dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Konsep penutup kenabian juga menegaskan universalitas ajaran Nabi Muhammad saw. Berbeda dengan sebagian nabi sebelumnya yang diutus untuk kaum tertentu, Nabi Muhammad saw. diutus bagi seluruh umat manusia tanpa batas geografis dan etnis. Universalitas ini tampak dalam ajaran Islam yang menekankan keadilan, persaudaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, doktrin penutup kenabian tidak hanya berfungsi sebagai keyakinan teologis, tetapi juga sebagai prinsip yang membentuk identitas intelektual dan spiritual umat Islam.

Kenabian dan wahyu merupakan fondasi utama dalam bangunan teologi Islam karena melalui keduanya manusia memperoleh petunjuk ilahi yang mengarahkan kehidupan menuju kebenaran dan keselamatan. Para nabi dan rasul hadir sebagai perantara antara Tuhan dan manusia, membawa risalah yang bertujuan memperbaiki kehidupan spiritual, moral, dan sosial umat manusia.

Pembahasan mengenai nabi dan rasul menunjukkan bahwa kenabian bukan sekadar fenomena spiritual individual, tetapi juga institusi peradaban yang memiliki dampak luas terhadap sejarah manusia. Para nabi tidak hanya mengajarkan tauhid, tetapi juga membangun nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan.

Mukjizat menjadi bukti kebenaran risalah para nabi sekaligus tanda kekuasaan Allah yang melampaui kemampuan manusia. Mukjizat tidak hanya memiliki dimensi supranatural, tetapi juga

dimensi moral yang mengarahkan manusia kepada kesadaran spiritual.

Wahyu dalam perspektif ulama kalam dipahami sebagai sumber pengetahuan ilahi yang melengkapi kemampuan akal manusia. Hubungan harmonis antara wahyu dan akal menjadi salah satu karakter penting tradisi intelektual Islam.

Sifat-sifat rasul menunjukkan bahwa integritas moral merupakan syarat utama kepemimpinan spiritual. Kejujuran, amanah, kecerdasan, dan tanggung jawab sosial yang dimiliki para rasul menjadi teladan universal yang tetap relevan dalam kehidupan modern.

Sementara itu, konsep penutup kenabian menegaskan kesempurnaan risalah Islam dan universalitas ajaran Nabi Muhammad saw. Finalitas kenabian bukan berarti berhentinya dinamika intelektual, tetapi justru menuntut umat Islam untuk terus mengembangkan pemikiran dan peradaban berdasarkan nilai-nilai wahyu.

Dengan memahami konsep kenabian dan wahyu secara mendalam, umat Islam tidak hanya memperoleh pemahaman teologis yang lebih kuat, tetapi juga mampu melihat bagaimana agama berfungsi sebagai sumber transformasi moral dan peradaban manusia.



BAB XIV

HARI AKHIR DAN ALAM GAIB

Keimanan terhadap hari akhir dan alam gaib merupakan salah satu fondasi utama dalam ajaran Islam yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap pembentukan cara pandang manusia mengenai kehidupan, moralitas, tanggung jawab, serta tujuan akhir eksistensinya di dunia. Dalam perspektif teologi Islam, kehidupan dunia tidak dipahami sebagai realitas yang berdiri sendiri dan bersifat final, melainkan sebagai fase sementara yang akan berakhir menuju kehidupan lain yang bersifat kekal. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hari akhir dan alam gaib tidak hanya berkaitan dengan persoalan metafisik mengenai peristiwa-peristiwa setelah kematian, tetapi juga menyangkut dimensi etis, spiritual, psikologis, dan sosial yang membentuk perilaku manusia selama menjalani kehidupan dunia.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan eskatologi atau ajaran mengenai kehidupan akhirat. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kiamat, kebangkitan manusia, hisab, surga, neraka, hingga berbagai dimensi alam gaib lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keyakinan terhadap kehidupan akhirat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk kesadaran religius seorang

Muslim. Bahkan, dalam banyak ayat, keimanan kepada Allah hampir selalu disejajarkan dengan keimanan kepada hari akhir sebagai dua fondasi utama kehidupan spiritual manusia.

Kepercayaan terhadap hari akhir pada hakikatnya memberikan arah moral bagi kehidupan manusia. Seseorang yang meyakini bahwa seluruh perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. akan memiliki kesadaran etis yang lebih kuat dalam bertindak. Dengan demikian, ajaran mengenai hari akhir bukan sekadar narasi tentang kehancuran kosmos atau gambaran tentang kehidupan setelah mati, melainkan juga mekanisme spiritual yang membentuk kontrol moral dalam kehidupan manusia.

Dalam perkembangan pemikiran Islam, pembahasan mengenai hari akhir dan alam gaib juga melahirkan berbagai diskursus teologis, filosofis, dan sufistik. Sebagian ulama menekankan aspek tekstual berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, sementara sebagian lainnya mencoba memberikan pendekatan rasional dan simbolik terhadap berbagai fenomena gaib yang dijelaskan dalam teks-teks keagamaan. Di sisi lain, para sufi lebih menekankan dimensi spiritual dan pengalaman batin dalam memahami realitas akhirat.

Di era modern, pembahasan mengenai alam gaib menghadapi tantangan baru akibat berkembangnya rasionalisme, materialisme, dan sains modern yang cenderung menempatkan realitas empiris sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Akibatnya, sebagian masyarakat modern memandang konsep akhirat dan alam gaib sebagai sesuatu yang irasional atau simbolik semata. Padahal,

dalam perspektif Islam, keterbatasan akal manusia justru menjadi alasan mengapa wahyu diperlukan untuk menjelaskan realitas yang berada di luar jangkauan indera.

Oleh karena itu, kajian mengenai hari akhir dan alam gaib perlu dipahami secara komprehensif, tidak hanya dalam kerangka dogmatis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai yang membentuk orientasi hidup manusia. Keimanan terhadap hari akhir seharusnya melahirkan pribadi yang bertanggung jawab, berintegritas, dan memiliki kesadaran spiritual yang tinggi dalam menjalani kehidupan.

A. Kiamat

Kiamat merupakan peristiwa besar yang menandai berakhirnya kehidupan dunia dan dimulainya kehidupan akhirat. Dalam ajaran Islam, kiamat dipahami sebagai kehancuran total alam semesta yang disertai dengan kebangkitan seluruh manusia untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di hadapan Allah Swt. Kepercayaan terhadap kiamat menjadi bagian integral dari rukun iman, sehingga penolakannya dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap ajaran dasar Islam.

Secara bahasa, kata kiamat berasal dari bahasa Arab qiyamah yang berarti berdiri, bangkit, atau tegak. Istilah tersebut menggambarkan keadaan manusia yang dibangkitkan dari kubur untuk berdiri di hadapan Allah Swt. guna menjalani proses pengadilan ilahi. Dalam Al-Qur'an, hari kiamat disebut dengan berbagai nama, seperti Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Yaumul Ba'ts, Yaumul Din, dan Yaumul Akhir. Banyaknya istilah tersebut

menunjukkan kompleksitas peristiwa akhirat yang mencakup berbagai tahapan dan dimensi.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa kiamat merupakan kepastian yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Dalam QS. Al-Hajj [22]: 7 ditegaskan:

“Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keyakinan terhadap kiamat merupakan bagian dari kepastian teologis dalam Islam. Namun demikian, waktu terjadinya kiamat sepenuhnya berada dalam pengetahuan Allah Swt. Tidak ada manusia, malaikat, ataupun nabi yang mengetahui kapan tepatnya kiamat akan terjadi.

Dalam hadis Nabi Muhammad saw., dijelaskan berbagai tanda-tanda kiamat, baik tanda kecil maupun tanda besar. Tanda-tanda kecil meliputi kemerosotan moral, maraknya fitnah, meningkatnya ketidakjujuran, rusaknya hubungan sosial, dan hilangnya rasa aman dalam masyarakat. Sementara itu, tanda-tanda besar mencakup munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa a.s., keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, hingga tiupan sangkakala oleh Malaikat Israfil.

Pembahasan mengenai tanda-tanda kiamat tidak boleh dipahami sekadar sebagai narasi apokaliptik yang menakutkan, melainkan juga sebagai peringatan moral bagi manusia agar senantiasa memperbaiki kualitas kehidupannya. Banyak ulama menegaskan bahwa inti ajaran tentang kiamat bukanlah spekulasi mengenai kapan waktunya terjadi, melainkan kesiapan spiritual dan moral manusia dalam menghadapinya.

Dalam perspektif filosofis, kiamat juga dapat dipahami sebagai simbol keterbatasan eksistensi dunia material. Seluruh kemajuan peradaban, kekuasaan politik, kekayaan ekonomi, dan pencapaian teknologi pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Dengan demikian, ajaran tentang kiamat mengingatkan manusia agar tidak terjebak pada kesombongan duniawi dan ilusi keabadian material.

Di era modern, isu mengenai kehancuran dunia sering dikaitkan dengan krisis ekologis, perang nuklir, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi manusia. Sebagian pemikir Muslim kontemporer melihat bahwa kerusakan ekologis yang terjadi saat ini dapat dipahami sebagai bentuk peringatan moral terhadap perilaku manusia yang melampaui batas. Al-Qur'an sendiri menegaskan dalam QS. Ar-Rum [30]: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.”

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa perilaku manusia memiliki dampak besar terhadap keseimbangan kosmos. Oleh sebab itu, keimanan terhadap kiamat seharusnya melahirkan kesadaran ekologis dan tanggung jawab moral terhadap alam semesta.

Selain itu, keyakinan terhadap kiamat juga memiliki dampak psikologis yang mendalam. Kesadaran bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dapat membantu manusia menghadapi penderitaan, kehilangan, dan ketidakadilan dengan lebih bijaksana.

Dalam konteks ini, kiamat tidak hanya dipahami sebagai akhir dunia, tetapi juga sebagai awal dari keadilan ilahi yang sempurna.

B. Surga dan Neraka

Surga dan neraka merupakan dua dimensi utama kehidupan akhirat yang menggambarkan balasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Dalam ajaran Islam, surga dipahami sebagai tempat kenikmatan abadi yang disediakan bagi orang-orang beriman dan beramal saleh, sedangkan neraka merupakan tempat siksaan bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan melakukan kezaliman.

Konsep surga dan neraka memiliki kedudukan penting dalam membentuk orientasi moral manusia. Kehadiran janji surga dan ancaman neraka bukan dimaksudkan semata-mata untuk menakut-nakuti atau menarik manusia secara emosional, melainkan sebagai mekanisme pendidikan spiritual agar manusia menyadari konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan.

Al-Qur'an menggambarkan surga dengan berbagai kenikmatan yang melampaui imajinasi manusia. Dalam QS. As-Sajdah [32]: 17 disebutkan:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti mereka yang indah dipandang sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hakikat kenikmatan surga tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh manusia karena berada di

luar pengalaman empiris duniawi. Gambaran mengenai sungai-sungai yang mengalir, taman-taman hijau, buah-buahan, dan istana megah dalam Al-Qur'an dipahami oleh banyak ulama sebagai pendekatan simbolik agar manusia dapat membayangkan kebahagiaan akhirat sesuai dengan keterbatasan bahasa manusia.

Sementara itu, neraka digambarkan sebagai tempat penuh penderitaan dan penyesalan. Api, panas yang membakar, minuman yang mendidih, serta siksaan lainnya menjadi simbol dari akibat spiritual dan moral atas perbuatan dosa manusia. Dalam QS. An-Nisa [4]: 56 dijelaskan:

“Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab.”

Gambaran tersebut menunjukkan beratnya konsekuensi moral dari kezaliman dan pengingkaran terhadap kebenaran.

Dalam kajian teologi Islam, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah gambaran surga dan neraka harus dipahami secara literal atau simbolik. Sebagian ulama tekstual memahami seluruh deskripsi tersebut secara nyata sesuai bunyi teks, sedangkan sebagian filosof dan sufi melihat adanya dimensi simbolik yang lebih mendalam. Bagi sebagian sufi, surga tertinggi bukan sekadar kenikmatan material, melainkan kedekatan spiritual dengan Allah Swt., sedangkan neraka terburuk adalah keterpisahan dari rahmat-Nya.

Pembahasan mengenai surga dan neraka juga berkaitan erat dengan konsep keadilan Tuhan. Kehidupan dunia sering kali memperlihatkan ketimpangan dan ketidakadilan, di mana orang baik terkadang menderita sementara pelaku kezaliman tampak

hidup dalam kemewahan. Konsep akhirat memberikan keyakinan bahwa keadilan sejati akan ditegakkan secara sempurna oleh Allah Swt. pada hari pembalasan.

Dalam perspektif psikologi agama, keyakinan terhadap surga dan neraka memiliki fungsi moral yang sangat penting. Harapan terhadap surga dapat melahirkan optimisme, ketabahan, dan semangat berbuat baik, sedangkan kesadaran terhadap ancaman neraka dapat menjadi kontrol moral yang mencegah manusia melakukan kejahatan.

Di era modern, sebagian kalangan mengkritik konsep neraka karena dianggap bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan kasih sayang Tuhan. Namun, dalam perspektif Islam, neraka dipahami bukan sebagai bentuk kekejaman Tuhan, melainkan konsekuensi dari pilihan moral manusia sendiri. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, surga dan neraka bukan sekadar tempat balasan di akhirat, tetapi juga simbol dari orientasi hidup manusia. Kehidupan dunia pada hakikatnya merupakan perjalanan moral yang menentukan arah akhir eksistensi manusia.

C. Hisab dan Mizan

Hisab dan mizan merupakan bagian penting dari rangkaian peristiwa hari akhir yang berkaitan dengan proses penghitungan dan penimbangan amal manusia. Dalam ajaran Islam, tidak ada satu pun perbuatan manusia yang akan luput dari pengetahuan Allah Swt. Seluruh amal, baik yang kecil maupun besar, akan

diperlihatkan kembali pada hari akhir sebagai bentuk keadilan ilahi yang sempurna.

Hisab secara bahasa berarti perhitungan, sedangkan mizan berarti timbangan. Hisab merujuk pada proses evaluasi terhadap seluruh amal manusia, sedangkan mizan menunjukkan proses penimbangan nilai amal tersebut. Dalam QS. Az-Zalzalah [99]: 7–8 ditegaskan:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan tanggung jawab moral manusia secara sangat serius. Tidak ada tindakan yang benar-benar hilang tanpa konsekuensi. Bahkan perbuatan yang tampak kecil dalam pandangan manusia tetap memiliki nilai di hadapan Allah Swt.

Dalam banyak hadis dijelaskan bahwa pada hari hisab manusia akan menerima catatan amalnya masing-masing. Orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan digambarkan sebagai golongan yang beruntung, sedangkan mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kiri menjadi simbol kehancuran moral.

Konsep hisab dan mizan memiliki implikasi etis yang sangat besar. Kesadaran bahwa seluruh tindakan akan diperiksa secara adil dapat membentuk sikap hati-hati dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran, amanah, dan integritas menjadi

sangat penting karena tidak ada satu pun perilaku manusia yang dapat disembunyikan dari pengetahuan Allah Swt.

Dalam perspektif filsafat moral, konsep hisab menunjukkan bahwa kehidupan manusia memiliki dimensi akuntabilitas transenden. Manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum sosial atau negara, tetapi juga kepada Tuhan sebagai sumber moralitas tertinggi. Dengan demikian, etika dalam Islam tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual.

Mizan atau timbangan amal sering dipahami secara simbolik maupun literal oleh para ulama. Sebagian memahami bahwa benar-benar terdapat timbangan nyata di akhirat, sedangkan sebagian lainnya memaknainya sebagai simbol keadilan Tuhan yang sangat presisi. Apa pun bentuknya, inti dari konsep mizan adalah penegasan bahwa Allah Swt. tidak akan berlaku zalim terhadap siapa pun.

Dalam kehidupan modern, konsep hisab memiliki relevansi yang sangat besar di tengah krisis moral global. Korupsi, manipulasi informasi, eksploitasi ekonomi, dan penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan bahwa banyak manusia kehilangan kesadaran akan pertanggungjawaban moral. Oleh karena itu, keimanan terhadap hisab dapat menjadi fondasi spiritual untuk membangun budaya integritas dan keadilan sosial.

Selain itu, hisab juga memberikan penghiburan bagi orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan dunia. Banyak kejahatan yang tidak terselesaikan secara sempurna di dunia, namun Islam mengajarkan bahwa seluruh kebenaran akan diungkap pada hari

akhir. Tidak ada penindasan yang akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

Hisab dan mizan bukan sekadar narasi eskatologis, melainkan sistem moral yang membentuk kesadaran manusia agar hidup secara bertanggung jawab, jujur, dan adil dalam seluruh aspek kehidupan.

D. Syafaat

Syafaat merupakan salah satu konsep penting dalam teologi Islam yang berkaitan dengan pertolongan atau perantaraan yang diberikan kepada manusia pada hari akhir dengan izin Allah Swt. Dalam tradisi Islam, syafaat sering dikaitkan dengan Nabi Muhammad saw., para nabi, malaikat, orang-orang saleh, dan amal kebajikan tertentu yang dapat menjadi sebab keringanan bagi manusia di akhirat.

Secara bahasa, syafaat berasal dari kata *syaf* yang berarti genap atau perantara. Dalam konteks teologi, syafaat dipahami sebagai permohonan yang diajukan kepada Allah Swt. untuk memberikan rahmat, pengampunan, atau keringanan kepada seseorang.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa tidak ada syafaat yang dapat diberikan tanpa izin Allah Swt. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 255 disebutkan:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa syafaat tetap berada dalam otoritas penuh Allah Swt. Tidak ada makhluk yang memiliki kekuasaan independen untuk menentukan keselamatan manusia.

Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw., dijelaskan bahwa Rasulullah akan memperoleh syafaat kubra atau syafaat terbesar pada hari kiamat. Syafaat tersebut diberikan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Namun demikian, syafaat tidak boleh dipahami sebagai jaminan otomatis yang membuat manusia bebas melakukan dosa tanpa pertobatan.

Para ulama menegaskan bahwa syafaat harus dipahami dalam hubungan antara rahmat Tuhan dan tanggung jawab moral manusia. Orang yang memperoleh syafaat tetap merupakan mereka yang memiliki iman dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui amal saleh.

Dalam sejarah teologi Islam, konsep syafaat pernah menjadi perdebatan antara berbagai kelompok. Sebagian kelompok Khawarij dan Mu'tazilah cenderung menolak pemahaman syafaat bagi pelaku dosa besar karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan Tuhan. Sebaliknya, mayoritas Ahlussunnah menerima konsep syafaat sebagai manifestasi kasih sayang Allah yang tidak menghapus tanggung jawab manusia.

Dalam perspektif spiritual, syafaat mencerminkan luasnya rahmat Allah Swt. Kehadiran konsep syafaat memberikan harapan bagi manusia yang penuh kelemahan dan dosa agar tidak terjebak dalam keputusasaan. Islam mengajarkan keseimbangan antara rasa takut terhadap hukuman Tuhan dan harapan terhadap rahmat-Nya.

Di sisi lain, pemahaman syafaat yang keliru dapat menimbulkan sikap moral yang berbahaya apabila dijadikan alasan untuk meremehkan dosa. Oleh sebab itu, para ulama menekankan bahwa syafaat bukan pengganti amal saleh, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya.

Dalam kehidupan sosial, konsep syafaat juga dapat dipahami sebagai simbol pentingnya solidaritas dan kepedulian antarmanusia. Islam mendorong umatnya untuk saling membantu, mendoakan, dan memberikan pertolongan selama berada di dunia. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keselamatan spiritual tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial.

Dengan demikian, syafaat dalam Islam bukan sekadar doktrin teologis mengenai pertolongan di akhirat, tetapi juga cerminan dari keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang Allah Swt.

E. Alam Barzakh

Alam barzakh merupakan fase kehidupan antara kematian dan kebangkitan pada hari kiamat. Dalam ajaran Islam, kematian tidak dipahami sebagai akhir dari eksistensi manusia, melainkan perpindahan dari kehidupan dunia menuju dimensi lain yang bersifat gaib. Alam barzakh menjadi tempat penantian manusia sebelum memasuki kehidupan akhirat secara sempurna.

Kata barzakh secara bahasa berarti pembatas atau penghalang antara dua hal. Dalam QS. Al-Mu'minun [23]: 100 disebutkan:

“Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan.”

Ayat tersebut menunjukkan adanya fase antara kematian dan kebangkitan yang tidak dapat ditembus kembali oleh manusia yang telah meninggal.

Dalam banyak hadis dijelaskan bahwa alam kubur merupakan awal dari perjalanan akhirat. Di alam barzakh, manusia akan mengalami nikmat kubur atau azab kubur sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Konsep tersebut menunjukkan bahwa kehidupan spiritual manusia tidak berhenti setelah kematian.

Sebagian ulama memahami pengalaman di alam barzakh secara literal, sementara sebagian lainnya memberikan pendekatan simbolik dan spiritual. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa alam barzakh merupakan realitas gaib yang keberadaannya ditegaskan dalam wahyu.

Pembahasan mengenai alam barzakh memiliki dampak psikologis dan spiritual yang mendalam. Kesadaran bahwa kematian bukan akhir dari perjalanan manusia dapat membentuk sikap hidup yang lebih hati-hati dan bermakna. Manusia didorong untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati dengan memperbanyak amal saleh dan memperbaiki hubungan dengan sesama.

Dalam tradisi tasawuf, kematian sering dipahami sebagai proses kembali kepada Allah Swt. Oleh karena itu, para sufi memandang kematian bukan sekadar peristiwa biologis, tetapi juga perjalanan spiritual menuju hakikat kehidupan yang sesungguhnya.

Di era modern, masyarakat sering kali berusaha menghindari pembicaraan mengenai kematian karena dianggap menakutkan atau mengganggu kenyamanan psikologis. Padahal, kesadaran terhadap kematian justru dapat membantu manusia memahami keterbatasan dirinya dan mengarahkan hidup secara lebih bermakna.

Kajian psikologi eksistensial menunjukkan bahwa manusia yang menyadari kefanaan hidup cenderung memiliki orientasi nilai yang lebih mendalam dibandingkan mereka yang tenggelam dalam materialisme. Dalam konteks ini, ajaran mengenai alam barzakh dapat dipahami sebagai mekanisme spiritual yang membantu manusia menghadapi realitas kematian dengan lebih bijaksana.

Selain itu, keyakinan terhadap alam barzakh juga memperlihatkan bahwa Islam memandang kehidupan manusia secara berkesinambungan. Dunia, alam kubur, dan akhirat merupakan rangkaian perjalanan eksistensial yang saling berkaitan. Apa yang dilakukan manusia di dunia akan menentukan kondisi kehidupannya di alam berikutnya.

Alam barzakh bukan sekadar konsep gaib yang bersifat abstrak, tetapi bagian dari sistem keimanan yang membentuk kesadaran spiritual, etika, dan orientasi hidup manusia.

Keimanan terhadap hari akhir dan alam gaib merupakan fondasi penting dalam ajaran Islam yang membentuk orientasi spiritual, moral, dan sosial manusia. Konsep kiamat mengajarkan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan seluruh manusia akan kembali kepada Allah Swt. untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya.

Surga dan neraka menunjukkan adanya konsekuensi moral dari setiap tindakan manusia. Kehidupan akhirat menjadi manifestasi dari keadilan dan kasih sayang Allah Swt. yang sempurna. Sementara itu, hisab dan mizan menegaskan bahwa seluruh amal manusia akan diperiksa secara adil tanpa ada sedikit pun kezaliman.

Konsep syafaat memperlihatkan luasnya rahmat Allah Swt., sedangkan alam barzakh menunjukkan bahwa kematian bukan akhir dari eksistensi manusia, melainkan awal dari perjalanan menuju kehidupan yang kekal.

Dengan memahami ajaran mengenai hari akhir dan alam gaib secara mendalam, manusia diharapkan mampu menjalani kehidupan dunia dengan lebih bertanggung jawab, bijaksana, dan berorientasi pada nilai-nilai spiritual. Keimanan terhadap akhirat pada hakikatnya bukan sekadar keyakinan metafisik, tetapi juga kekuatan moral yang mendorong manusia untuk membangun kehidupan yang adil, bermakna, dan penuh kesadaran akan tanggung jawab di hadapan Allah Swt.



BAGIAN IV

ILMU KALAM KONTEMPORER



BAB XV

ILMU KALAM MODERN

A. Tantangan Modernitas

Perkembangan Ilmu Kalam pada era modern menghadapi situasi historis yang sangat berbeda dibandingkan masa klasik ketika perdebatan teologis lebih banyak berkisar pada persoalan sifat-sifat Tuhan, kebebasan manusia, status pelaku dosa besar, atau legitimasi politik dalam komunitas Muslim awal. Dunia modern menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks karena perubahan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, budaya, dan struktur sosial telah mengubah secara mendasar cara manusia memahami realitas, agama, otoritas, bahkan makna keberadaan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Ilmu Kalam modern tidak lagi dapat bergerak hanya dalam ruang polemik klasik, tetapi dituntut untuk mampu menjawab problem-problem eksistensial baru yang muncul dalam masyarakat modern dan global.

Modernitas pada dasarnya merupakan sebuah proses historis yang ditandai oleh lahirnya rasionalitas ilmiah, industrialisasi, individualisme, sekularisasi, perkembangan negara-bangsa, serta meningkatnya kepercayaan manusia terhadap kemampuan akal

dan teknologi dalam mengatur kehidupan. Dalam konteks tersebut, otoritas agama yang pada masa pra-modern menjadi pusat penjelasan terhadap realitas mulai mengalami pergeseran karena manusia modern semakin percaya bahwa berbagai persoalan kehidupan dapat diselesaikan melalui sains, rasionalitas, dan sistem sosial-politik buatan manusia.

Bagi masyarakat Muslim, modernitas menghadirkan tantangan yang bersifat multidimensional. Di satu sisi, modernitas membawa kemajuan besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan komunikasi yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, di sisi lain, modernitas juga memunculkan krisis spiritual, keterasingan eksistensial, relativisme moral, serta melemahnya otoritas tradisi keagamaan. Situasi ini menyebabkan banyak umat Islam mengalami kegelisahan identitas antara mempertahankan tradisi keagamaan dan beradaptasi dengan perubahan dunia modern.

Dalam konteks tersebut, Ilmu Kalam modern muncul sebagai upaya intelektual untuk membangun kembali relevansi teologi Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Para pemikir Muslim kontemporer menyadari bahwa pendekatan kalam klasik yang terlalu fokus pada polemik metafisik tidak lagi cukup untuk menjawab persoalan masyarakat modern yang dihadapkan pada isu demokrasi, hak asasi manusia, kapitalisme global, krisis lingkungan, perkembangan bioteknologi, dan pluralisme budaya.

Salah satu tantangan terbesar modernitas terhadap teologi Islam adalah munculnya paradigma rasional-positivistik yang cenderung menganggap bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh

melalui metode ilmiah empiris. Paradigma ini sering kali menempatkan agama sebagai sesuatu yang subjektif, emosional, dan tidak memiliki legitimasi epistemologis setara dengan sains modern. Akibatnya, banyak masyarakat modern mulai memandang agama sekadar sebagai urusan privat yang tidak lagi relevan dalam ruang publik.

Selain itu, modernitas juga melahirkan budaya materialistik yang menempatkan keberhasilan ekonomi dan kenikmatan duniawi sebagai ukuran utama kehidupan manusia. Dalam masyarakat konsumeristik modern, manusia sering kali kehilangan dimensi spiritual karena hidup dipenuhi orientasi kompetisi ekonomi dan pencarian kepuasan material. Kondisi ini melahirkan apa yang oleh banyak pemikir disebut sebagai “krisis makna” dalam peradaban modern.

Para pemikir Islam modern seperti Fazlur Rahman, Muhammad Abduh, dan Mohammed Arkoun berusaha merumuskan kembali teologi Islam agar lebih dialogis terhadap modernitas tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar akidah. Mereka menekankan bahwa Islam pada hakikatnya memiliki tradisi rasional yang kuat dan tidak bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun perubahan sosial.

Dalam perkembangan mutakhir, Ilmu Kalam modern juga mulai memperluas wilayah kajiannya ke persoalan etika global, keadilan sosial, hak perempuan, demokrasi, serta hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Perluasan ini menunjukkan bahwa teologi Islam tidak lagi dipahami hanya sebagai disiplin yang membahas hubungan manusia dengan Tuhan secara abstrak,

tetapi juga sebagai sistem pemikiran moral yang harus mampu memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan kemanusiaan modern.

Penelitian dalam *Contemporary Islamic Theology Review* tahun 2025 menunjukkan bahwa arah baru Ilmu Kalam modern semakin menekankan dimensi humanistik dan etis dibandingkan pendekatan polemis tradisional. Teologi modern dipandang tidak cukup hanya mempertahankan doktrin, tetapi juga harus mampu menghadirkan makna spiritual dan solusi moral bagi masyarakat yang mengalami disorientasi akibat perubahan global yang sangat cepat.

Tantangan modernitas terhadap Ilmu Kalam sesungguhnya bukan sekadar ancaman terhadap agama, tetapi juga peluang bagi teologi Islam untuk melakukan pembaruan intelektual dan memperluas relevansinya dalam kehidupan manusia kontemporer.

B. Sekularisme

Salah satu tantangan paling besar yang dihadapi Ilmu Kalam modern adalah munculnya sekularisme sebagai paradigma sosial dan intelektual yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat kontemporer. Sekularisme bukan hanya fenomena politik yang memisahkan agama dari negara, melainkan juga sebuah cara pandang yang menempatkan agama di luar pusat kehidupan publik dan menjadikan rasionalitas manusia sebagai otoritas utama dalam menentukan arah kehidupan sosial.

Secara historis, sekularisme berkembang di Eropa sebagai respons terhadap dominasi institusi gereja pada Abad Pertengahan.

Pengalaman traumatis masyarakat Barat terhadap konflik agama, penindasan intelektual, dan otoritarianisme gereja mendorong munculnya gerakan pencerahan yang menekankan kebebasan berpikir, rasionalitas, dan otonomi manusia. Dalam proses tersebut, agama secara perlahan dipinggirkan dari ruang publik dan dipahami terutama sebagai urusan privat individu.

Ketika gagasan sekularisme masuk ke dunia Islam melalui kolonialisme, modernisasi, dan globalisasi, muncul perdebatan besar di kalangan pemikir Muslim mengenai hubungan antara agama dan negara, wahyu dan akal, serta posisi syariat dalam kehidupan modern. Sebagian kelompok melihat sekularisme sebagai ancaman serius terhadap identitas Islam karena dianggap dapat melemahkan otoritas agama dan menghilangkan dimensi spiritual kehidupan manusia.

Akan tetapi, sebagian pemikir Muslim lain mencoba membedakan antara sekularisasi sebagai proses diferensiasi sosial dengan sekularisme ideologis yang antiagama. Mereka berpendapat bahwa Islam dapat menerima modernisasi institusi sosial tanpa harus kehilangan nilai-nilai spiritual dan moralnya.

Dalam konteks Ilmu Kalam modern, tantangan sekularisme tidak hanya berkaitan dengan persoalan politik, tetapi juga perubahan kesadaran manusia modern. Banyak masyarakat modern mulai memandang agama tidak lagi sebagai sumber utama pengetahuan dan moralitas. Akibatnya, otoritas ulama dan institusi keagamaan mengalami penurunan pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan.

Fenomena ini mendorong para teolog Muslim modern untuk membangun pendekatan baru yang lebih rasional, humanistik, dan komunikatif dalam menjelaskan relevansi agama. Mereka menyadari bahwa mempertahankan agama di era sekular tidak cukup dilakukan melalui pendekatan dogmatis, tetapi harus melalui argumentasi intelektual yang mampu menjawab kebutuhan spiritual dan moral manusia modern.

C. Atheisme Modern

Perkembangan ateisme modern merupakan salah satu tantangan intelektual paling serius bagi teologi kontemporer karena ateisme tidak lagi sekadar berbentuk penolakan sederhana terhadap keberadaan Tuhan, melainkan telah berkembang menjadi sistem pemikiran filosofis, ilmiah, dan budaya yang memiliki pengaruh luas dalam masyarakat global.

Berbeda dengan bentuk skeptisisme klasik, ateisme modern memperoleh dukungan besar dari perkembangan sains modern, filsafat materialisme, dan kritik terhadap institusi agama. Tokoh-tokoh seperti Karl Marx, Friedrich Nietzsche, dan Sigmund Freud memberikan kontribusi besar terhadap berkembangnya kritik modern terhadap agama.

Dalam perkembangan kontemporer, muncul apa yang dikenal sebagai *New Atheism* yang dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Richard Dawkins dan Sam Harris. Gerakan ini tidak hanya menolak agama, tetapi juga menganggap agama sebagai sumber irasionalitas, konflik, dan hambatan kemajuan manusia.

Bagi Ilmu Kalam modern, tantangan ateisme tidak dapat dijawab hanya melalui pendekatan apologetik tradisional. Banyak pemikir Muslim kontemporer mencoba membangun argumen baru yang menghubungkan keberadaan Tuhan dengan persoalan kesadaran, moralitas, makna hidup, dan keteraturan kosmos.

Selain itu, sebagian teolog modern juga melihat bahwa berkembangnya ateisme sering kali berkaitan dengan krisis moral institusi agama sendiri. Ketika agama dipraktikkan secara represif, intoleran, atau tidak manusiawi, sebagian orang kehilangan kepercayaan terhadap agama dan akhirnya menolak konsep ketuhanan secara keseluruhan.

D. Sains dan Agama

Hubungan antara sains dan agama merupakan salah satu tema paling penting dalam Ilmu Kalam kontemporer karena perkembangan ilmu pengetahuan modern telah mengubah cara manusia memahami alam semesta, kehidupan, dan eksistensi manusia itu sendiri. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika sebagian kalangan menganggap bahwa sains dan agama berada dalam hubungan konflik yang tidak dapat dipertemukan.

Dalam sejarah Islam klasik, hubungan antara agama dan sains sebenarnya relatif harmonis. Banyak ilmuwan Muslim seperti Ibn Sina dan Al-Biruni memandang penelitian ilmiah sebagai bagian dari upaya memahami tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam semesta.

Akan tetapi, perkembangan sains modern melahirkan sejumlah teori yang memunculkan perdebatan teologis baru,

seperti teori evolusi, kosmologi modern, neurosains, dan bioteknologi. Sebagian kelompok religius merespons perkembangan tersebut secara defensif karena dianggap mengancam keyakinan agama.

Dalam konteks Ilmu Kalam modern, banyak pemikir Muslim berusaha membangun pendekatan integratif antara sains dan agama. Mereka menolak pandangan bahwa sains dan agama harus saling meniadakan. Menurut mereka, sains menjelaskan mekanisme alam, sedangkan agama memberikan makna moral dan spiritual terhadap keberadaan manusia.

Penelitian dalam *Journal of Science and Religion in Islam* tahun 2025 menunjukkan bahwa generasi muda Muslim modern cenderung lebih menerima pendekatan harmonis antara sains dan agama dibandingkan pendekatan konflik yang bersifat antagonistik.

E. Dialog Antaragama

Perkembangan dunia modern yang semakin global dan multikultural menjadikan dialog antaragama sebagai salah satu tema penting dalam Ilmu Kalam kontemporer. Masyarakat modern tidak lagi hidup dalam komunitas tertutup yang homogen, melainkan dalam ruang sosial yang mempertemukan berbagai agama, budaya, dan sistem nilai secara intensif.

Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan besar untuk membangun hubungan antaragama yang lebih damai dan konstruktif. Dialog antaragama tidak dimaksudkan untuk menghapus identitas teologis masing-masing agama, tetapi untuk

menciptakan saling pengertian, kerja sama kemanusiaan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Bagi sebagian kalangan konservatif, dialog antaragama kadang dipandang mencurigakan karena dikhawatirkan dapat melemahkan akidah. Akan tetapi, banyak pemikir Muslim modern menegaskan bahwa dialog justru merupakan bagian dari etika Islam yang menghargai kemanusiaan dan keadilan.

Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid misalnya, menekankan pentingnya membangun teologi inklusif yang mampu hidup berdampingan dengan masyarakat plural tanpa kehilangan identitas Islam.

Dalam konteks global modern, dialog antaragama juga menjadi sangat penting untuk mencegah konflik berbasis agama dan radikalisme. Banyak konflik modern sebenarnya bukan semata-mata disebabkan oleh agama, tetapi oleh manipulasi identitas agama untuk kepentingan politik dan ideologi tertentu.

Oleh sebab itu, Ilmu Kalam modern semakin menekankan pentingnya membangun teologi perdamaian, yaitu pendekatan teologi yang menempatkan agama sebagai kekuatan moral untuk menciptakan keadilan, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia universal.



BAB XVI

RELEVANSI ILMU KALAM MASA KINI

A. Ilmu Kalam di Perguruan Tinggi

Keberadaan ilmu kalam di perguruan tinggi memiliki arti yang sangat penting dalam membangun tradisi intelektual Islam yang kritis, rasional, dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Perguruan tinggi bukan sekadar institusi pendidikan yang berfungsi mentransfer pengetahuan, melainkan ruang akademik yang membentuk cara berpikir, karakter intelektual, serta orientasi moral generasi muda Muslim. Dalam konteks ini, ilmu kalam memiliki peran strategis untuk memperkuat fondasi akidah sekaligus mengembangkan kemampuan analitis mahasiswa dalam menghadapi berbagai persoalan keagamaan kontemporer.

Pada masa klasik, ilmu kalam berkembang sebagai respons terhadap perdebatan teologis yang muncul akibat interaksi umat Islam dengan filsafat Yunani, agama-agama lain, dan dinamika politik internal umat Islam. Para mutakallimun berusaha mempertahankan ajaran Islam melalui argumentasi rasional yang sistematis. Tradisi intelektual tersebut melahirkan berbagai mazhab teologi seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan pemikiran Islam.

Di perguruan tinggi modern, ilmu kalam tidak lagi cukup diajarkan sebagai sejarah pemikiran semata. Ilmu kalam perlu dikembangkan menjadi disiplin yang mampu berdialog dengan berbagai bidang ilmu kontemporer seperti filsafat modern, sosiologi agama, psikologi, teknologi digital, bioetika, hak asasi manusia, hingga studi lingkungan. Pendekatan multidisipliner seperti ini penting agar mahasiswa memahami bahwa persoalan akidah tidak terpisah dari realitas sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Salah satu tantangan utama dalam pengajaran ilmu kalam di perguruan tinggi adalah kecenderungan sebagian mahasiswa memandang disiplin ini sebagai materi teoritis yang jauh dari kehidupan nyata. Padahal, apabila diajarkan secara kontekstual, ilmu kalam memiliki relevansi besar dalam menjawab berbagai persoalan modern seperti ateisme, sekularisme, ekstremisme agama, krisis moral, dan problem identitas generasi muda.

Di era globalisasi informasi, mahasiswa hidup dalam lingkungan intelektual yang sangat terbuka. Mereka dapat mengakses berbagai pemikiran dari seluruh dunia melalui internet dan media digital. Kondisi ini membawa dampak positif berupa luasnya wawasan intelektual, tetapi juga memunculkan risiko kebingungan ideologis apabila mahasiswa tidak memiliki fondasi akidah yang kuat. Oleh karena itu, pengajaran ilmu kalam harus diarahkan untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan argumentatif, bukan sekadar hafalan dogmatis.

Metode pembelajaran ilmu kalam di perguruan tinggi juga perlu mengalami transformasi. Pendekatan ceramah satu arah yang

hanya menekankan hafalan konsep-konsep klasik sering kali membuat mahasiswa kehilangan minat terhadap kajian teologi. Sebaliknya, pembelajaran yang dialogis, berbasis riset, dan terhubung dengan isu-isu aktual akan membuat ilmu kalam lebih hidup dan relevan.

Selain itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah berkembangnya pemahaman keagamaan yang ekstrem. Kampus sering menjadi arena pertarungan ideologi karena mahasiswa berada pada fase pencarian identitas intelektual dan spiritual. Dalam situasi seperti ini, ilmu kalam dapat menjadi instrumen penting untuk membangun pemahaman agama yang moderat, rasional, dan menghargai perbedaan.

Ilmu kalam juga dapat berkontribusi dalam membangun etika akademik yang sehat. Tradisi *mutakallimun* klasik menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dapat dibahas melalui argumentasi ilmiah tanpa harus melahirkan permusuhan. Nilai ini sangat penting di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan budaya debat yang sering kali dipenuhi ujaran kebencian.

Dalam konteks Indonesia, penguatan ilmu kalam di perguruan tinggi Islam memiliki arti strategis karena Indonesia merupakan negara dengan masyarakat Muslim yang sangat plural dalam aspek budaya, organisasi keagamaan, dan orientasi pemikiran. Perguruan tinggi dapat menjadi pusat pengembangan teologi Islam yang inklusif dan kontekstual sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Ilmu kalam di perguruan tinggi tidak boleh dipahami sebagai mata kuliah pelengkap semata, melainkan sebagai fondasi

intelektual yang membantu mahasiswa memahami agama secara mendalam, rasional, dan relevan dengan tantangan zaman modern.

B. Aqidah di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara masyarakat memahami dan menjalankan agama. Internet, media sosial, platform video, dan berbagai aplikasi digital telah menciptakan ruang baru bagi penyebaran pengetahuan keagamaan. Dalam banyak hal, transformasi ini memberikan manfaat besar karena akses terhadap ilmu agama menjadi jauh lebih mudah dan cepat dibanding masa sebelumnya. Namun demikian, era digital juga melahirkan tantangan serius terhadap penguatan akidah umat Islam.

Salah satu karakter utama era digital adalah melimpahnya informasi tanpa batas. Setiap individu dapat memproduksi, menyebarkan, dan mengonsumsi informasi keagamaan secara instan. Akibatnya, otoritas keilmuan menjadi semakin terbuka dan tidak lagi hanya berada di tangan ulama atau lembaga pendidikan formal. Fenomena ini menciptakan demokratisasi pengetahuan, tetapi juga membuka peluang besar bagi penyebaran pemahaman agama yang dangkal, provokatif, bahkan menyesatkan.

Dalam konteks akidah, tantangan terbesar di era digital bukan hanya datang dari kritik eksternal terhadap agama, tetapi juga dari banjir informasi yang menyebabkan masyarakat kesulitan membedakan antara pengetahuan yang valid dan informasi yang

manipulatif. Banyak konten keagamaan di media digital disampaikan secara emosional dan sensasional demi memperoleh perhatian publik, sementara kedalaman ilmiahnya sangat minim.

Fenomena dakwah digital memperlihatkan bagaimana agama sering kali direduksi menjadi slogan-slogan singkat, potongan video pendek, atau kutipan yang dilepaskan dari konteks ilmiahnya. Padahal, persoalan akidah membutuhkan penjelasan yang mendalam, argumentatif, dan sistematis. Ketika pemahaman agama dibangun hanya melalui konsumsi konten singkat tanpa proses belajar yang serius, maka masyarakat rentan mengalami simplifikasi pemikiran keagamaan.

Selain itu, era digital juga memunculkan tantangan berupa meningkatnya penyebaran ideologi ekstrem dan radikal melalui internet. Kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan media digital untuk menyebarkan propaganda yang membungkus kebencian dengan simbol-simbol agama. Mereka sering menggunakan pendekatan emosional yang menysasar generasi muda yang sedang mengalami pencarian identitas.

Di sisi lain, perkembangan dunia digital juga memperkuat arus sekularisme dan relativisme moral. Generasi muda hidup dalam lingkungan global yang dipenuhi berbagai pandangan hidup dan gaya hidup yang sangat beragam. Dalam kondisi seperti itu, sebagian orang mengalami kebingungan identitas dan mulai memandang agama hanya sebagai pilihan pribadi tanpa keterikatan moral yang kuat.

Ilmu kalam memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan tersebut karena ia membantu membangun fondasi

akidah yang rasional dan reflektif. Akidah yang dibangun melalui pemahaman mendalam akan lebih tahan menghadapi arus informasi dibanding akidah yang hanya bersifat emosional atau ikut-ikutan.

Penguatan akidah di era digital juga membutuhkan kemampuan literasi digital yang baik. Umat Islam perlu dibekali kemampuan untuk memverifikasi informasi, memahami konteks, serta membedakan antara dakwah yang ilmiah dan propaganda yang manipulatif. Dalam hal ini, pendidikan agama tidak cukup hanya menekankan hafalan teks, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

Era digital sesungguhnya tidak harus dipandang sebagai ancaman semata. Teknologi juga dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat, inklusif, dan humanis. Banyak ulama, akademisi, dan lembaga pendidikan yang memanfaatkan media digital untuk menyebarkan kajian keislaman berkualitas. Oleh karena itu, tantangan utama bukan pada teknologinya, melainkan pada bagaimana manusia menggunakannya.

Dengan demikian, penguatan akidah di era digital membutuhkan pendekatan baru yang menggabungkan kedalaman teologis, literasi teknologi, kemampuan berpikir kritis, dan sensitivitas terhadap perubahan sosial budaya modern.

C. Media Sosial dan Pemikiran Islam

Media sosial telah menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh dalam membentuk opini, budaya, dan cara berpikir

masyarakat modern. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan X bukan hanya ruang komunikasi sosial, tetapi juga arena pertarungan gagasan, identitas, dan otoritas keagamaan. Dalam konteks Islam, media sosial memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan pemikiran keagamaan kontemporer.

Sebelum era media sosial, penyebaran pemikiran Islam lebih banyak dilakukan melalui lembaga pendidikan, kitab-kitab klasik, majelis taklim, dan organisasi keagamaan. Otoritas keagamaan cenderung berada di tangan ulama yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Namun kini, media sosial memungkinkan siapa pun untuk menjadi penyampai pesan agama tanpa proses pendidikan formal yang memadai.

Perubahan ini membawa konsekuensi yang kompleks. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang yang sangat luas bagi dakwah Islam dan penyebaran pengetahuan keagamaan. Banyak masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses kajian agama kini dapat belajar melalui platform digital dengan mudah dan murah.

Namun di sisi lain, media sosial juga menciptakan budaya keberagamaan yang sangat dipengaruhi logika popularitas. Algoritma platform digital cenderung mendorong konten yang provokatif, emosional, dan sensasional karena jenis konten tersebut lebih mudah menarik perhatian pengguna. Akibatnya, diskusi keagamaan sering kali kehilangan kedalaman ilmiah dan berubah menjadi arena polarisasi.

Fenomena “ustaz media sosial” menunjukkan bagaimana popularitas digital terkadang lebih menentukan pengaruh

seseorang dibanding kapasitas keilmuan yang sesungguhnya. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat dapat dengan mudah terpengaruh oleh narasi keagamaan yang sederhana tetapi emosional, meskipun tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Media sosial juga mempercepat penyebaran hoaks keagamaan dan ujaran kebencian berbasis identitas agama. Potongan ceramah yang dipelintir, kutipan hadis tanpa konteks, serta narasi konspiratif sering menyebar secara masif dan memicu konflik sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak netral, melainkan arena yang dapat digunakan untuk tujuan konstruktif maupun destruktif.

Dalam perspektif ilmu kalam, media sosial harus dipahami sebagai medan baru dakwah dan pergulatan ideologis. Oleh karena itu, umat Islam membutuhkan pendekatan teologis yang lebih adaptif terhadap budaya digital. Dakwah di media sosial tidak cukup hanya mengandalkan retorika emosional, tetapi juga harus menghadirkan argumentasi yang rasional, santun, dan mencerahkan.

Selain itu, media sosial juga memengaruhi cara generasi muda memahami otoritas agama. Banyak anak muda lebih percaya pada figur digital yang komunikatif dibanding ulama tradisional yang dianggap kurang dekat dengan budaya mereka. Fenomena ini menuntut lembaga keagamaan dan perguruan tinggi Islam untuk lebih aktif memanfaatkan teknologi digital secara kreatif.

Pemikiran Islam di era media sosial juga menghadapi tantangan berupa fragmentasi pengetahuan. Informasi keagamaan sering dikonsumsi secara parsial tanpa konteks metodologis yang

utuh. Akibatnya, sebagian masyarakat memahami agama secara tekstual dan hitam-putih tanpa mempertimbangkan kompleksitas realitas sosial.

Karena itu, ilmu kalam perlu hadir sebagai instrumen intelektual yang membantu masyarakat memahami agama secara lebih mendalam dan proporsional. Tradisi berpikir kritis yang dikembangkan para mutakallimun dapat menjadi dasar penting dalam membangun budaya dialog dan literasi keagamaan yang sehat di ruang digital.

D. Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan salah satu isu paling penting dalam kehidupan masyarakat modern yang plural dan multikultural. Dalam konteks global, meningkatnya konflik berbasis identitas agama, ekstremisme, intoleransi, dan politisasi agama menunjukkan bahwa keberagamaan yang tidak disertai kedewasaan intelektual dapat menjadi sumber ketegangan sosial. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.

Dalam perspektif Islam, moderasi beragama memiliki akar teologis yang sangat kuat. Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, yaitu umat yang berada di tengah, seimbang, dan adil. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam menolak sikap berlebihan, baik dalam bentuk ekstremisme maupun liberalisme yang menghilangkan prinsip-prinsip dasar agama.

Ilmu kalam memiliki kontribusi penting dalam membangun moderasi beragama karena disiplin ini sejak awal berkembang melalui tradisi dialog, debat ilmiah, dan argumentasi rasional. Para ulama kalam terbiasa menghadapi perbedaan pandangan secara intelektual tanpa harus menghilangkan penghormatan terhadap lawan diskusi.

Moderasi beragama bukan berarti melemahkan keyakinan atau mencampuradukkan semua agama menjadi sama. Moderasi justru menuntut seseorang memiliki keyakinan yang kuat sekaligus mampu menghormati hak orang lain untuk berbeda. Dalam konteks ini, ilmu kalam membantu membangun keseimbangan antara komitmen akidah dan keterbukaan sosial.

Di era modern, tantangan terhadap moderasi beragama semakin kompleks karena perkembangan media digital mempercepat penyebaran ideologi ekstrem. Narasi kebencian dapat menyebar secara masif dalam waktu singkat dan memengaruhi cara masyarakat memandang kelompok lain. Oleh karena itu, pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk mengatasi ekstremisme. Diperlukan pendekatan pendidikan dan penguatan pemikiran keagamaan yang moderat.

Perguruan tinggi, pesantren, organisasi keagamaan, dan media memiliki tanggung jawab besar dalam membangun budaya moderasi. Pendidikan agama harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, empati sosial, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama memiliki arti yang sangat penting karena masyarakat Indonesia terdiri atas

berbagai agama, suku, budaya, dan tradisi. Keharmonisan sosial hanya dapat terjaga apabila masyarakat memiliki sikap keberagamaan yang dewasa dan inklusif.

Ilmu kalam juga dapat membantu mengatasi kecenderungan takfirisme, yaitu sikap mudah mengkafirkan kelompok lain hanya karena perbedaan pandangan. Tradisi intelektual Islam klasik menunjukkan bahwa para ulama sering berbeda pendapat dalam banyak persoalan teologis, tetapi tetap menjaga etika ilmiah dan persaudaraan.

Moderasi beragama pada akhirnya bukan sekadar slogan politik atau program sosial, melainkan sikap intelektual dan spiritual yang harus dibangun melalui pendidikan, keteladanan, dan pembinaan akidah yang matang.

E. Masa Depan Ilmu Kalam

Masa depan ilmu kalam sangat bergantung pada kemampuan disiplin ini untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan fondasi teologisnya. Dunia modern menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding masa klasik, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan, krisis lingkungan, bioetika, globalisasi budaya, hingga perubahan pola kehidupan akibat revolusi digital. Semua perubahan tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang membutuhkan jawaban teologis yang relevan.

Apabila ilmu kalam hanya mengulang perdebatan klasik tanpa menghubungkannya dengan persoalan kontemporer, maka disiplin ini berisiko kehilangan relevansi sosialnya. Sebaliknya,

apabila ilmu kalam mampu berdialog dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan realitas modern, maka ia dapat kembali menjadi pusat dinamika intelektual Islam.

Salah satu arah penting masa depan ilmu kalam adalah pengembangan pendekatan interdisipliner. Ilmu kalam perlu berdialog dengan filsafat modern, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu komunikasi, dan teknologi digital agar mampu memahami kompleksitas masyarakat kontemporer.

Selain itu, masa depan ilmu kalam juga berkaitan dengan kemampuan umat Islam membangun tradisi berpikir kritis. Dalam banyak kasus, krisis keberagamaan modern muncul karena lemahnya budaya intelektual dan dominasi pendekatan emosional dalam memahami agama. Oleh karena itu, revitalisasi ilmu kalam harus diarahkan untuk membangun budaya diskusi ilmiah yang sehat.

Di era kecerdasan buatan dan otomatisasi, manusia menghadapi tantangan baru terkait makna kehidupan, etika teknologi, dan posisi manusia dalam peradaban modern. Pertanyaan tentang kebebasan manusia, tanggung jawab moral, dan hubungan antara teknologi dan spiritualitas menjadi isu penting yang membutuhkan refleksi teologis mendalam.

Ilmu kalam masa depan juga perlu lebih memperhatikan isu-isu kemanusiaan universal seperti keadilan sosial, lingkungan hidup, kemiskinan, kesetaraan, dan perdamaian dunia. Teologi Islam tidak boleh terjebak hanya pada perdebatan abstrak, tetapi harus hadir sebagai kekuatan moral yang mendorong transformasi sosial.

Dalam konteks global, umat Islam hidup di tengah masyarakat dunia yang semakin plural dan saling terhubung. Oleh sebab itu, ilmu kalam masa depan perlu mengembangkan pendekatan dialogis yang mampu menjelaskan ajaran Islam secara rasional dan humanis kepada masyarakat internasional.

Teknologi digital juga membuka peluang baru bagi perkembangan ilmu kalam. Kajian-kajian teologi kini dapat diakses secara global melalui platform daring, perpustakaan digital, dan ruang diskusi virtual. Hal ini memungkinkan lahirnya generasi baru intelektual Muslim yang lebih terbuka dan terhubung secara internasional.

Namun demikian, perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan spiritualitas. Tanpa fondasi moral yang kuat, kemajuan teknologi justru dapat memperdalam krisis kemanusiaan. Dalam konteks inilah ilmu kalam memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan nilai-nilai spiritual.

Dengan demikian, masa depan ilmu kalam sangat bergantung pada keberanian umat Islam untuk melakukan pembaruan intelektual tanpa kehilangan akar tradisi. Ilmu kalam harus berkembang menjadi disiplin yang tidak hanya mempertahankan akidah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan peradaban manusia yang lebih adil, damai, dan bermartabat.

Ilmu kalam pada hakikatnya merupakan disiplin intelektual yang terus berkembang mengikuti dinamika sejarah manusia. Keberadaannya tidak hanya penting dalam mempertahankan

akidah Islam dari berbagai tantangan pemikiran, tetapi juga dalam membangun kemampuan umat Islam untuk memahami agama secara rasional, kritis, dan kontekstual.

Di perguruan tinggi, ilmu kalam memiliki peran strategis dalam membentuk tradisi intelektual yang sehat dan moderat. Sementara itu, di era digital, ilmu kalam menjadi semakin relevan karena masyarakat menghadapi banjir informasi, krisis otoritas keagamaan, dan penyebaran ideologi ekstrem melalui media sosial.

Media sosial telah mengubah cara masyarakat memahami agama, sehingga diperlukan pendekatan teologis baru yang lebih adaptif terhadap budaya digital. Dalam konteks ini, ilmu kalam dapat menjadi instrumen penting untuk membangun literasi keagamaan yang kritis dan bertanggung jawab.

Moderasi beragama juga menjadi salah satu agenda penting yang membutuhkan kontribusi ilmu kalam. Tradisi dialog dan argumentasi rasional dalam ilmu kalam dapat membantu membangun kehidupan beragama yang damai, inklusif, dan menghargai keberagaman.

Masa depan ilmu kalam bergantung pada kemampuannya untuk berdialog dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan persoalan kemanusiaan modern. Ilmu kalam tidak boleh berhenti sebagai kajian historis semata, tetapi harus terus berkembang menjadi kekuatan intelektual yang mampu memberikan jawaban terhadap tantangan zaman.

Revitalisasi ilmu kalam merupakan kebutuhan mendesak bagi umat Islam modern agar agama tetap hadir sebagai sumber

pencerahan spiritual, moral, dan peradaban di tengah perubahan dunia yang semakin kompleks.



BAGIAN PENUTUP

KESIMPULAN

A. Ringkasan Isi Buku

Pembahasan mengenai aqidah dan perkembangan pemikiran dalam Islam merupakan kajian yang sangat luas, kompleks, dan memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan sejarah peradaban manusia, khususnya dalam membentuk orientasi spiritual, intelektual, moral, dan sosial umat Islam dari masa ke masa. Seluruh uraian dalam buku ini pada hakikatnya memperlihatkan bahwa aqidah bukan sekadar kumpulan doktrin teologis yang bersifat abstrak dan teoritis, melainkan fondasi utama yang menentukan arah pandangan hidup manusia, pola berpikir, cara memahami realitas, serta sikap dalam menghadapi dinamika kehidupan yang terus berubah.

Pada bagian awal pembahasan, dijelaskan bahwa aqidah Islam merupakan keyakinan yang bersumber dari wahyu Allah Swt. dan menjadi dasar utama bagi seluruh aspek kehidupan seorang Muslim. Aqidah tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan yang bersifat ritual dan spiritual, tetapi juga menjadi landasan etis dan filosofis dalam membangun hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Oleh sebab itu, aqidah

dalam Islam memiliki kedudukan sentral karena menentukan kualitas keimanan, pola perilaku, dan orientasi hidup manusia.

Buku ini juga menjelaskan bahwa perkembangan pemikiran aqidah dalam Islam tidak berlangsung dalam ruang yang statis, melainkan mengalami dinamika yang sangat panjang sepanjang sejarah peradaban Islam. Perbedaan situasi politik, sosial, budaya, dan intelektual melahirkan berbagai aliran pemikiran yang mencoba memahami hubungan antara Tuhan, manusia, wahyu, akal, kebebasan, dan takdir dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam konteks tersebut, muncul berbagai mazhab teologi seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jabariyah, dan Qadariyah yang masing-masing memiliki corak argumentasi dan pendekatan tersendiri.

Perbedaan pemikiran tersebut menunjukkan bahwa sejarah intelektual Islam berkembang melalui proses dialog, perdebatan, kritik, dan pencarian kebenaran yang terus berlangsung. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Islam memiliki tradisi intelektual yang kaya dan dinamis. Para ulama tidak hanya menerima ajaran agama secara tekstual, tetapi juga berusaha memahami dan menjelaskan ajaran tersebut melalui pendekatan rasional, filosofis, dan kontekstual sesuai tantangan zamannya.

Selain membahas perkembangan aliran-aliran teologi, buku ini juga menguraikan berbagai persoalan pokok dalam aqidah Islam, seperti konsep tauhid, sifat-sifat Allah, kenabian, wahyu, takdir, kebebasan manusia, hari akhir, alam gaib, surga, neraka, hisab, mizan, syafaat, serta alam barzakh. Seluruh tema tersebut

memiliki hubungan yang erat karena sama-sama membentuk sistem keyakinan yang utuh dalam Islam.

Konsep tauhid dijelaskan sebagai inti ajaran Islam yang menegaskan keesaan Allah Swt. dalam zat, sifat, dan perbuatan-Nya. Tauhid tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga melahirkan implikasi sosial dan moral yang sangat luas, seperti keadilan, persamaan manusia, dan pembebasan dari segala bentuk penindasan. Dengan memahami tauhid secara mendalam, manusia diharapkan mampu membangun kehidupan yang berorientasi pada nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.

Pembahasan mengenai takdir dan kebebasan manusia memperlihatkan bahwa Islam berusaha menjaga keseimbangan antara pengakuan terhadap kekuasaan mutlak Allah Swt. dan tanggung jawab moral manusia. Dalam hal ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kemampuan memilih dan berusaha, namun seluruh realitas kehidupan tetap berada dalam pengetahuan dan kehendak Allah Swt. Pemahaman tersebut penting agar manusia tidak terjebak pada fatalisme yang mematikan kreativitas maupun kebebasan tanpa batas yang menghilangkan nilai spiritual.

Selanjutnya, pembahasan mengenai hari akhir dan alam gaib memberikan pemahaman bahwa kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir eksistensi manusia. Seluruh amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. melalui proses hisab dan mizan. Kehadiran konsep surga dan neraka menunjukkan adanya konsekuensi moral terhadap seluruh tindakan manusia selama hidup di dunia.

Dalam konteks kehidupan modern, seluruh pembahasan dalam buku ini menunjukkan bahwa aqidah Islam tetap relevan sebagai sumber nilai dan orientasi hidup manusia. Di tengah perkembangan teknologi, globalisasi, materialisme, dan krisis moral yang semakin kompleks, aqidah dapat menjadi fondasi spiritual yang menjaga keseimbangan antara kemajuan peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan.

Buku ini juga menegaskan bahwa Islam tidak memusuhi akal dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa tradisi intelektual berkembang sangat pesat ketika umat Islam mampu mengintegrasikan wahyu, rasionalitas, dan pengalaman empiris secara harmonis. Oleh sebab itu, pemahaman aqidah yang benar seharusnya melahirkan sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan, dialog, dan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas spiritual.

Dengan demikian, keseluruhan isi buku ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hakikat aqidah Islam dan dinamika pemikiran yang berkembang di dalamnya. Aqidah bukan sekadar dogma yang harus diterima secara pasif, melainkan sumber kesadaran spiritual dan intelektual yang dapat membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna, adil, dan bertanggung jawab.

B. Pentingnya Memahami Perbedaan Pemikiran

Perbedaan pemikiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, termasuk dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam. Sejak masa awal Islam hingga era

kontemporer, umat Islam telah mengalami berbagai dinamika intelektual yang melahirkan keragaman pandangan dalam memahami persoalan aqidah, hukum, politik, filsafat, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, memahami perbedaan pemikiran menjadi sangat penting agar umat Islam mampu bersikap dewasa, bijaksana, dan toleran dalam menghadapi keragaman pandangan yang ada.

Dalam sejarah Islam, perbedaan pemikiran tidak selalu lahir karena niat buruk atau keinginan untuk memecah belah umat, melainkan sering kali muncul akibat perbedaan metode memahami teks, latar belakang budaya, kondisi sosial-politik, kapasitas intelektual, serta pendekatan filosofis yang digunakan oleh para ulama dan pemikir Muslim. Dengan demikian, perbedaan pendapat pada dasarnya merupakan konsekuensi alami dari aktivitas intelektual manusia.

Al-Qur'an sendiri memberikan ruang bagi manusia untuk berpikir, merenung, dan menggunakan akalnya dalam memahami tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Banyak ayat Al-Qur'an yang mendorong manusia untuk melakukan refleksi intelektual, berdialog, dan mencari kebenaran melalui proses berpikir yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya menjadi masyarakat yang anti terhadap perbedaan dan diskusi ilmiah.

Namun demikian, perbedaan pemikiran sering kali berubah menjadi konflik ketika manusia kehilangan sikap objektif, rendah hati, dan etika dalam berdialog. Fanatisme kelompok, klaim kebenaran mutlak, serta sikap mudah menyalahkan pihak lain

dapat melahirkan perpecahan sosial yang merugikan umat Islam secara keseluruhan. Oleh sebab itu, memahami perbedaan pemikiran tidak cukup hanya pada level pengetahuan teoritis, tetapi juga memerlukan kedewasaan moral dan spiritual.

Salah satu pelajaran penting dari sejarah pemikiran Islam adalah bahwa peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya ketika tradisi dialog dan keterbukaan intelektual berkembang secara sehat. Pada masa keemasan Islam, para ulama, filosof, ahli hadis, ahli fikih, dan ilmuwan mampu berdiskusi secara kritis tanpa harus saling menghilangkan eksistensi satu sama lain. Perbedaan pandangan justru menjadi sumber kreativitas intelektual yang memperkaya khazanah keilmuan Islam.

Sebaliknya, kemunduran peradaban sering kali terjadi ketika ruang dialog tertutup dan masyarakat mulai terjebak pada fanatisme sempit. Sikap anti terhadap perbedaan dapat melahirkan stagnasi intelektual, kekerasan atas nama agama, dan hilangnya semangat pencarian ilmu pengetahuan.

Dalam konteks modern, pentingnya memahami perbedaan pemikiran menjadi semakin besar karena masyarakat hidup di tengah dunia yang sangat plural dan terhubung secara global. Perkembangan media sosial dan teknologi informasi memungkinkan berbagai pandangan menyebar dengan sangat cepat. Di satu sisi, kondisi tersebut membuka peluang bagi pertukaran gagasan yang produktif, tetapi di sisi lain juga berpotensi melahirkan polarisasi, ujaran kebencian, dan konflik identitas.

Oleh karena itu, umat Islam perlu mengembangkan budaya literasi, dialog, dan berpikir kritis agar mampu menghadapi keragaman pemikiran secara bijaksana. Perbedaan tidak boleh dipahami sebagai ancaman yang harus dimusnahkan, melainkan sebagai realitas sosial dan intelektual yang harus dikelola secara konstruktif.

Memahami perbedaan pemikiran juga penting untuk mencegah munculnya radikalisme dan ekstremisme keagamaan. Banyak tindakan kekerasan atas nama agama lahir dari cara pandang yang sempit dan ketidakmampuan menerima keberagaman interpretasi. Padahal, sejarah Islam menunjukkan bahwa para ulama besar sering kali memiliki perbedaan pandangan dalam berbagai persoalan tanpa saling mengkafirkan.

Selain itu, sikap terbuka terhadap perbedaan dapat memperkuat tradisi ilmiah dalam Islam. Pengetahuan berkembang melalui proses kritik, evaluasi, dan dialog yang berkelanjutan. Apabila manusia menutup diri terhadap pandangan lain, maka perkembangan ilmu pengetahuan akan mengalami stagnasi.

Dalam dunia pendidikan, pemahaman terhadap perbedaan pemikiran sangat penting untuk membentuk generasi yang toleran, kritis, dan mampu menghargai keragaman. Pendidikan agama tidak boleh hanya menanamkan hafalan dogmatis, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan etika dialog agar peserta didik mampu menghadapi perbedaan secara dewasa.

Dengan demikian, memahami perbedaan pemikiran bukan berarti menghilangkan keyakinan terhadap kebenaran yang

diyakini, melainkan membangun kesadaran bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami realitas secara sempurna. Sikap tersebut akan melahirkan kerendahan hati intelektual dan kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural.

C. Persatuan Umat dalam Perbedaan Aqidah

Persatuan umat merupakan salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial, kekuatan peradaban, dan keberlangsungan dakwah Islam di tengah dinamika kehidupan manusia yang penuh perbedaan. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Perintah tersebut menunjukkan bahwa persatuan bukan sekadar pilihan sosial, melainkan bagian dari ajaran agama yang memiliki dimensi spiritual dan moral.

Namun demikian, realitas sejarah menunjukkan bahwa umat Islam tidak pernah sepenuhnya homogen dalam memahami persoalan aqidah, hukum, maupun politik. Sejak masa awal Islam, berbagai perbedaan pandangan telah muncul dan berkembang menjadi mazhab, aliran, dan tradisi intelektual yang beragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keragaman merupakan kenyataan historis yang tidak dapat dihindari.

Persoalan yang paling penting bukanlah bagaimana menghilangkan seluruh perbedaan, melainkan bagaimana membangun persatuan di tengah perbedaan tersebut. Islam tidak

menuntut keseragaman mutlak dalam seluruh persoalan pemikiran, tetapi menekankan pentingnya menjaga ukhuwah, toleransi, dan sikap saling menghormati.

Dalam QS. Ali ‘Imran [3]: 103 ditegaskan:

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai.”

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa persatuan umat harus dibangun di atas nilai-nilai spiritual, keadilan, dan kasih sayang, bukan atas dasar fanatisme kelompok atau kepentingan politik semata.

Persatuan umat menjadi sangat penting karena perpecahan dapat melemahkan kekuatan sosial dan intelektual umat Islam. Sejarah menunjukkan bahwa konflik internal sering kali menjadi faktor utama yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Ketika energi umat habis untuk saling menyerang dan mempertentangkan perbedaan secara berlebihan, maka perhatian terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan pembangunan sosial menjadi terabaikan.

Dalam konteks aqidah, perbedaan memang terkadang sulit dihindari karena berkaitan dengan keyakinan yang sangat mendasar. Akan tetapi, para ulama besar dalam sejarah Islam telah memberikan teladan mengenai pentingnya menjaga adab dalam perbedaan. Banyak ulama yang berbeda pandangan secara teologis maupun fikih, tetapi tetap saling menghormati dan mengakui kontribusi intelektual masing-masing.

Persatuan umat tidak berarti meniadakan identitas mazhab atau menghapus keragaman pemikiran, melainkan membangun

kesadaran bahwa terdapat tujuan yang lebih besar dibandingkan perdebatan sektarian, yaitu kemaslahatan umat dan tegaknya nilai-nilai Islam dalam kehidupan.

Dalam masyarakat modern yang plural dan multikultural, persatuan umat menjadi semakin penting karena umat Islam menghadapi berbagai tantangan global, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, krisis moral, disrupsi teknologi, islamofobia, serta konflik politik yang berkepanjangan. Tantangan-tantangan tersebut tidak mungkin dihadapi secara efektif apabila umat Islam terus terjebak dalam pertentangan internal yang tidak produktif.

Oleh sebab itu, diperlukan paradigma keberagamaan yang lebih inklusif, moderat, dan dialogis. Sikap moderat dalam Islam bukan berarti menghilangkan prinsip-prinsip aqidah, tetapi menempatkan perbedaan dalam kerangka etika dan persaudaraan kemanusiaan.

Selain itu, persatuan umat juga memerlukan penguatan pendidikan yang menanamkan nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Generasi muda perlu dibekali pemahaman bahwa perbedaan merupakan bagian dari sunnatullah dalam kehidupan manusia. Dengan pemahaman tersebut, mereka tidak mudah terprovokasi oleh narasi kebencian dan fanatisme sempit.

Media sosial dan perkembangan teknologi informasi juga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan umat, bukan justru memperbesar polarisasi dan konflik identitas. Umat Islam harus mampu membangun budaya komunikasi yang santun, argumentatif, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Pada akhirnya, persatuan umat dalam perbedaan aqidah hanya dapat terwujud apabila setiap individu memiliki kesadaran spiritual yang mendalam bahwa seluruh manusia pada hakikatnya adalah hamba Allah Swt. yang sama-sama memiliki keterbatasan. Kesadaran tersebut akan melahirkan sikap rendah hati, menghormati orang lain, dan mengutamakan kemaslahatan bersama dibanding ego kelompok.

Dengan demikian, persatuan umat bukanlah proyek untuk menyeragamkan seluruh pemikiran, melainkan usaha bersama untuk membangun kehidupan yang damai, adil, dan bermartabat di tengah keragaman pandangan yang ada. Islam mengajarkan bahwa perbedaan dapat menjadi rahmat apabila dikelola dengan ilmu, kebijaksanaan, dan akhlak yang mulia.

Penutup Akhir

Seluruh pembahasan dalam buku ini pada dasarnya memperlihatkan bahwa aqidah dan pemikiran Islam merupakan dua dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk kehidupan umat manusia. Aqidah memberikan fondasi spiritual dan moral, sedangkan pemikiran menjadi sarana intelektual untuk memahami, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai konteks kehidupan.

Dinamika perbedaan pemikiran dalam Islam menunjukkan bahwa agama ini memiliki tradisi intelektual yang hidup dan berkembang. Oleh karena itu, umat Islam perlu menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk memperkaya wawasan dan

memperkuat persatuan, bukan sebagai alasan untuk melahirkan konflik dan permusuhan.

Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh kajian aqidah bukan hanya memperluas pengetahuan teologis, tetapi membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, berpikiran terbuka, dan mampu menghadirkan nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Abduh, Muhammad. *Risalah Tauhid*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Abdul Jabbar al-Hamadani. *Sharh al-Usul al-Khamsah*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2020.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Utrecht: Humanistics University Press, 2021.
- Al-Asy'ari, Abu al-Hasan. *Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Al-Asy'ari, Abu al-Hasan. *Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.
- Al-Asy'ari, Abu Hasan. *Al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Asy'ari, Abu Hasan. *Al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.
- Al-Asy'ari, Abu Hasan. *Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Al-Baghdadi, Abd al-Qahir. *Al-Farq bayn al-Firaq*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 2017.
- Al-Baqillani, Abu Bakar. *Al-Tamhid fi al-Radd 'ala al-Mulhidah wa al-Mu'atthilah*. Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqafiyyah, 2001.
- Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

- Al-Ghazali. *Tahafut al-Falasifah*. Beirut: Dar al-Masyriq, 2018.
- Al-Ghazali. *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2021.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019.
- Al-Juwaini, Imam al-Haramain. *Al-Irsyad ila Qawathi' al-Adillah fi Ushul al-I'tiqad*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Juwaini, Imam al-Haramain. *Al-Irsyad ila Qawathi' al-Adillah fi Ushul al-I'tiqad*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Al-Maturidi, Abu Mansur. *Kitab al-Tauhid*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Al-Maturidi, Abu Mansur. *Ta'wilat Ahl al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Al-Muqaddimah. Kairo: Dar al-Fajr, 2020.
- Al-Mughni fi Abwab al-Tauhid wa al-'Adl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2021.
- Al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2020.
- An Introduction to Shi'i Islam*. New Haven: Yale University Press, 2023.
- Asy'ari, Abu al-Hasan al-. *Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.
- Contemporary Islamic Studies Journal. "Reinterpreting Shi'a Theology in the Modern World." Vol. 11, No. 3, 2025.
- Contemporary Islamic Theology Journal. "Reason, Revelation, and Artificial Intelligence in Modern Kalam." Vol. 9, No. 3, 2025.
- Esposito, John L. *Islam: The Straight Path*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Esposito, John L. *The Oxford Dictionary of Islam*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Fakhry, Majid. *Sejarah Filsafat Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2019.

- Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2021.
- Frank, Richard M. *Classical Islamic Theology: The Ash'arites*. London: Routledge, 2007.
- Hafiza, Jesica Desky, dan Mutrofin. "Dampak Murji'ah Pada Generasi Terkini." *CLJ: Celestial Law Journal* 1, no. 2 (2023): 149–157.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Teologi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2018.
- Hanafi, Hasan. *Dari Akidah ke Revolusi*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Harahap, Azrai, dan Azzahra Kusuma Dewi. "Aspek-Aspek Tauhid dalam Islam, Rububiyah, Uluhiyah, Asma'u Wa Sifat." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 4, no. 1 (2025): 3191–3198.
- Harun Nasution. *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Hidayatullah, Mohammad. "Rasionalitas Teologi Abu Mansur al-Maturidi dan Relevansinya dalam Moderasi Beragama." *Jurnal Studi Islam Kontemporer* 4, no. 2 (2023): 115–130.
- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
- Ibnu Taimiyah. *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Wafa', 2004.
- Islam and Modernity*. Chicago: University of Chicago Press, 2022.
- Islam and Rationality*. Leiden: Brill, 2023.
- Islamic Rationalism*. Leiden: Brill, 2023.
- Islamic Studies Review. "Hadith Authority and Contemporary Theology in Muslim Intellectual Discourse." Vol. 18, No. 2, 2024.
- Islamic Theology*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022.
- Islamic Theology and Philosophy Journal. "Reconstructing Kalam in the Age of Artificial Intelligence." Vol. 8, No. 1, 2024.

- Islamic Theology Quarterly. "Wasil ibn Ata and the Origins of Rational Theology in Islam." Vol. 7, No. 1, 2024.
- Islamic Theology Review. "Imamah and Political Authority in Contemporary Shi'a Thought." Vol. 9, No. 1, 2024.
- Izutsu, Toshihiko. *Konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Izutsu, Toshihiko. *Konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2014.
- Izutsu, Toshihiko. *Konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2021.
- Journal of Islamic Intellectual History. "Revisiting Mu'tazilite Rationalism in Contemporary Islamic Thought." Vol. 11, No. 2, 2025.
- Journal of Islamic Thought and Civilization. "Contemporary Development of Kalam Studies in Modern Islamic Scholarship." Vol. 15, No. 2, 2025.
- Journal of Qur'anic Studies. "Contemporary Hermeneutics and Kalam Tradition in Modern Islam." Vol. 27, No. 1, 2025.
- Journal of Shi'a Islamic Studies. "Shi'a Identity and Historical Memory in Early Islam." Vol. 18, No. 2, 2025.
- Madelung, Wilferd. *Religious Schools and Sects in Medieval Islam*. London: Variorum, 1985.
- Madelung, Wilferd. *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Madelung, Wilferd. *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

- Madelung, Wilferd. *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2019.
- Madkur, Ibrahim. *Fi al-Falsafah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 2010.
- Maqalat al-Islamiyyin*. Kairo: Maktabah al-Nahdah, 2020.
- Martin, Richard C. *Defenders of Reason in Islam: Mu'tazilism and Rational Theology*. Oxford: Oneworld, 2024.
- Momen, Moojan. *Shi'i Islam: A Beginner's Guide*. London: Oneworld Publications, 2022.
- Mulyono, dan Bashori. *Studi Ilmu Tauhid atau Kalam*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Nahj al-Balaghah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2021.
- Nasir, Sahilun A. *Pemikiran Kalam: Teologi Islam Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present*. Albany: SUNY Press, 2020.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, dan Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 2020.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, dan Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 2022.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Bandung: Pustaka, 2017.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago: University of Chicago Press, 2020.

- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 2022.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press, 2021.
- Reason and Revelation in Islam*. London: Routledge, 2024.
- Rippin, Andrew. *Muslims: Their Religious Beliefs and Practices*. London: Routledge, 2012.
- Sarmila H., Nur, Indo Santalia, dan Hamzah Harun. “Iman dan Amal: Perbandingan Paradigma Teologis Al-Khawarij dan Al-Murji’ah.” *Jurnal Inovasi Pendidikan Kreatif* 5, no. 4 (2024).
- Shaban, M.A. *Islamic History: A New Interpretation*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2021.
- Shi'a Islam*. New York: SUNY Press, 2022.
- Sirajuddin, A. M. *Pemikiran Kalam dan Filsafat Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sirry, Mun'im. *Tradisi Intelektual Islam*. Malang: Madani, 2015.
- Syahriral, dan Nureni. “Ayat Al-Qur'an Tentang Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyyah.” *Jurnal Al-Qiyam* 6, no. 1 (2025).
- The Formative Period of Islamic Thought*. Oxford: Oneworld Publications, 2021.
- The Succession to Muhammad*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- The Theology of al-Ash'ari*. Beirut: Dar el-Machreq, 2022.
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985.

- Watt, W. Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017.
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020.
- Watt, W. Montgomery. *The Formative Period of Islamic Thought*. Oxford: Oneworld Publications, 2019.
- Watt, William Montgomery. *The Formative Period of Islamic Thought*. Oxford: Oneworld Publications, 2020.
- Wensinck, A.J. *The Muslim Creed*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Yazicioglu, Isra. *Understanding Maturidi Theology*. Ankara: Diyanet Foundation Publications, 2021.
- Yusuf, Muhammad Fodhil. "Analisis Nilai Pendidikan Tauhid dalam Kitab Mawa'id 'Ushfuriyyah dan Relevansinya dengan Konteks Pendidikan Islam Modern." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4 (2022).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2013.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2015.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2021.
- Zar, Sirajuddin. *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Zulkifli. *Sejarah Pemikiran Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.